

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

Provinsi Sumatera Barat

Triwulan IV - 2007

Kantor Bank Indonesia Padang
Tim Ekonomi Moneter
Kelompok Kajian Ekonomi

Penerbit :

Bank Indonesia Padang

Tim Ekonomi Moneter - Kelompok Kajian Ekonomi

Jl. Jenderal Sudirman 22

P A D A N G

Telp : 0751-31700

Fax : 0751-27313

E-Mail: yyok@bi.go.id

oki_h@bi.go.id

agung_bp@bi.go.id

KATA PENGANTAR

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat ini disusun secara triwulanan sebagai salah satu produk/*output* Kantor Bank Indonesia Padang dalam melaksanakan tugasnya baik dalam memberikan masukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia maupun memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah .

Cakupan materi dan sistematika pelaporan pada terbitan ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 9/36/INTERN tanggal 24 September 2007 tentang Kajian Ekonomi Regional. Materi yang dibahas dalam Kajian Ekonomi Regional kali ini merupakan lebih luas daripada kajian ekonomi regional sebelumnya seiring dengan peningkatan status Kantor Bank Indonesia Padang menjadi Kantor Kelas I dan reorientasi Kantor Bank Indonesia di daerah. Materi tersebut antara lain perkembangan ekonomi makro regional, inflasi regional, perbankan daerah, sistem pembayaran, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian daerah. Data yang dianalisis adalah data selama triwulan IV-2007 yang bersumber dari laporan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disampaikan kepada Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, dan lain-lain.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya terbitan ini.

Padang, Februari 2008

ttd

Uun S. Gunawan
Pemimpin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH SUMATERA BARAT	8
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO SUMATERA BARAT	9
1.1. Sisi Permintaan	10
1.1.1. Konsumsi	10
1.1.2. Investasi.....	12
1.1.3. Perdagangan Internasional.....	15
1.2. Sisi Penawaran	16
1.2.1. Sektor Pertanian	17
1.2.2. Sektor Industri Pengolahan	19
1.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran	21
1.2.4. Sektor Pengangkutan & Komunikasi	22
1.2.5. Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	23
1.2.6. Sektor Jasa-jasa	25
<i>Boks :</i>	
▪ <i>Ringkasan Eksekutif “Kajian Ekonomi Regional Zona Padang Triwulan IV-2007”</i>	
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL	27
2.1. Umum	27
2.2. Determinan Inflasi	28
2.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota Di Provinsi Tetangga	29
2.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa	31
2.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi terbesar	38
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH	41
3.1. Intermediasi Perbankan	42
3.1.1. Penghimpunan Dana Masyarakat.....	42
3.1.2. Penyaluran Kredit	44
3.2. Risiko Kredit Perbankan	47

3.3. Risiko Likuiditas	48
3.4. Risiko Pasar	49
3.5. Kredit MKM Lokasi Proyek	50
3.6. Perkembangan BPR	51
<i>Boks :</i>	
▪ <i>Perilaku Perbankan dan Debitur Terhadap Kredit Sektoral Di Sumatera Barat</i>	
BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	53
4.1. Umum	53
4.2. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah.....	54
4.3. Realisasi Belanja Negara.....	55
4.3.1. Belanja Pemerintah Pusat.....	55
4.3.2. Belanja Untuk Daerah dan Belanja Pemerintah Daerah.....	56
BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	59
5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran	59
5.2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai	59
5.2.1. Perkembangan Aliran Uang Masuk dan Keluar	59
5.2.2. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)	60
5.3. Perkembangan Alat Pembayaran Non Tunai.....	61
5.3.1. Perkembangan Kliring	61
5.3.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS).....	62
BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN.....	65
6.1. Ketenagakerjaan Daerah	65
6.2. Kesejahteraan	69
BAB VII PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH.....	71
7.1. Perkiraan Ekonomi	71
7.2. Perkiraan Inflasi	73

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 10
Tabel	1.2.	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Fasilitas Investasi BKPM 13
Tabel	1.3.	Nilai Ekspor 10 Komoditas Utama Sumbar 15
Tabel	1.4.	Nilai Impor 10 Komoditas Utama Sumbar 16
Tabel	1.5.	Pertumbuhan PDRB Sektoral 17
Tabel	1.6.	Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi 22
Tabel	2.1.	Perkembangan Inflasi Inti, Administered dan Food Kota Padang 29
Tabel	2.2.	Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang 30
Tabel	2.3.	Perkembangan Inflasi Triwulanan Padang Menurut Kelompok Barang ... 32
Tabel	2.4.	Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan 32
Tabel	2.5.	Perkembangan Inflasi Kelompok Makan Jadi 33
Tabel	2.6.	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan 34
Tabel	2.7.	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi 35
Tabel	2.8.	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan 35
Tabel	2.9.	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan 36
Tabel	2.10.	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang 36
Tabel	2.11.	Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang 38
Tabel	2.12.	Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang 39
Tabel	3.1.	Perkembangan Beberapa indikator perbankan Sumatera Barat..... 41
Tabel	3.2.	Perkembangan Net Interest Bank Umum 49
Tabel	3.3.	Perkembangan Beberapa Indikator BPR 51
Tabel	4.1.	Ringkasan Realisasi APBN Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat... 53
Tabel	4.2.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat 54
Tabel	4.3.	Perkembangan Komposisi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat 55
Tabel	4.4.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat 56
Tabel	4.5.	Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sumatera Barat 57
Tabel	5.1.	Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 62
Tabel	5.2.	Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Barat 63

Tabel	6.1.	Penduduk Sumatera Barat Usia 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan	65
Tabel	6.2.	Penduduk Sumatera Barat yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan ...	66
Tabel	6.3.	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan	67
Tabel	6.4.	Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Daerah Asal Prov. Sumatera Barat...	68
Tabel	7.1.	Ekspektasi Ekonomi Dunia Usaha	72

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik	1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional 9
Grafik	1.2.	Penjualan Sepeda Motor dan Minibus di Sumatera Barat..... 11
Grafik	1.3.	Konsumsi Listrik Rumah Tangga Di Sumatera Barat 11
Grafik	1.4.	Konsumsi BBM di Sumatera Barat..... 11
Grafik	1.5.	Konsumsi Semen di Sumatera Barat..... 11
Grafik	1.6.	Perkembangan Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium PNS Pusat di Sumbar..... 12
Grafik	1.7.	Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani 12
Grafik	1.8.	Perkembangan Kredit Konsumsi Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Rp juta) 12
Grafik	1.9.	Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dan Ekspektasi Penghasilan (Survei Konsumen BI)..... 12
Grafik	1.10.	Penjualan Kendaraan Niaga (unit) 13
Grafik	1.11.	Perkembangan Nilai Impor Mesin Pos Tarif HS 84 dan 85 (USD)..... 13
Grafik	1.12.	Belanja Modal Pemerintah Pusat di Sumbar..... 14
Grafik	1.13.	Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Rp Juta)..... 14
Grafik	1.14.	Realisasi dan Ekspektasi Kegiatan Usaha berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)..... 14
Grafik	1.15.	Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Ekspektasi Konsumen berdasarkan Survei Konsumen (SK)..... 14
Grafik	1.16.	Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Pertanian..... 18
Grafik	1.17.	Produksi dan Luas Panen Padi..... 18
Grafik	1.18.	Volume Ekspor Hasil Pertanian..... 18
Grafik	1.19.	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Rp Juta)..... 18
Grafik	1.20.	Kredit Sektor Pertanian Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek... 18
Grafik	1.21.	Dana Alokasi Khusus untuk Pertanian..... 18
Grafik	1.22.	Ekspor Barang Manufaktur 20
Grafik	1.23.	Produksi dan Penjualan Semen 20

Grafik	1.24.	Konsumsi Solar	20
Grafik	1.25.	Konsumsi Listrik Industri	20
Grafik	1.26.	Penerimaan Pajak Pendapatan Nilai (PPN)	21
Grafik	1.27.	Rata-Rata Lama Menginap Hotel Berbintang	21
Grafik	1.28.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang	21
Grafik	1.29.	Kredit Bank Umum Sektor Perdagangan Berdasarkan Lokasi Proyek	21
Grafik	1.30.	Jumlah Keberangkatan Penumpang melalui Bandara Minangkabau	23
Grafik	1.31.	Jumlah Keberangkatan Pesawat Udara melalui Bandara Minangkabau	23
Grafik	1.32.	Perkembangan Net Interest Margin Bank Umum se-Sumbar	24
Grafik	1.33.	Perkembangan BI Rate	24
Grafik	1.34.	Pendapatan Pemerintah dari Jasa Rumah Sakit	24
Grafik	1.35.	Pendapatan Pemerintah dari Jasa Pengurusan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB	24
Grafik	2.1.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (q-t-q)	27
Grafik	2.2.	Perkembangan Inflasi Kota Padang dan Nasional (y-o-y)	28
Grafik	2.3.	Perkembangan Inflasi KBI Padang dan KBI-KBI dibawah Koordinasi KKBI Padang (q-t-q)	30
Grafik	3.1.	Perkembangan Nilai dan Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Bank Umum	43
Grafik	3.2.	Perkembangan Nilai Dana Pihak Ketiga Bank Umum Menurut Kelompok Bank	43
Grafik	3.3.	Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga (Nominal)	43
Grafik	3.4.	Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga (Jumlah Rekening) ...	43
Grafik	3.5.	Perkembangan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik	44
Grafik	3.6.	Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik.....	44
Grafik	3.7.	Perkembangan DPK, Kredit (Lokasi Proyek) dan LDR	45
Grafik	3.8.	Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) dan BI Rate	45
Grafik	3.9	Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) menurut Kelompok Bank	45
Grafik	3.10	Perkembangan Share Kredit (Lokasi Proyek) Bank Pemerintah dan Bank Swasta	45

Grafik	3.11	Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Jenis Penggunaan	46
Grafik	3.12	Perkembangan Share Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Jenis Penggunaan	46
Grafik	3.13	Perkembangan Kredit Investasi (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama	46
Grafik	3.14	Perkembangan Share Kredit Investasi(Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama	46
Grafik	3.15	Perkembangan Kredit Modal Kerja (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama	47
Grafik	3.16	Perkembangan Share Kredit Modal Kerja (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama	47
Grafik	3.17	Perkembangan Kredit dan NPL Menurut Bank Pelapor	48
Grafik	3.18	Perkembangan Rasio NPL	48
Grafik	3.19	Komposisi Dana Perbankan	48
Grafik	3.20	Komposisi Pembiayaan Perbankan	48
Grafik	3.21.	Perkembangan Kredit MKM dan Total Kredit	53
Grafik	3.22.	Perkembangan Kredit MKM berdasarkan kelompok Bank.....	53
Grafik	3.23	Perkembangan Share Kredit MKM berdasarkan Jenis Penggunaan	56
Grafik	3.24	Perkembangan Share Kredit MKM berdasarkan Plafon Kredit	57
Grafik	4.1.	Perkembangan Posisi Simpanan Milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Perbankan.....	58
Grafik	4.2.	Posisi Surplus APBD Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2006.....	58
Grafik	5.1.	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar	60
Grafik	5.2.	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)	60
Grafik	6.1.	Perkembangan PDRB perkapita Sumatera Barat	69
Grafik	6.2.	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat	70
Grafik	7.1.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Barat ..	71
Grafik	7.2.	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	69
Grafik	7.3.	Ekspektasi Penghasilan, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Kondisi Ekonomi	71
Grafik	7.4.	Perkembangan Harga Palm Oil, Palm Kernel Oil, dan Minyak Dunia	69

Grafik	7.5.	Perkembangan Harga Minyak dan Batu Bara Dunia	71
Grafik	7.6.	Perkembangan Inflasi Kota Padang	69
Grafik	7.7.	Perkembangan Indeks Harga World Bank di Negara Low dan Middle Income	71
Grafik	7.8.	Perkembangan Harga Beras Thailand dan Gandum Canada (\$/mt)...	69
Grafik	7.8.	Perkembangan Harga Beras Thailand dan Gandum Canada (\$/mt)...	69
Grafik	7.9.	Perkembangan Harga Pupuk Internasional	69

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|---|--|
| Lampiran | 1 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 – 2007 |
| Lampiran | 2 | PDRB Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2005-2007 |
| Lampiran | 3 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Berlaku, 2005-2007 |
| Lampiran | 4 | PDRB Menurut Penggunaan Propinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2005-2007 |
| Lampiran | 5 | Indeks Harga Konsumen Bulanan Kota Padang (2002=100) |
| Lampiran | 6 | IHK Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa (Tahun Dasar 2002) |

**RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EKONOMI REGIONAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN IV - 2007**

GAMBARAN UMUM

Perekonomian Sumatera Barat tumbuh tinggi, sementara inflasi meningkat.

Trend pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus berlanjut hingga triwulan IV-2007. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh 6,94%, lebih tinggi daripada triwulan III-2007 sebesar 6,66% maupun triwulan IV-2006 sebesar 5,52%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi dan ekspor. Faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi antara lain daya beli masyarakat yang membaik, ekspektasi positif konsumen terhadap perekonomian, tersedianya dukungan pembiayaan, serta faktor musiman. Di sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua sektor. Sektor primer dan sekunder tumbuh melewati angka 7%, sementara sektor tersier tumbuh 6,72%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada triwulan III-2007 dan IV-2007 membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan pada tahun 2007 mencapai 6,29%.

Pada triwulan IV-2007 angka inflasi kota Padang tercatat sebesar 3,05% (q-t-q) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06%. Angka inflasi tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan IV-2007 yang tercatat sebesar 2,09%. Namun demikian, dibandingkan dengan inflasi kota Padang pada triwulan yang sama tahun 2006, yaitu sebesar 5,07%, inflasi kota Padang triwulan laporan masih lebih rendah

Kegiatan usaha perbankan di Sumatera Barat sampai dengan akhir November 2007 menunjukkan tren yang positif baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun risiko usaha.

Kegiatan usaha perbankan di Sumatera Barat sampai dengan akhir November 2007 menunjukkan tren yang positif baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun risiko usaha. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun perbankan terus meningkat dan diikuti pula oleh pertumbuhan kredit yang disalurkan. Yang lebih menggembirakan adalah kredit yang berasal dari luar wilayah Sumbar tumbuh lebih tinggi daripada kredit yang disalurkan perbankan wilayah Sumbar.

Realisasi APBN terus mengalami ekspansi

Realisasi APBN di provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan IV-2007 terus mengalami ekspansi baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Hingga akhir tahun 2007, realisasi belanja APBN di wilayah Sumbar mencapai Rp 12,09 triliun, meningkat Rp 2,44 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2006. APBN 2007 yang ekspansif di wilayah Sumatera Barat meningkatkan defisit APBN dari Rp 8,5 triliun pada triwulan IV-2006 menjadi Rp 9,91 triliun pada triwulan IV-2007. Hal ini mengindikasikan pemerintah pusat lebih ekspansif dalam melaksanakan kebijakan fiskalnya di Sumatera Barat.

Realisasi APBD masih mengalami hambatan

Sayangnya ekspansifnya APBN Pemerintah Pusat belum diikuti realisasi belanja APBD baik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Prompt indikator realisasi belanja pemerintah daerah berupa posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan per November 2007 masih belum menunjukkan penurunan. Hingga laporan ini diterbitkan, realisasi APBD semester II 2007 belum dirilis pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Namun, diperkirakan realisasi belanja pemerintah akan memuncak pada bulan Desember 2007 mengingat penempatan SBI Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada posisi November 2007 menunjukkan tren yang menurun.

Aliran uang kas yang masuk dan keluar Kantor Bank Indonesia (KBI) Padang pada triwulan IV-2007 meningkat cukup signifikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kegiatan ekonomi dan perbankan di akhir tahun 2007. Adanya bulan puasa di bulan September 2007 dan hari raya keagamaan di bulan Oktober & Desember 2007 memberikan stimulus bagi pelaku ekonomi, terutama yang bergerak

di sektor perdagangan, untuk meningkatkan skala usahanya. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya proyek pemerintah yang diselesaikan di triwulan akhir tahun 2007. Begitu pula dengan transaksi non tunai, secara umum juga mengalami peningkatan.

KONDISI MAKROEKONOMI

Ekonomi Sumatera Barat triwulan IV-2007 tumbuh sebesar 6,94% (y-o-y)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus berlanjut pada triwulan IV-2007. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh 6,94%, lebih tinggi daripada triwulan III-2007 sebesar 6,66% maupun triwulan IV-2006 sebesar 5,52%. Dari sisi permintaan, pada triwulan IV-2007 perekonomian Sumatera Barat tumbuh 6,94%, terutama didukung pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi antara lain daya beli masyarakat yang membaik, ekspektasi positif konsumen terhadap perekonomian, tersedianya dukungan pembiayaan, serta faktor musiman. Meningkatnya ekspor Sumatera Barat masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas perkebunan dunia seperti CPO dan karet akibat *shifting* permintaan dari energi fosil menjadi energi hijau. Investasi mulai sedikit bergerak meskipun ancaman tsunami masih membayangi daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Peningkatan realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah serta membaiknya ekspektasi dunia usaha merupakan faktor-faktor yang mendorong peningkatan investasi.

Perkembangan positif pada sisi permintaan, terutama konsumsi dan ekspor direspon oleh beberapa sektor ekonomi utama yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Peningkatan terhadap respon permintaan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan kapasitas terpasang serta sebagian kecil mulai menambah investasi. Secara umum, perekonomian Sumbar tumbuh cukup tinggi, namun belum berkualitas karena pertumbuhan belum optimal terjadi pada sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian ini antara lain peningkatan luas panen, peningkatan produksi, serta mulai meningkatnya penyaluran pembiayaan bagi sektor pertanian dari berbagai sumber.

Sektor pertanian pada triwulan IV-2007 mengalami pertumbuhan sebesar 7,54% (y-o-y), meningkat tajam lebih dari dua kali lipat daripada triwulan IV-2006. Akselerasi peningkatan nilai tambah produksi sektor pertanian ini terjadi karena semua subsektor mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Selain subsektor perkebunan yang memang menjadi andalan sektor pertanian Provinsi Sumbar, subsektor tanaman pangan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian ini antara lain peningkatan luas panen, peningkatan produksi, serta mulai meningkatnya penyaluran pembiayaan bagi sektor pertanian dari berbagai sumber.

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lepas dari peran pemerintah. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui sosialisasi sistem padi tanam sabatang (PTS) dan menyediakan anggaran Rp 1,5 miliar. Hasil panen padi dengan menggunakan sistem PTS tercatat 30% lebih baik daripada sistem tanam padi konvensional. Selain itu, biaya tanam sistem PTS lebih efisien karena bisa menghemat pemakaian pupuk. Konsumsi pupuk dengan sistem PTS hanya 17,5% dari konsumsi pupuk dengan sistem konvensional (Suara Pembaruan, 3 Agustus 2007). Pemerintah pusat juga tidak ketinggalan dalam upaya peningkatan sektor pertanian. Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian yang disalurkan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan pada triwulan IV-2007 hingga mencapai Rp 77,97 milyar.

Ekspektasi perbankan terhadap produksi pertanian Sumbar meningkat. Kredit sektor pertanian yang disalurkan bank, terutama bank swasta, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi (grafik 1.20). Ekspansi kredit sektor pertanian oleh bank swasta menunjukkan bahwa kegiatan usaha di sektor pertanian dipersepsikan positif di masa mendatang oleh kalangan perbankan.

INFLASI

Kota Padang pada triwulan IV2007 mengalami inflasi sebesar -3,05% (q-t-q).

Tekanan harga yang berasal dari faktor musiman adanya bulan puasa dan hari raya keagamaan pada triwulan III-2007 berlanjut di triwulan laporan dengan tekanan yang lebih tinggi. Permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan dan makanan jadi serta bahan sandang meningkat secara signifikan pada triwulan IV-2007. Kondisi ini cukup berbeda dengan nasional. Pada triwulan IV-2007, inflasi secara nasional justru lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya.

Seperti triwulan sebelumnya, faktor utama penyebab inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan IV-2007 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok bahan makanan, terutama pada sub kelompok komoditi bumbu-bumbuan dan sub kelompok komoditi padi-padian. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 5,12% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 1,63%. Masih tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditi bahan makanan selama bulan puasa dan hari raya keagamaan merupakan faktor musiman yang rutin terjadi setiap tahunnya.

Inflasi inti (core inflation) kota Padang tercatat sebesar 7,18% (y-o-y).

Dilihat dari determinannya, inflasi non inti (*non core inflation*) pada triwulan laporan bergerak turun dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, tren inflasi inti (*core inflation*) yang terus menurun sejak triwulan IV-2006, terhenti di triwulan IV-2007. Inflasi inti kota Padang tercatat sebesar 6,56% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 2,94%, sementara inflasi non inti sebesar 7,18% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 3,96%. Relatif bergejolaknya kurs rupiah terhadap mata uang asing, terutama US\$, ditenggarai merupakan penyebab meningkatnya inflasi inti tersebut.

PERBANKAN

Kegiatan intermediasi perbankan Sumatera Barat triwulan IV-2007 menunjukkan peningkatan.

Kegiatan intermediasi perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 menunjukkan perkembangan yang membaik. Posisi DPK pada triwulan IV-2007 tumbuh lebih ekspansif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan posisi DPK yang ekspansif didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan. Akselerasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi serta peningkatan pendapatan masyarakat diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan DPK. Sementara itu, posisi kredit yang disalurkan perbankan ke perekonomian Sumbang tumbuh cukup tinggi sebesar 7,44%. Peningkatan posisi kredit tersebut berasal dari akselerasi penyaluran kredit investasi, serta meningkatnya kredit modal kerja dan konsumtif. Tumbuhnya kredit investasi berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp 427,94 milyar menunjukkan bahwa ekspansi bisnis Sumatera Barat semakin membaik.

Penghimpunan DPK tumbuh ekspansif

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 tumbuh lebih ekspansif dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi DPK bank umum bulan November tumbuh Rp 1,25 triliun atau 9,93% dibandingkan posisi September 2007. Secara nominal pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada komponen tabungan yang tumbuh Rp 460,21 milyar, sementara secara persentase pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada komponen giro sebesar 10,45%.

Bank swasta lebih ekspansif dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Meskipun secara nominal pengumpulan dana masyarakat oleh bank swasta masih lebih kecil dibandingkan bank pemerintah, namun pertumbuhan posisi DPK oleh bank swasta secara persentase lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan posisi DPK oleh bank pemerintah.

Simpanan perusahaan meningkat cukup tinggi

Seiring dengan pertumbuhan giro yang ekspansif, simpanan perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Simpanan perusahaan meningkat 19,27% atau Rp 279,50 miliar, dari Rp 1,17 triliun (September 2007) menjadi Rp 1,45 triliun (November 2007). Peningkatan simpanan perusahaan ini diperkirakan terjadi karena peningkatan realisasi kredit dan kegiatan usaha yang meningkat selama triwulan IV-2007.

Peningkatan DPK diikuti peningkatan kredit

Peningkatan Dana Pihak Ketiga yang ekspansif pada triwulan IV-2007 diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang cukup tinggi. Posisi kredit bank umum berdasarkan lokasi proyek per November 2007 tumbuh 7,44% dibandingkan posisi September 2007 hingga menjadi Rp 12,57 triliun. Dilihat dari sisi kelompok bank penyalur kredit, seperti halnya penyaluran kredit, bank swasta terlihat lebih ekspansif (grafik 3.9-3.10). Jika posisi kredit yang disalurkan bank pemerintah hanya tumbuh 3,57%, maka posisi kredit yang disalurkan bank swasta tumbuh 11,97%.

Kredit Investasi tumbuh paling tinggi

Berdasarkan lokasi proyek, kredit investasi meningkat paling tinggi dibandingkan kredit menurut jenis penggunaan lainnya. Secara nominal, kredit investasi pada posisi November 2007 tumbuh Rp 427,94 milyar atau 21,03% dibandingkan posisi September 2007 menjadi Rp 2,46 triliun. Kredit modal kerja juga tumbuh cukup tinggi sebesar Rp 170,84 miliar atau 3,57% menjadi Rp 4,96 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sektor pertanian mendorong penyaluran kredit investasi perbankan ke sektor tersebut. Posisi kredit investasi bank umum yang disalurkan ke sektor pertanian bulan November 2007 meningkat Rp 281,93 milyar atau 25,81%. Secara nominal, pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya (grafik 3.15). Hal ini mengakibatkan sektor pertanian menjadi sektor yang paling dituju perbankan dalam menyalurkan kredit investasi.

Risiko kredit perbankan Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 terus mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat diikuti dengan pengelolaan kredit yang relatif baik. Gempa bumi 12 September 2007 yang menimpa beberapa wilayah di Sumatera Barat ternyata tidak menurunkan kualitas kredit perbankan. Rasio NPL bank umum justru terus menurun hingga November 2007. Justru gempa bumi diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan kredit konstruksi sebesar 19,92% dari Rp 186,48 milyar pada bulan September 2007 menjadi Rp 223,62 milyar pada bulan November 2007.

Pertumbuhan kredit MKM sedikit melambat

Pertumbuhan kredit MKM pada triwulan IV-2007 sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit MKM bank umum berdasarkan lokasi proyek pada bulan November 2007 tercatat sebesar Rp 8,64 triliun dengan pangsa sebesar 71,48%. Baik bank pemerintah maupun bank swasta juga mencatat perlambatan pertumbuhan kredit MKM dengan angka pertumbuhan kredit MKM masing-masing sebesar 2,87% dan 4,12%. Hal ini berbeda dengan triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan kredit MKM yang disalurkan bank pemerintah bisa mencapai 5,18%.

Peningkatan kegiatan usaha pada bank umum juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa indikator BPR menunjukkan kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR terus mengalami perbaikan. Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan BPR pada posisi November 2007 tercatat sebesar Rp 469,59 milyar atau tumbuh 10,68% dibandingkan posisi September 2007. Dibandingkan posisi tahun sebelumnya DPK BPR tumbuh hampir separuhnya atau 42,88%. Peningkatan DPK BPR ini juga searah dengan peningkatan DPK bank umum. Hal ini mengindikasikan peningkatan pendapatan masyarakat relatif menyebar hingga nasabah BPR yang tersebar di pelosok Sumbar.

KEUANGAN DAERAH

APBN Pemerintah Pusat ekspansif

Penerimaan pajak pusat di wilayah Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2007 terealisasi sebesar Rp 1,99 triliun, meningkat 22,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2006 (grafik 4.2). Secara nominal, peningkatan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp 251,55 milyar, diikuti dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 101,15 milyar. Meningkatnya kegiatan ekonomi terutama pada subsektor perkebunan, subsektor komunikasi, serta sektor perdagangan diperkirakan menjadi faktor yang

mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, kebijakan ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi faktor pendorong kenaikan penerimaan pajak.

Belanja modal APBN meningkat paling tinggi

Di sisi peningkatan realisasi belanja, belanja modal merupakan kelompok belanja dengan peningkatan tertinggi dibandingkan triwulan III-2006.

Dengan realisasi sebesar Rp 239,73 miliar, belanja modal pemerintah pusat meningkat sebesar 76,56%. Peningkatan belanja modal terjadi pada hampir semua jenis belanja modal kecuali belanja modal peralatan dan mesin yang menurun 19,96%. Belanja modal terbesar hingga triwulan III-2007 terjadi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 129,67 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan triwulan II-2007.

Hingga triwulan IV-2007, pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat mendapat transfer dana yang cukup besar dari pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dana perimbangan terbesar yang diperoleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Rp 5,78 triliun. Alokasi DAU terbesar disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang mendapat 89,75% dari total DAU atau Rp 5,19 triliun, sementara pemerintah provinsi memperoleh Rp 592,52 milyar (tabel 4.4).

Realisasi APBD masih terhambat

Peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ternyata tidak otomatis meningkatkan belanja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pantauan data simpanan pemerintah daerah di perbankan terlihat bahwa posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan masih terus mengalami peningkatan (grafik 4.2). Peningkatan posisi simpanan pemerintah daerah diperkirakan karena dua faktor. Pertama, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pemerintah daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan dari transfer dana perimbangan. Kedua, realisasi belanja masih belum optimal. Akibatnya terjadi surplus APBD. Hal yang sama terjadi pada realisasi APBD 2006 dimana pada saat perekonomian membutuhkan ekspansi pengeluaran pemerintah, APBD semua pemerintah daerah di Sumatera Barat justru surplus.

SISTEM PEMBAYARAN

Selama triwulan IV-2007, net-inflow yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Karakteristik kas Kantor Bank Indonesia Padang adalah net-inflow. Selama triwulan IV-2007, net-inflow yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Meningkatnya aktifitas perekonomian di bulan puasa dan hari raya keagamaan diduga merupakan penyebab tingginya aliran kas keluar Bank Indonesia. Aliran kas keluar dari Bank Indonesia Padang (*cash-outflow*) meningkat dari Rp351 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp689 miliar di triwulan IV-2007 atau meningkat 96,10%. Sedangkan aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (*cash-inflow*) meningkat dari Rp1.425 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp1.646 miliar di triwulan IV-2007 atau meningkat hampir 2 kali lipat (96,10%).

Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan sebesar Rp1.482 miliar, meningkat sekitar 79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp828 miliar.

Nisbah antara jumlah uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (*inflow*) pada triwulan IV-2007 adalah sebesar 90% atau jauh meningkat dibandingkan nisbah triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 58%. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa uang yang beredar di Sumatera Barat dan disetorkan oleh bank umum relatif terjaga kebersihan dan fisiknya.

Pada triwulan IV-2007, transaksi kliring mengalami kenaikan di sisi nominal, sementara volume mengalami penurunan.

Perputaran uang non-tunai melalui sarana kliring di Bank Indonesia Padang pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 7,20%, yaitu dari Rp2.609 miliar di triwulan III-2007 menjadi

Rp2.798 miliar di triwulan laporan. Peningkatan transaksi nominal kliring tidak diiringi dengan peningkatan volume kliring. Volume kliring di triwulan IV-2007 menurun dari 96,8 ribu lembar di triwulan III-2007 menjadi 85,1 ribu lembar pada triwulan laporan atau turun 12,1%.

Transaksi BI RTGS masuk ke wilayah Sumbar meningkat

Sedikit berbeda dengan transaksi kliring, perkembangan transaksi non-tunai dengan menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang selama triwulan IV-2007 menunjukkan peningkatan transaksi masuk. Untuk transfer masuk ke Sumatera Barat melalui BI-RTGS, nilai transaksi meningkat sebesar 47,45% yaitu dari Rp9.155 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp13.499 miliar pada triwulan laporan. Di sisi lain, untuk transfer RTGS keluar dari Sumatera Barat nilai transaksi mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Nilai transaksi menurun sebesar 12,34%, yaitu dari Rp9.626 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp8.438 miliar di triwulan laporan.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Barat bergerak membaik

Hasil Susenas bulan Agustus 2007 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat bergerak ke arah perubahan yang lebih baik dibandingkan kondisi awal tahun 2007. Beberapa indikator ketenagakerjaan mengalami perbaikan yang cukup berarti. Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Provinsi Sumatera Barat pada Susenas Agustus 2007 menunjukkan sedikit peningkatan, baik dibandingkan Februari 2007 maupun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingkat kesejahteraan penduduk meningkat

Tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 tercatat lebih baik dari tahun 2006. Berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp14,24 juta* lebih tinggi dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp11,98 juta**. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp7,51 juta* juga lebih tinggi dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp6,99 juta**. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya adanya kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2007, adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil di tahun 2007 dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang relatif lebih baik dari tahun 2006.

PROSPEK PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2008 diperkirakan sedikit lebih melambat dari triwulan IV-2007.

Pertumbuhan ekonomi Sumbar Triwulan I-2008 diperkirakan akan sedikit melambat dibandingkan triwulan IV-2007 dengan laju pertumbuhan pada kisaran 6,0%-7,0%. Data time series menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulanan (q-t-q) pada triwulan pertama sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan keempat. Dari sisi konsumsi, akan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Tren inflasi yang meningkat pada awal tahun namun belum diikuti dengan penyesuaian gaji yang biasanya baru dilakukan pada triwulan II juga merupakan faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi.

Perlambatan konsumsi akan diimbangi dengan peningkatan ekspor khususnya komoditas perkebunan. Tren kenaikan harga minyak dunia membawa pengaruh baik bagi ekspor Sumatera Barat serta nilai tambah sektor pertanian. Kenaikan harga minyak dunia mendorong permintaan bioenergy sebagai barang substitusi. Akibatnya, harga komoditas bioenergy seperti *palm oil* dan *palm kernel oil* terus mengalami peningkatan.

Menurunnya realisasi belanja modal pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga akan menjadi faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2007. Pengalaman menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah selalu kecil pada triwulan pertama. Belum

* PDRB/Kapita Tw.IV-2007 angka perkiraan

** PDRB/Kapita 2006 angka sementara

disetujuinya Perda APBD oleh Departemen Dalam Negeri atau belum diserahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja modal pada bulan-bulan pertama di awal tahun. Selain itu, belum tuntasnya proses reorganisasi pemerintah daerah dan rencana Menteri Keuangan untuk memotong anggaran departemen sebesar 15% juga akan menghambat realisasi belanja pemerintah.

Inflasi pada triwulan I-2008 diperkirakan akan meningkat

Inflasi pada triwulan I-2008 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya berkisar antara 3,5-4,5%. Tekanan inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Tren kenaikan harga energi dan harga pangan dunia akan berpengaruh pada inflasi kota Padang. Indeks harga beberapa komoditas di negara berpendapatan rendah dan menengah yang dirilis World Bank menunjukkan tren yang terus meningkat, terutama untuk komoditas energi, pupuk, pertanian, dan makanan.

Tren kenaikan harga beras internasional (grafik 7.8) juga berpotensi meningkatkan inflasi kota Padang pada triwulan I-2008. Meskipun produksi padi Sumatera Barat meningkat cukup tinggi pada tahun 2007, namun hasil panen padi Sumbar juga mengalir ke daerah-daerah sekitar seperti Riau, Jambi, dan Batam. Kelangkaan pupuk yang gencar diberitakan media massa yang terjadi pada beberapa sentra produksi pertanian seperti Pesisir Selatan, Agam, dan Solok dapat mengurangi produktivitas panen padi pada bulan Maret-April 2008.

Tabel Indikator Ekonomi Terpilih Sumatera Barat

INDIKATOR	TAHUN 2006	TAHUN			Keterangan
		Tw. II-2007	Tw. III-2007	Tw. IV-2007	
MAKRO					
IHK Kota Padang	149,93	152,40	155,54	160,28	
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y %)	8,05	7,79	9,00	6,90	
PDRB - harga konstan (miliar Rp)	30.949,95	8.123,89	8.335,94	8.456,29	
- Pertanian	7.658,39	1.974,87	2.040,55	2.085,08	
- Pertambangan dan Penggalan	980,83	250,61	255,18	258,88	
- Industri Pengolahan	3.978,64	1.032,87	1.067,80	1.082,88	
- Listrik, Gas, dan Air Bersih	368,98	97,57	100,84	101,46	
- Bangunan	1.544,89	405,32	406,38	415,81	
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.662,88	1.505,92	1.536,07	1.538,93	
- Pengangkutan dan Komunikasi	4.140,57	1.118,33	1.150,87	1.180,24	
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	1.579,35	418,28	428,23	434,84	
- Jasa	5.035,41	1.320,13	1.350,02	1.358,18	
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	6,14	6,01	6,66	6,94	
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)**	1.032,54	306,45	233,98	256,57	Tw.IV-07 s.d. November 2007
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)**	3.296,15	490,59	321,71	474,84	Tw.IV-07 s.d. November 2007
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)**	36,91	4,29	6,83	17,52	Tw.IV-07 s.d. November 2007
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)**	253,33	33,10	23,98	76,53	Tw.IV-07 s.d. November 2007
PERBANKAN***					
Bank Umum					
Total Aset (Rp triliun)	16,43	17,03	18,69	19,49	
DPK (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi bank penghimpun	10,75	11,82	12,39	13,50	
- Tabungan (Rp Triliun)	2,78	3,69	3,96	4,38	
- Giro (Rp Triliun)	4,76	4,66	4,91	5,37	
- Deposito (Rp Triliun)	3,21	3,47	3,52	3,76	
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek***	9,25	10,59	11,40	12,08	
- Modal Kerja	4,04	4,45	4,79	4,96	
- Investasi	1,63	1,90	2,04	2,46	
- Konsumsi	3,58	4,23	4,58	4,66	
- LDR (%)	86,08	89,56	92,03	89,49	
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	8,93	10,04	10,47	10,88	
- Modal Kerja	3,92	4,30	4,38	4,58	
- Konsumsi	3,29	3,96	4,28	1,97	
- Investasi	1,73	1,78	1,81	4,34	
- LDR (%)	83,12	84,88	84,49	80,62	
NPL (gross, %)	3,43	3,67	3,01	2,89	
Kredit UMKM (Triliun Rp)					
Modal Kerja	2,59	2,97	3,02	3,21	
Mikro (sd Rp 50 juta)	0,54	0,61	0,60	0,65	
Kecil (> Rp 50 juta - Rp 500 juta)	1,08	1,21	1,28	1,34	
Menengah (> Rp 500 juta - Rp 5 miliar)	0,97	1,15	1,15	1,22	
Investasi	0,72	0,79	0,78	0,78	
Mikro (sd Rp 50 juta)	0,33	0,31	0,26	0,24	
Kecil (> Rp 50 juta - Rp 500 juta)	0,20	0,22	0,27	0,29	
Menengah (> Rp 500 juta - Rp 5 miliar)	0,19	0,25	0,25	0,24	
Konsumsi	3,57	4,22	4,56	4,65	
Mikro (sd Rp 50 juta)	2,81	3,17	3,41	3,40	
Kecil (> Rp 50 juta - Rp 500 juta)	0,67	0,92	0,98	1,06	
Menengah (> Rp 500 juta - Rp 5 miliar)	0,09	0,13	0,17	0,18	
BPR***					
Total Aset (Rp triliun)	0,56	0,64	0,67	0,74	
DPK (Rp Triliun)	0,35	0,40	0,42	0,47	
- Tabungan (Rp Triliun)	0,20	0,22	0,23	0,26	
- Deposito (Rp Triliun)	0,15	0,18	0,19	0,21	
Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	0,39	0,48	0,51	0,54	
- Modal Kerja	0,26	0,31	0,33	0,36	
- Investasi	0,04	0,06	0,06	0,06	
- Konsumsi	0,09	0,11	0,12	0,12	
Kredit UMKM (triliun Rp)	0,39	0,48	0,51	0,54	
Rasio NPL Gross (%)	8,76	7,68	7,41	7,16	
LDR (%)	112,21	119,92	121,19	115,37	

Keterangan

* Angka PDRB Tw.IV-2007 merupakan proyeksi Bank Indonesia

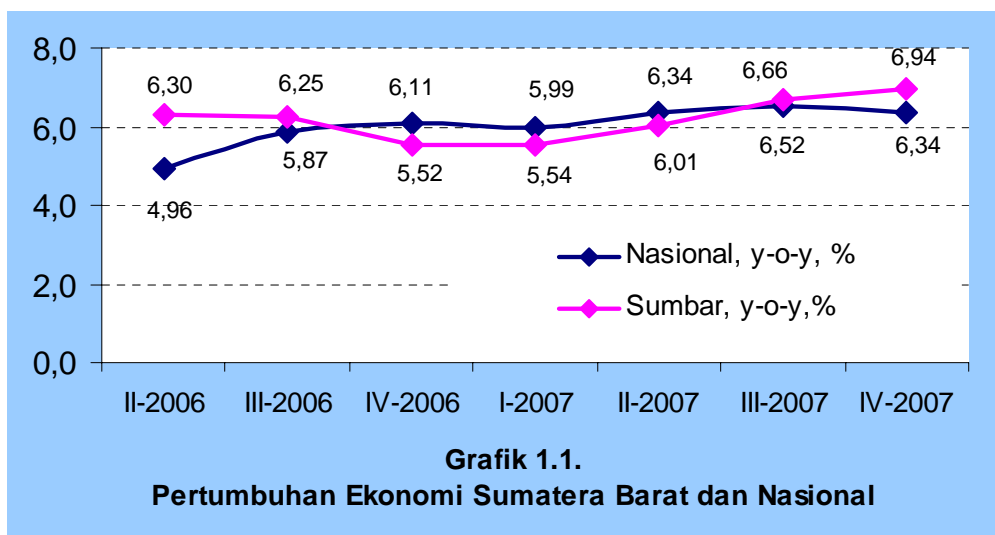
** Angka impor dan ekspor Tw. IV-2007 angka sementara, open file

*** Sampai dengan Posisi November 2007

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO SUMATERA BARAT

Trend pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terus berlanjut hingga triwulan IV-2007. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh 6,94%, lebih tinggi daripada triwulan III-2007 sebesar 6,66% maupun triwulan IV-2006 sebesar 5,52% (grafik 1.1). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan konsumsi dan ekspor. Faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi antara lain daya beli masyarakat yang membaik, ekspektasi positif konsumen terhadap perekonomian, tersedianya dukungan pembiayaan, serta faktor musiman. Sementara itu, masih tingginya harga komoditas perkebunan seperti CPO dan karet serta meningkatnya produktivitas kedua komoditas tersebut selama tahun 2007 meningkatkan share ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar. Di sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua sektor. Sektor primer dan sekunder tumbuh melewati angka 7%, sementara sektor tersier tumbuh 6,72%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada triwulan III-2007 dan IV-2007 membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan pada tahun 2007 mencapai 6,29%.



1.1. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pada triwulan IV-2007 perekonomian Sumatera Barat tumbuh 6,94%, terutama didukung pertumbuhan konsumsi dan ekspor. Faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi antara lain daya beli masyarakat yang membaik, ekspektasi positif konsumen terhadap perekonomian, tersedianya dukungan pembiayaan, serta faktor musiman. Meningkatnya ekspor Sumatera Barat masih dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas perkebunan dunia seperti CPO dan karet akibat *shifting* permintaan dari energi fosil menjadi energi hijau. Investasi mulai sedikit bergerak meskipun ancaman tsunami masih membayangi daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Peningkatan realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah serta membaiknya ekspektasi dunia usaha merupakan faktor-faktor yang mendorong peningkatan investasi.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (y-o-y)

Jenis Penggunaan	IV-2006	I-2007	II-2007	III-2007	IV-2007
Konsumsi	2,51	3,42	4,04	4,47	4,88
- Rumah Tangga	2,38	3,28	3,94	4,41	4,80
- Lemb Swasta Nirlaba	0,44	1,76	3,34	4,34	5,74
- Pemerintah	3,30	4,21	4,55	4,74	5,18
Investasi	2,80	3,78	4,06	3,78	4,05
Net Ekspor	30,74	19,53	24,13	22,80	23,09
Ekspor	18,64	14,51	18,12	16,90	17,14
Impor	0,78	5,62	7,61	6,07	5,75

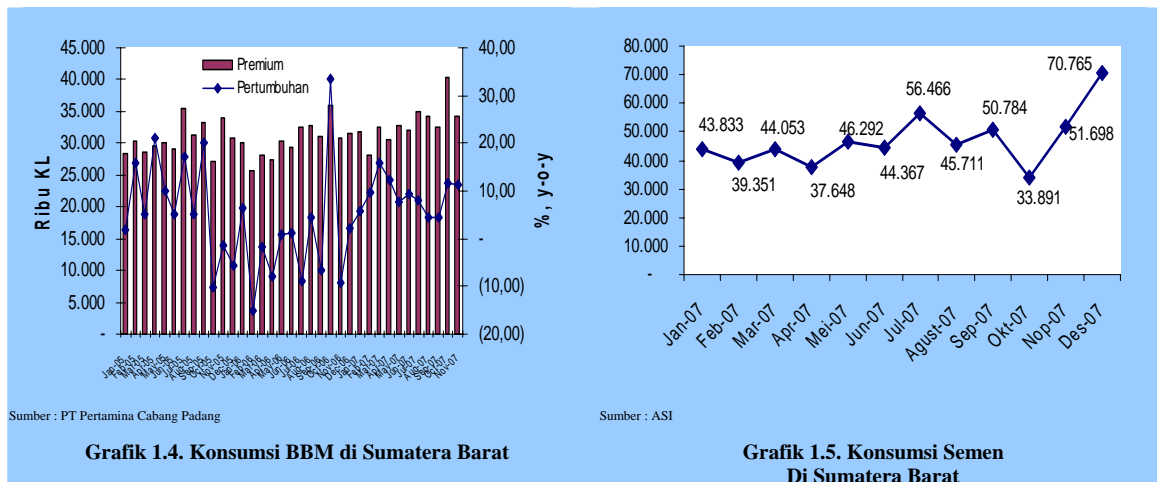
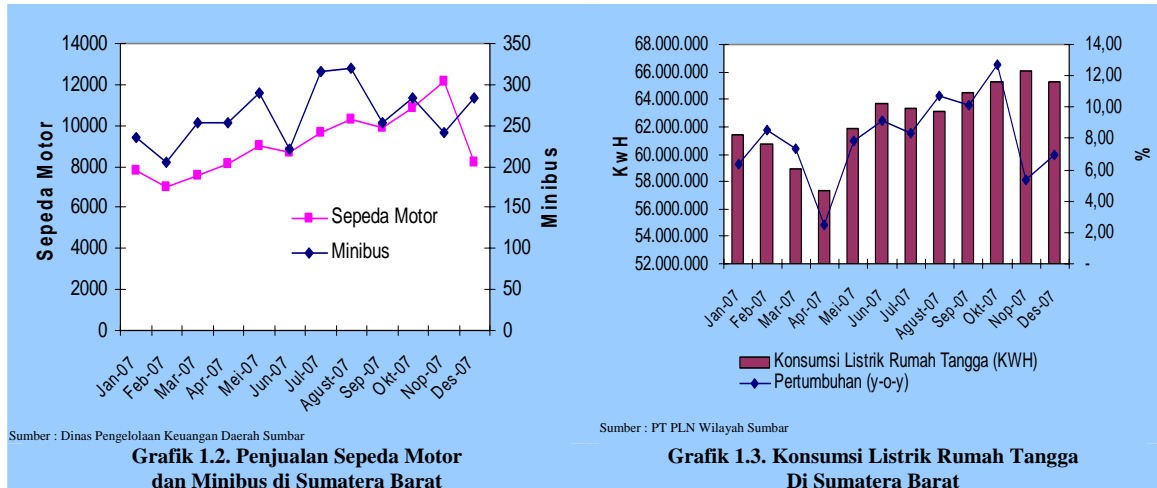
Sumber Data : BPS

1.1.1. Konsumsi

Pada triwulan IV-2007, konsumsi tumbuh relatif lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Angka pertumbuhan konsumsi triwulan laporan melesat dua kali lipat dibandingkan angka pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terjadi pada konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, serta konsumsi pemerintah (tabel 1.1).

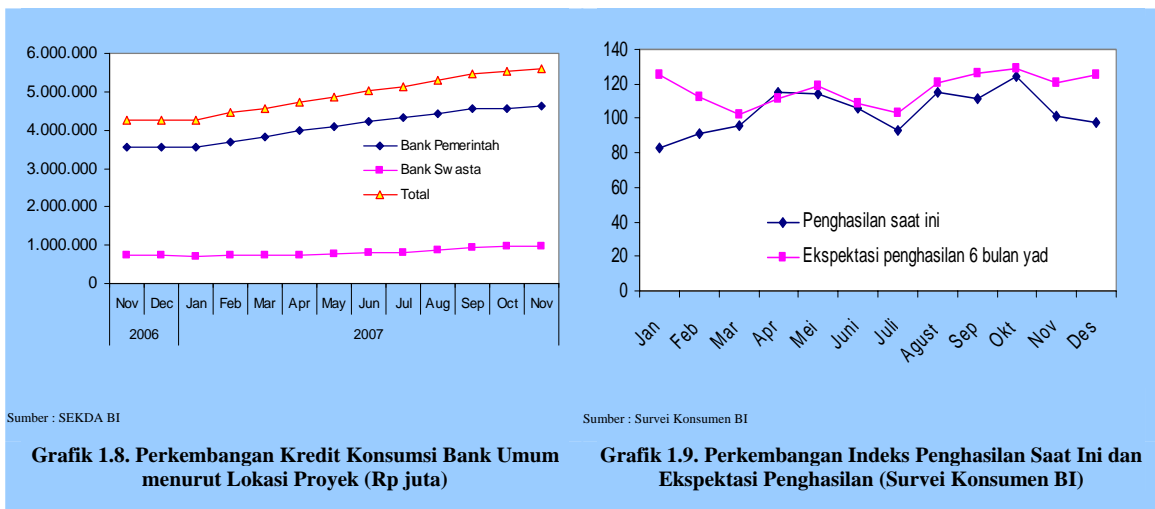
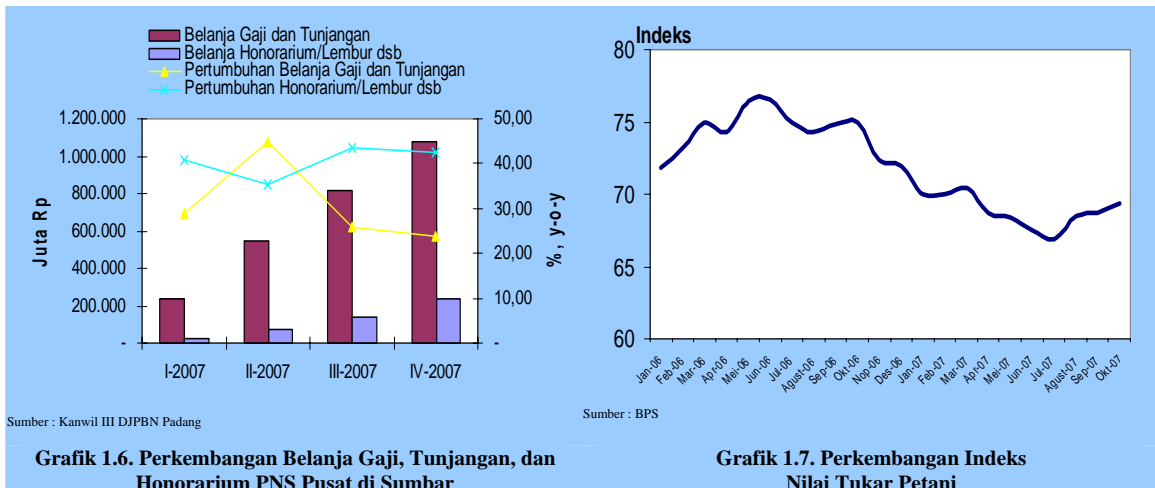
Pertumbuhan konsumsi non makanan tumbuh lebih tinggi daripada konsumsi makanan. Pada triwulan IV-2007 konsumsi non makanan tumbuh 5,47% sementara konsumsi makanan meningkat 4,43%. Peningkatan konsumsi non-makanan yang lebih tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain semakin gencarnya bank dan lembaga pembiayaan lain dalam menawarkan kredit konsumsi, meningkatnya daya beli masyarakat, serta faktor musiman hari raya keagamaan. Peningkatan konsumsi barang non makanan, terutama barang tahan lama, tercermin pada peningkatan penjualan barang-barang tersebut. Prompt

indikator peningkatan konsumsi antara lain peningkatan penjualan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (grafik 1.2), peningkatan konsumsi listrik rumah tangga (grafik 1.3), peningkatan konsumsi BBM jenis premium (grafik 1.4), dan peningkatan konsumsi semen (grafik 1.5).



Peningkatan konsumsi yang terjadi pada triwulan IV-2007 diperkirakan terjadi karena peningkatan daya beli masyarakat serta faktor musiman. Peningkatan daya beli konsumen terjadi diperkirakan karena faktor peningkatan pendapatan yang dikonfirmasi dengan peningkatan beberapa prompt indikator pendapatan konsumen seperti pertumbuhan belanja gaji dan tunjangan PNS pusat di Sumbar (Grafik 1.6) serta peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (Grafik 1.7). Hasil survei konsumen Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan juga menunjukkan bahwa pada bulan Oktober, penghasilan konsumen meningkat cukup tinggi dibandingkan enam bulan sebelumnya, meskipun kembali menurun pada bulan November dan Desember (grafik 1.9). Fasilitas kredit konsumsi yang

disediakan perbankan juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan daya beli masyarakat. Ekspansi kredit konsumtif yang disalurkan bank pemerintah sejak bulan April 2007 merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi masyarakat dalam melakukan konsumsi (grafik 1.8).



1.1.2. Investasi

Pada triwulan IV-2007, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang merupakan salah satu indikator investasi pada PDRB, mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 4,05% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,78% (y-o-y). Faktor yang mempengaruhi peningkatan investasi antara lain membaiknya ekspektasi dunia usaha terhadap prospek perekonomian. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi telah mendorong

sebagian dari dunia usaha untuk menambah kapasitas produksinya, meskipun belum signifikan dalam mendorong perekonomian secara keseluruhan.

Tabel 1.2.
Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Fasilitas Investasi BKPM

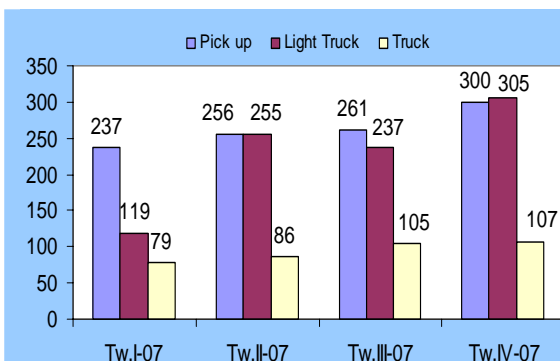
Persetujuan Rencana Investasi									
Jenis Fasilitas	I-07		II-07		III-07		IV-07		
	P	I	P	I	P	I	P	I	
PMDN	4,00	1.440,90	2,00	493,70	-	-	-	-	-
PMA	3,00	2,00	7,00	20,70	1,00	0,50	6,00	100,30	
Realisasi Investasi									
Jenis Fasilitas	I-07		II-07		III-07		IV-07		
	P	I	P	I	P	I	P	I	
PMDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMA	-	-	3,00	56,40	-	-	2,00	2,30	

Sumber : www.bkpm.go.id

Ket : P = Jumlah Proyek

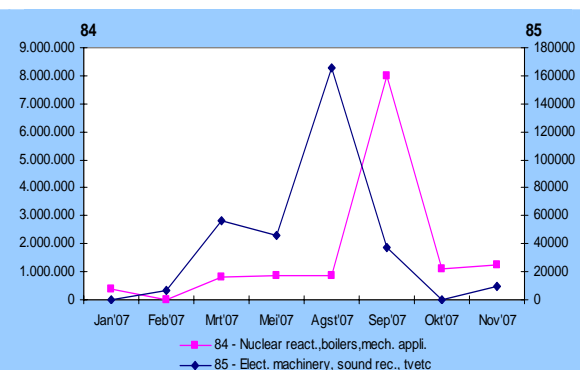
I = Nilai Investasi (Juta US\$)

Meningkatnya keyakinan dunia usaha untuk melakukan investasi terlihat dari beberapa data prompt indikator investasi, hasil survei, serta porsi penyaluran kredit yang terus meningkat. Selama triwulan IV-2007, terdapat 6 proyek fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) senilai USD 100,30 juta telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk wilayah Sumatera Barat. Selain itu, terdapat dua proyek fasilitas PMA senilai USD 2,30 juta telah direalisasikan pada triwulan laporan. Selain itu, beberapa prompt indikator juga menunjukkan perbaikan, seperti meningkatnya penjualan kendaraan niaga (grafik 1.10), kenaikan importasi mesin-mesin (grafik 1.11), belanja modal pemerintah yang ekspansif (grafik 1.12), serta tumbuhnya kredit investasi yang disalurkan bank umum swasta (grafik 1.13).



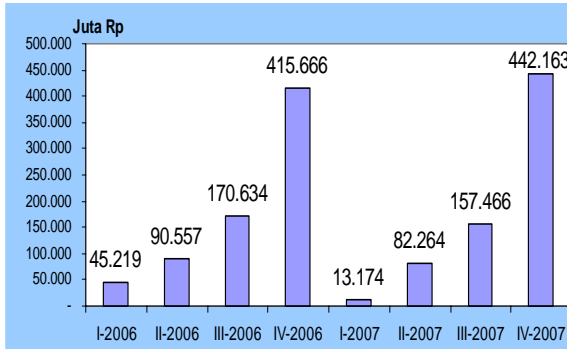
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Sumbar

Grafik 1.10. Penjualan Kendaraan Niaga (unit)



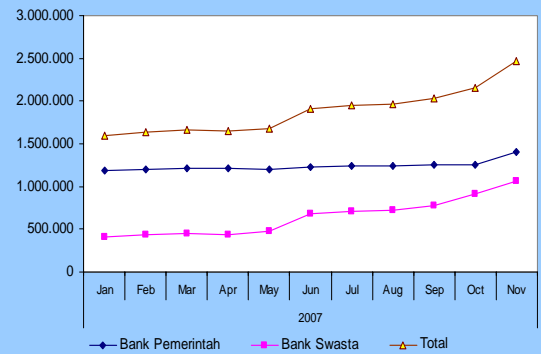
Sumber : PPDIE-BI

Grafik 1.11. Perkembangan Nilai Impor Mesin Pos Tarif HS 84 dan 85 (USD)



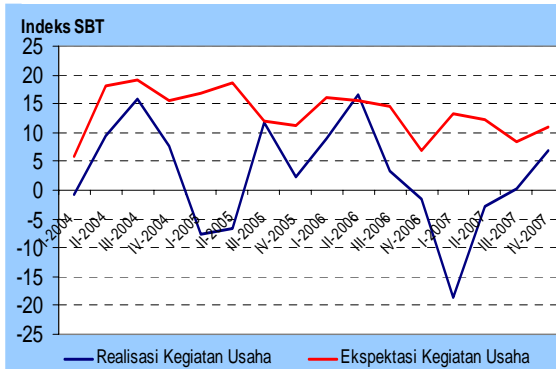
Sumber : Kanwil III DJPBN Padang

Grafik 1.12. Belanja Modal Pemerintah Pusat di Sumbar



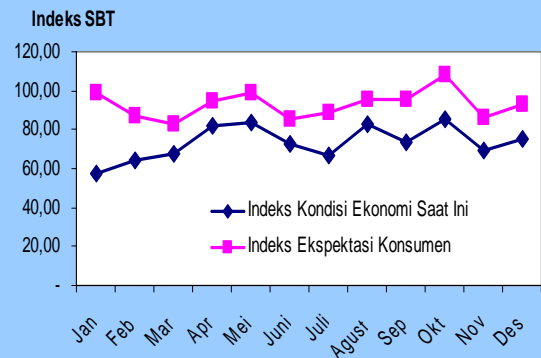
Sumber : SEKDA BI

Grafik 1.13. Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Rp Juta)



Sumber : SKDU BI

Grafik 1.14. Realisasi dan Ekspektasi Kegiatan Usaha berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)



Sumber : SEKDA BI

Grafik 1.15. Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Ekspektasi Konsumen berdasarkan Survei Konsumen (SK)

Perbankan mulai meningkatkan penyaluran kredit investasi. Posisi kredit investasi yang disalurkan bank umum berdasarkan lokasi proyek pada akhir November 2007 tercatat sebesar Rp 2,46 triliun, tumbuh 21,03% dibandingkan posisi September 2007. Akselerasi penyaluran kredit investasi terutama dilakukan oleh bank swasta yang meningkat hingga mencapai 35,14% menjadi Rp 1,05 triliun. Bank pemerintah masih mendominasi penyaluran kredit investasi dengan nilai kredit investasi pada akhir November 2007 sebesar Rp 1,4 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit investasi oleh perbankan mengindikasikan kalangan perbankan berekspektasi positif terhadap perekonomian Sumatera Barat dalam jangka panjang. Hal ini searah dengan arah ekspektasi dunia usaha berdasarkan survei kegiatan dunia usaha (grafik 1.14). Angka indeks SBT yang terus berada di atas angka 0 (positif) menunjukkan bahwa kalangan dunia usaha optimis dalam melihat prospek perekonomian ke depan. Kondisi ekonomi yang terus meningkat juga

memberikan ekspektasi positif bagi konsumen. Ekspektasi yang meningkat dari sisi dunia usaha dan konsumen merupakan awal yang baik guna menggenjot investasi pada periode berikutnya.

1.1.3. Perdagangan Internasional

Secara umum, posisi perdagangan internasional provinsi Sumatera Barat hingga akhir bulan November 2007 masih menunjukkan net ekspor yang positif. Nilai ekspor Sumatera Barat terus menunjukkan tren yang meningkat meskipun dari sisi volume relatif tidak berubah. Sementara itu, nilai impor Sumatera Barat berfluktuatif mengikuti komoditas utama yang diimpor yaitu pupuk untuk perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1.3.
Nilai Ekspor 10 komoditas utama Sumbar (USD)

No	Komoditas	Tw.I-07	Tw.II-07	Tw.III-07	Tw.IV-07*
1	15 - Animal or vege. fats and oils	121.898.118	177.238.408	154.753.848	160.512.012
2	40 - Rubber and articles thereof	73.604.091	103.823.478	62.076.135	51.658.819
3	08 - Edible fruits and nuts	2.681.854	2.310.476	2.563.333	19.666.724
4	09 - Coffee, tea, mate and spices	8.259.242	7.048.011	7.075.975	4.818.453
5	23 - Res. and waste from food industries	4.289.426	5.729.309	2.824.210	6.442.775
6	25 - Salt; sulphur, earths and stone	14.340.655	197.950	0	3.652.462
7	27 - Mineral fuels, mineral oil products	1.982.248	1.460.000	1.400.000	3.840.060
8	18 - Cocoa and cocoa preparations	2.031.238	2.400.381	1.997.755	1.827.946
9	33 - Essential oils and resinoids	2.118.454	1.593.103	1.292.555	2.686.122
10	32 - Tanning and dyeing extracts	1.264.221	1.686.756	2.019.368	1.046.683
	Total 10 komoditas	232.469.547	303.487.872	236.003.179	256.152.056
	Total Seluruh Komoditas	236.341.545	306.448.770	237.617.310	256.572.539

Sumber : BI

*) s.d. November 2007

Produk pertanian dan olahannya masih mendominasi ekspor Sumbar pada triwulan IV-2007. Sumbangan nilai ekspor produk lemak dan minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit mencapai lebih dari 60% dari total ekspor Sumbar. Pada triwulan IV-2007, nilai ekspor Lemak dan Minyak Nabati mencapai USD 160,51 juta, diikuti dengan karet dan barang dari karet senilai USD 51,66 juta, dan kelompok buah-buahan dan kacang-kacangan senilai USD 19,66 juta. Beberapa komoditi pertanian yang menjadi komoditas utama ekspor Sumbar antara lain kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah, serta kelompok kakao dan produk olahannya (tabel 1.3)

Tabel 1.4.
Nilai Impor 10 komoditas utama Sumbar (USD)

No	Komoditas	Tw I-2007	Tw II-2007	Tw III-2007	Tw IV-2007
1	31 - Fertilizers	3.682.900	390.000	21.465.499	4.046.098
2	84 - Nuclear react.,boilers,mech. appli.	1.208.105	878.328	8.872.735	2.376.501
3	10 - Cereals	3.771.120	-	4.024.170	3.878.579
4	48 - Paper and paperboard	2.079.249	351.846	2.596.531	3.064.829
5	25 - Salt; sulphur,earths and stone	1.383.453	1.428.300	2.315.694	1.139.835
6	69 - Ceramic products	-	-	1.419.520	2.252.211
7	17 - Sugars and sugars confectionery.	854.440	742.000	868.958	83.415
8	73 - Articles of iron and steel	397.018	184.938	485.441	447.721
9	40 - Rubber and articles thereof	876.426	142.630	26.428	153.902
10	39 - Plastics and articles thereof	306.880	34.131	761.715	55.784
Total 10 Komoditas		14.559.591	4.152.173	42.836.691	17.498.875
Total seluruh komoditas		14.823.336	4.288.318	43.391.616	17.517.249

Sumber : PPDIE-BI

*) s.d. November 2007

Di sisi impor, komoditas utama yang paling banyak diimpor pada triwulan IV-2007 relatif sama dengan periode sebelumnya. Pupuk yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, mesin-mesin untuk pengolahan kelapa sawit dan industri semen masih mendominasi impor Sumatera Barat baik melalui Pelabuhan Teluk Bayur maupun Bandara Internasional Minangkabau. Nilai pupuk yang diimpor pada bulan Oktober-November 2007 tercatat sebesar USD 4,05 juta, diikuti gandum senilai USD 3,8 juta, kertas untuk bahan baku pengemas semen senilai USD 3,01 juta, dan mesin senilai USD 2,3 juta (tabel 1.4)

1.2. Sisi Penawaran

Perkembangan positif pada sisi permintaan, terutama konsumsi dan ekspor direspon oleh beberapa sektor ekonomi utama yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Peningkatan terhadap respon permintaan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan kapasitas terpasang serta sebagian kecil mulai menambah investasi. Secara umum, perekonomian Sumbar tumbuh cukup tinggi, namun belum berkualitas karena pertumbuhan belum optimal terjadi pada sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan.

Beberapa sektor ekonomi mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding periode-periode sebelumnya. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami percepatan antara lain sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta pertanian (tabel 1.4). Sektor industri

pengolahan yang tumbuh 7,81% pada triwulan laporan diperkirakan terjadi pada produk olahan sektor pertanian seperti produk olahan kelapa sawit dan karet. Hal ini seiring dengan percepatan pertumbuhan sektor pertanian yang pada triwulan laporan tumbuh 7,54%. Sektor transportasi dan komunikasi masih menjadi sektor yang tumbuh paling tinggi pada triwulan IV-2007. Masih tingginya permintaan masyarakat terutama komunikasi seluler serta peningkatan kapasitas melalui penambahan BTS membuat sektor ini tumbuh 9,96%.

Tabel 1.5. Pertumbuhan PDRB Sektoral (y-o-y, %)

Sektor	I-2006	II-2006	III-2006	IV-2006	I-2007	II-2007	III-2007	IV-2007
PERTANIAN	6,18	5,83	5,03	3,09	3,29	3,60	5,77	7,54
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	4,94	3,75	2,56	1,02	1,18	2,46	3,57	5,13
INDUSTRI PENGOLAHAN	7,07	6,11	3,47	1,49	2,56	4,68	6,97	7,81
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	13,76	10,09	7,77	4,71	4,77	6,59	8,27	7,89
BANGUNAN	8,05	7,20	6,76	7,07	6,08	6,17	4,12	4,99
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,17	5,74	7,38	8,57	7,91	7,76	6,98	5,26
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	11,22	10,07	10,13	9,73	9,08	9,62	10,08	9,96
PERUSAHAAN	6,70	7,70	8,59	8,45	7,86	6,95	6,74	7,14
JASA-JASA	3,85	4,37	5,79	5,37	5,86	6,12	5,84	5,55
P D R B	6,52	6,30	6,25	5,52	5,53	6,00	6,66	6,94

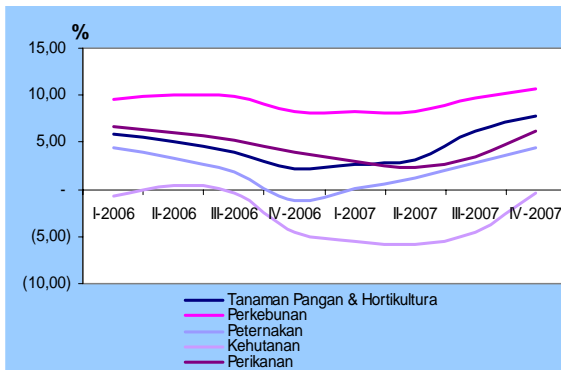
Sumber : BPS

1.2.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan IV-2007 mengalami pertumbuhan sebesar 7,54% (y-o-y), meningkat tajam lebih dari dua kali lipat daripada triwulan IV-2006. Akselerasi peningkatan nilai tambah produksi sektor pertanian ini terjadi karena semua subsektor mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Selain subsektor perkebunan yang memang menjadi andalan sektor pertanian Provinsi Sumbar, subsektor tanaman pangan, subsektor perikanan, dan subsektor peternakan mengalami pertumbuhan cukup tinggi (grafik 1.16). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian ini antara lain peningkatan luas panen, peningkatan produksi, serta mulai meningkatnya penyaluran pembiayaan bagi sektor pertanian dari berbagai sumber.

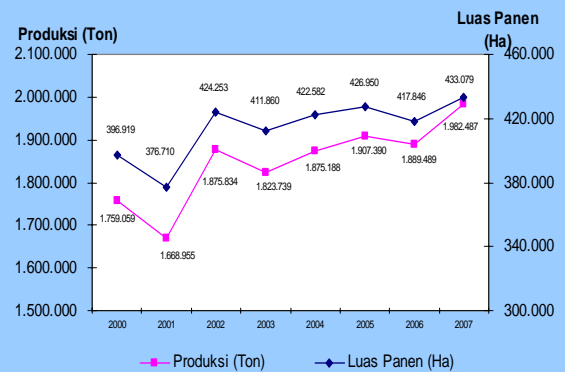
Berbagai prompt indikator menunjukkan perbaikan di sektor pertanian. Produksi dan luas panen padi terus mengalami peningkatan (grafik 1.17) dan menjadikan Sumatera Barat menjadi daerah surplus beras. Bahkan untuk menyikapi kelangkaan beras di berbagai daerah, Sumatera Barat bersama dengan 11 propinsi surplus beras yang lain harus melakukan sharing produk berasnya dengan daerah minus (Harian Padeks, 14 Januari 2008). Volume ekspor produk

pertanian serta produk manufaktur berbahan baku komoditi pertanian juga mengalami pertumbuhan (grafik 1.18).



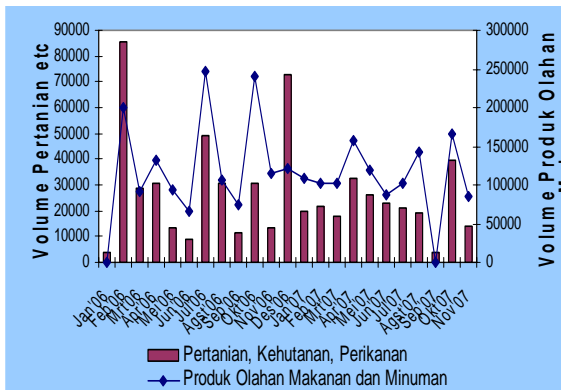
Sumber : BPS

Grafik 1.16. Pertumbuhan Nilai Tambah Sektor Pertanian



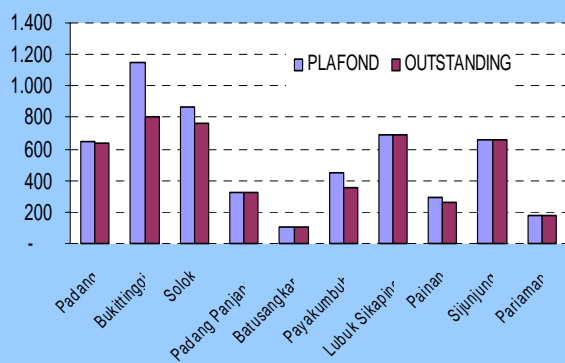
Sumber : www.deptan.go.id

Grafik 1.17. Produksi dan Luas Panen Padi



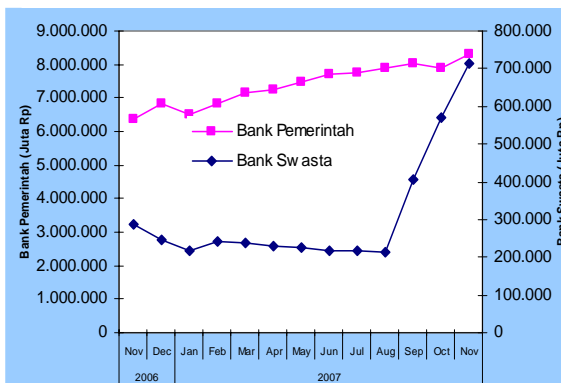
Sumber : PPDIE-BI

Grafik 1.18. Volume Ekspor Hasil Pertanian



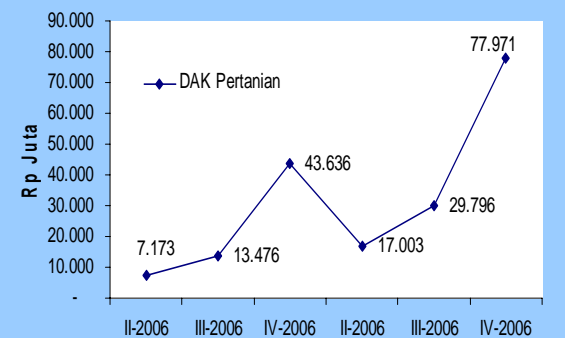
Sumber : BRI

Grafik 1.19. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Rp Juta)



Sumber : SEKDA-BI

Grafik 1.20. Kredit Sektor Pertanian Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek



Sumber : Kanwil III DIPBN Padang

Grafik 1.21. Dana Alokasi Khusus untuk Pertanian

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lepas dari peran pemerintah.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui sosialisasi sistem padi tanam sabatang (PTS) dan menyediakan anggaran Rp 1,5 miliar. Hasil panen padi dengan menggunakan sistem PTS tercatat 30% lebih baik daripada sistem tanam padi konvensional. Selain itu, biaya tanam sistem PTS lebih efisien karena bisa menghemat pemakaian pupuk. Konsumsi pupuk dengan sistem PTS hanya 17,5% dari konsumsi pupuk dengan sistem konvensional (Suara Pembaruan, 3 Agustus 2007). Pemerintah pusat juga tidak ketinggalan dalam upaya peningkatan sektor pertanian. Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pertanian yang disalurkan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan pada triwulan IV-2007 hingga mencapai Rp 77,97 milyar.

Ekspektasi perbankan terhadap produksi pertanian Sumbar meningkat.

Kredit sektor pertanian yang disalurkan bank, terutama bank swasta, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi (grafik 1.20). Ekspansi kredit sektor pertanian oleh bank swasta menunjukkan bahwa kegiatan usaha di sektor pertanian dipersepsikan positif di masa mendatang oleh kalangan perbankan.

Pola Penjaminan Kredit UMKM oleh pemerintah mulai berjalan. Beberapa sentra produksi pertanian seperti Bukittinggi/Agam, Solok, Pasaman/Lubuksikaping, serta Sawahlunto/Sijunjung memperoleh alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Grafik 1.19). Penyaluran KUR yang terus akan ditingkatkan pada tahun 2008 diharapkan akan semakin meningkatkan peran perbankan terhadap sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di Sumatera Barat.

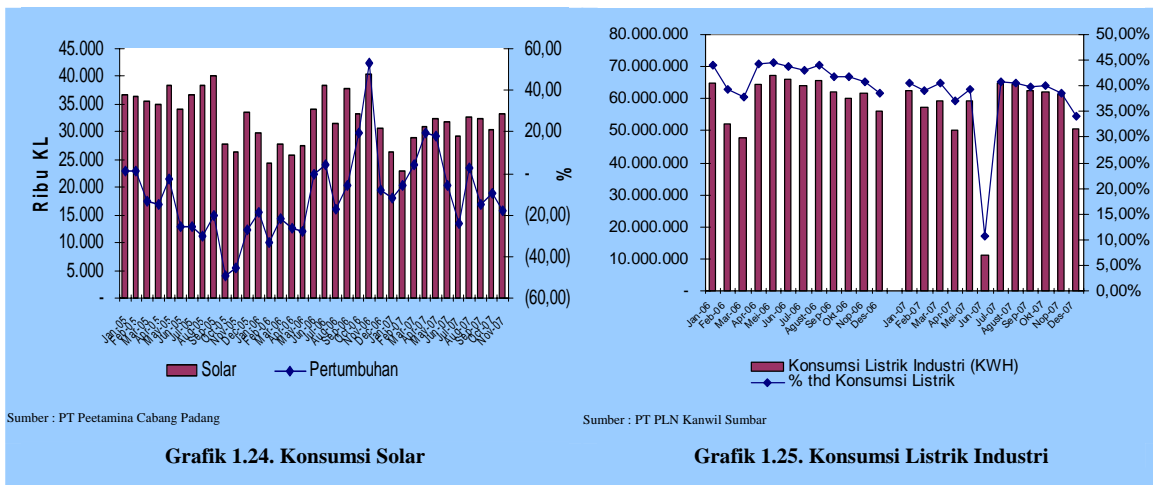
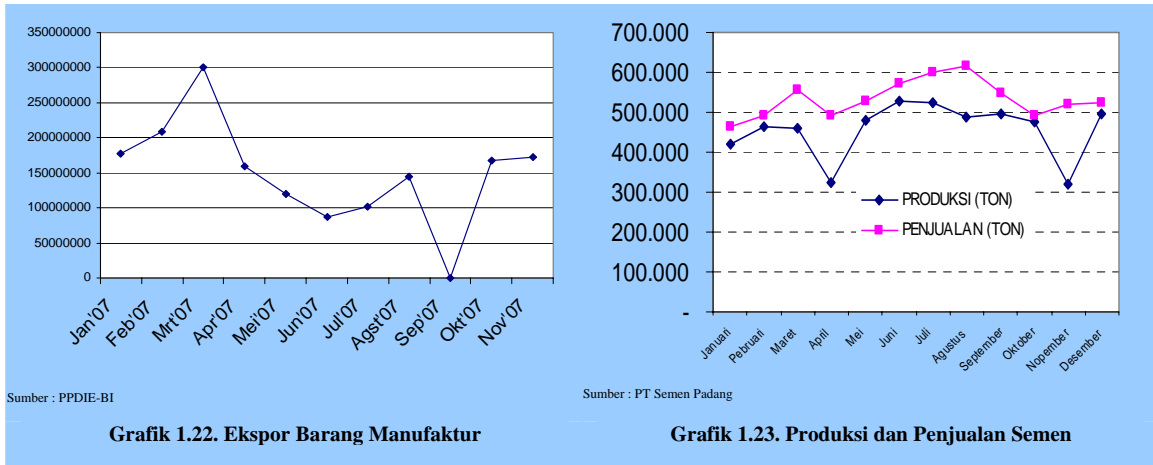
1.2.2 Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan Sumatera Barat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2007 sebesar 7,81% (y-o-y).

Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama setahun terakhir. Industri semen dan barang non logam mencatat pertumbuhan terbesar selama triwulan laporan sebesar 9,51%. Industri lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah industri makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 8,93% dan industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yang tumbuh sebesar 7,75%.

Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan tercermin dari pertumbuhan beberapa prompt indikator seperti ekspor barang manufaktur serta produksi semen oleh PT Semen Padang. Ekspor produk

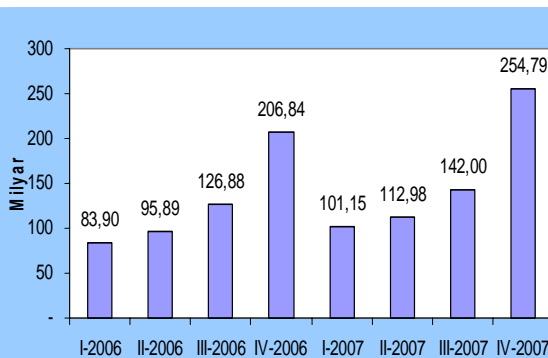
manufaktur seperti produk olahan kelapa sawit dan karet yang sempat melambat pada triwulan I-2007 kembali meningkat hingga akhir November 2007 (grafik 1.22). Produksi semen pun kembali meningkat setelah sempat menurun karena kerusakan pada salah satu lini produksi pada bulan November 2007 (grafik 1.23).



Tren kenaikan harga minyak dunia diperkirakan membuat pelaku industri pengolahan di Sumatera Barat mengalihkan konsumsi energinya ke sumber energi yang lebih murah. Data konsumsi energi seperti listrik dan BBM hingga Desember 2007 menunjukkan konsumsi kedua jenis sumber energi ini terus mengalami penurunan. Konsumsi solar selama tahun 2007 terlihat relatif menurun dibandingkan tahun 2005 dan 2006 (grafik 1.24). Konsumsi listrik juga menunjukkan tren yang sama (Grafik 1.25). Perkiraan ini dikonfirmasi dengan kenaikan nilai tambah sektor pertambangan yang tumbuh cukup tinggi pada tahun 2007.

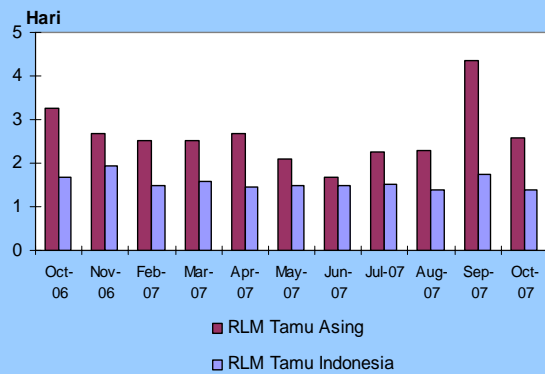
1.2.3 Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada triwulan IV-2007 tumbuh sebesar 5,26% (y-o-y), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,98%. Pertumbuhan yang sedikit melambat terlihat dari beberapa prompt indikator antara lain rata-rata lama menginap hotel berbintang (grafik 1.27), tingkat penghunian kamar hotel berbintang (grafik 1.29), serta kredit sektor perdagangan yang disalurkan bank. Perlambatan pertumbuhan ini diperkirakan terjadi karena faktor musiman dimana tingkat penjualan yang tinggi telah terjadi pada triwulan III-2007, terutama mendekati hari raya Idul Fitri.



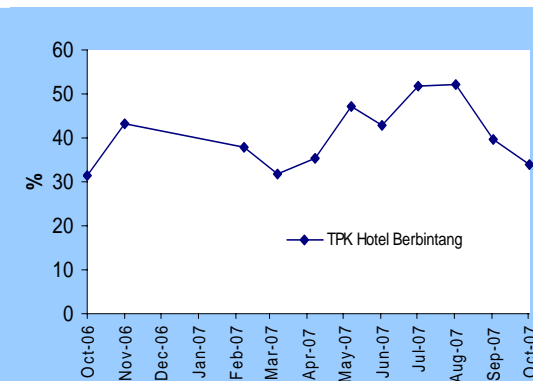
Sumber : Kanwil III DJPBN Padang

Grafik 1.26. Penerimaan Pajak Pendapatan Nilai (PPN)



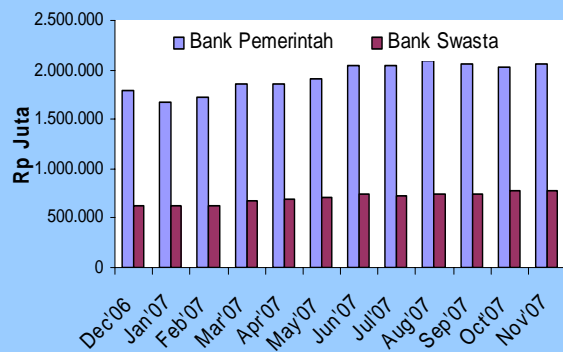
Sumber : BPS

Grafik 1.27. Rata-Rata Lama Menginap Hotel Berbintang



Sumber : BPS

Grafik 1.28. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang



Sumber : SEKDA-BI

Grafik 1.29. Kredit Bank Umum Sektor Perdagangan Berdasarkan Lokasi Proyek

Yang cukup menarik adalah pada saat terjadi pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami perlambatan, penerimaan pemerintah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru meningkat tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa penyumbang PPN bukan berasal dari sektor

perdagangan, namun berasal dari sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, bangunan, maupun jasa-jasa. Penerimaan PPN selama triwulan IV-2007 tercatat sebesar Rp 254,79 milyar atau meningkat 23,18% dibandingkan triwulan IV-2006.

1.2.4 Sektor Pengangkutan & Komunikasi

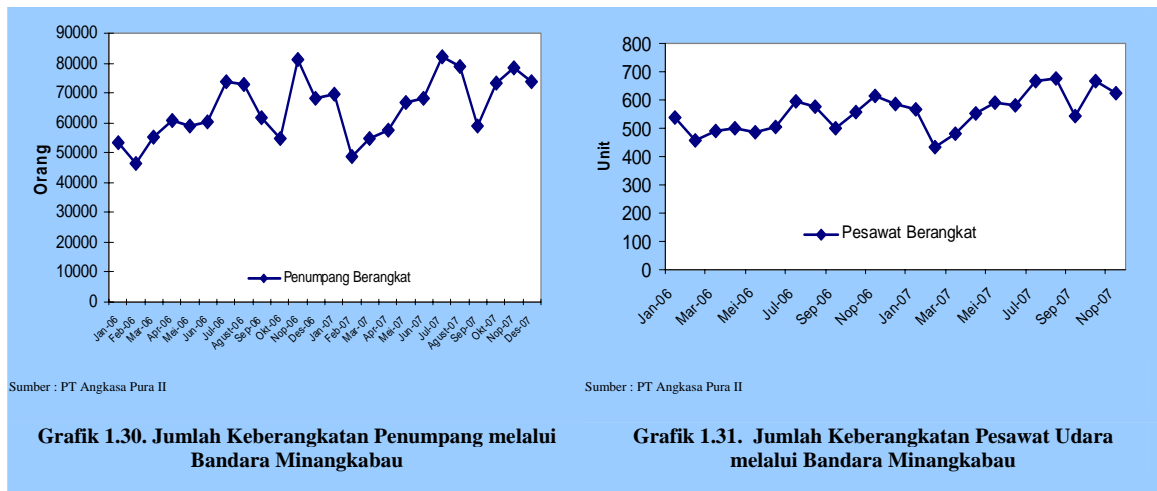
Pada triwulan IV tahun 2007, sektor pengangkutan & komunikasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,96% (y-o-y). Pertumbuhan tersebut sedikit dibawah triwulan sebelumnya sebesar 10,08% (y-o-y). Dilihat dari subsektornya, pertumbuhan pada triwulan laporan terutama disumbangkan subsektor komunikasi yang tumbuh sebesar 17,93% (y-o-y) sedangkan subsektor angkutan hanya meningkat sebesar 7,59%. Pertumbuhan tertinggi (y-o-y) pada subsektor angkutan terjadi pada angkutan udara sebesar 9,07% dan angkutan jalan raya sebesar 7,66% (tabel 1.5).

Tabel 1.6. Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi (y-o-y, %)

Sub Sektor Angkutan dan Komunikasi	I-2007	II-2007	III-2007	IV-2007
Angkutan	6,67	7,58	8,14	7,59
Kereta Api	-0,42	4,54	6,95	7,67
Jalan Raya (Darat)	5,65	6,86	7,76	7,66
Angkutan Laut	-1,12	2,14	4,37	4,61
ASDP	11,23	10,23	9,40	7,47
Angkutan Udara	17,45	15,80	13,53	9,07
Jasa Penunjang Angkutan	6,65	6,49	6,89	7,54
Komunikasi	17,87	16,79	16,66	17,93

Tingginya pertumbuhan sektor komunikasi didorong oleh tingginya permintaan masyarakat atas layanan jasa telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler. Permintaan terhadap telepon seluler (ponsel) terus meningkat terutama ponsel low end dan mid end. Sales Manager LG Communication Indonesia (LGMCI) mengatakan kota-kota di luar pulau Jawa yang mencatat pertumbuhan penjualan ponsel antara lain Makassar, Lampung, **Padang**, Palembang, dan Pekanbaru (Bisnis Indonesia, 26 Juli 2007). Tingginya permintaan ponsel tersebut diperkirakan karena semakin murahnya tarif menelepon karena struktur pasar operator telekomunikasi seluler serta semakin luasnya area jangkauan. Selain itu, semakin banyaknya fitur-fitur baru yang

diluncurkan operator seluler seperti 3G ataupun fitur-fitur telepon seluler yang semakin beragam membuat permintaan telepon seluler terus meningkat.



Peningkatan nilai tambah transportasi udara dikonfirmasi peningkatan beberapa prompt indikator. Arus keberangkatan penumpang melalui Bandara Minangkabau terus menunjukkan peningkatan (grafik 1.29). Hal ini searah dengan peningkatan lalu lintas keberangkatan pesawat udara melalui Bandara Minangkabau (grafik 1.30).

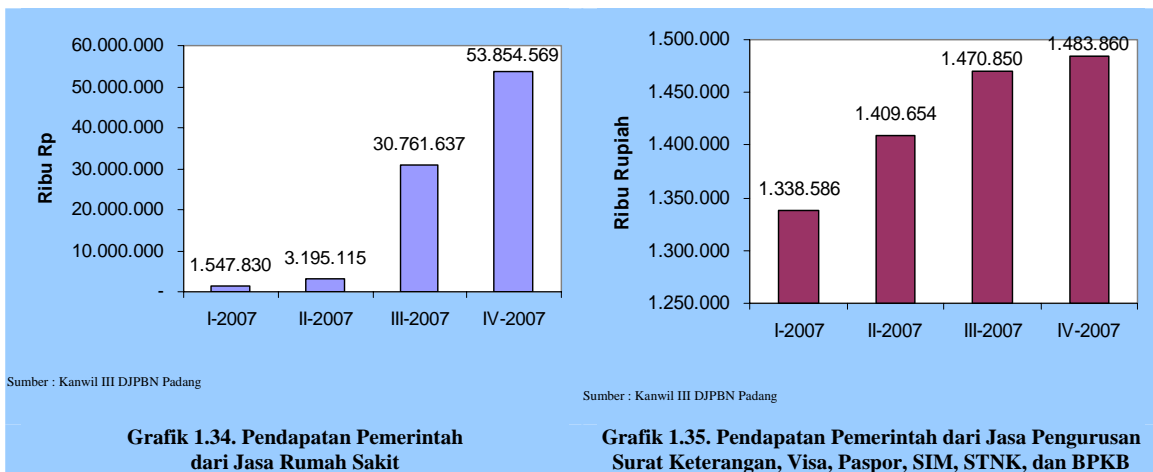
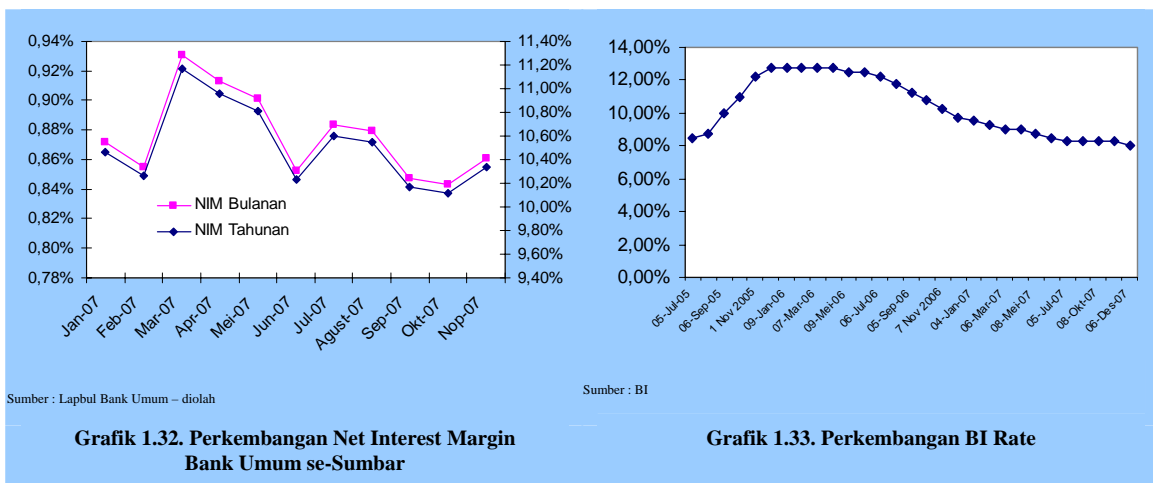
1.2.5 Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan pada triwulan IV-2007 tumbuh sebesar 7,14% (y-o-y) sedikit meningkat dibandingkan triwulan III-2007 sebesar 6,74% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini sebagian besar berasal dari pertumbuhan subsektor sewa bangunan sebesar 9,04 % (y-o-y) dan subsektor jasa perusahaan sebesar 8,29%. Peningkatan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat juga meningkatkan nilai tambah sub sektor bank dan lembaga keuangan non

Subsektor bank selama triwulan IV-2007 meningkat dengan pertumbuhan yang sedikit melambat. Perlambatan pertumbuhan subsektor perbankan dikonfirmasi dengan penurunan net interest margin bank umum (grafik 1.31). Tren penurunan suku bunga akibat penurunan BI-rate (grafik 1.32) ternyata menurunkan margin yang diperoleh perbankan dari penyaluran kreditnya. Jarak antara pendapatan bunga yang diperoleh dan beban bunga yang dibayarkan bank semakin pendek.

Melambatnya pertumbuhan subsektor perbankan ternyata tidak terjadi pada lembaga keuangan non bank. Pertumbuhan subsektor ini pada triwulan

laporan tercatat sebesar 7,52%, sedikit meningkat daripada triwulan sebelumnya sebesar 6,29%. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan subsektor lembaga keuangan non bank diperkirakan karena meningkatnya penjualan kendaraan bermotor (grafik 1.2) dimana pembiayaan penjualan tersebut berasal dari perusahaan leasing dan jasa pembiayaan. Beberapa perusahaan jasa pembiayaan memang cukup ekspansif dalam menawarkan produknya ke masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan KBI Padang bekerjasama dengan Center for Banking Research Universitas Andalas, lembaga keuangan non bank yang banyak digunakan oleh usaha mikro dan kecil di Sumatera Barat adalah koperasi, pelepas uang (rentenir), serta Baitul Mal wat Tamwil (BMT).



1.2.6 Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan IV-2007 tumbuh sebesar 5,55% (y-o-y). Pertumbuhan sektor ini pada triwulan laporan sedikit menurun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,84% (y-o-y). Beberapa prompt indikator menunjukkan pertumbuhan yang terjadi pada sektor jasa-jasa. Pendapatan pemerintah dari jasa rumah sakit mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada triwulan IV-2007 (grafik 1.32). Pendapatan yang diperoleh dari jasa rumah sakit pada triwulan IV-2007 tercatat sebesar Rp 53,85 milyar. Hal yang sama juga terjadi pada jasa perizinan seperti pengurusan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB. Pendapatan pemerintah dari perizinan tersebut pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp 1,48 milyar (grafik 1.32)

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF
KAJIAN EKONOMI REGIONAL ZONA PADANG¹
TRIWULAN IV - 2007

I. Gambaran Umum

Pertumbuhan ekonomi di Zona Padang² pada triwulan IV-2007 mengalami pertumbuhan yang positif, dan lebih baik dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Dilihat dari sektor ekonomi, semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor yang tumbuh paling tinggi pada triwulan laporan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,76%. Sementara dilihat dari pangsa, sektor pertambangan dan sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Zona Padang.

Adanya faktor musiman mewarnai pergerakan inflasi di zona Padang pada triwulan IV-2007. Tekanan inflasi di zona Padang, secara tahunan (y-o-y), mengalami penurunan dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,76% pada triwulan III-2007 menjadi 7,32%³ di triwulan laporan. Meskipun y-o-y menurun, namun secara kuartalan (q-t-q), inflasi di zona Padang sedikit meningkat, yaitu dari 2,12% pada triwulan III-2007 menjadi 2,19% di triwulan laporan. Peningkatan inflasi q-t-q pada triwulan laporan tersebut merupakan efek faktor musiman adanya hari raya keagamaan.

II. Asesmen Makro-Ekonomi Regional

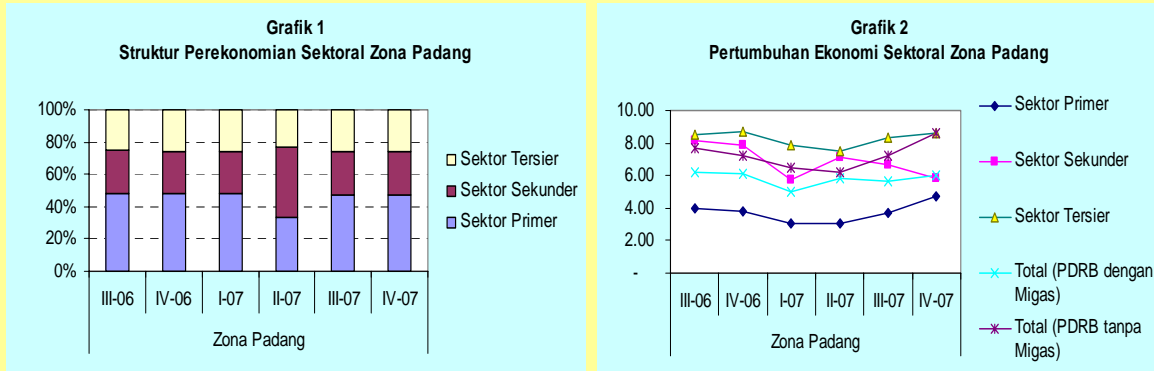
Pada periode triwulan IV-2007, perekonomian di Zona Padang tumbuh lebih ekspansif daripada triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan PDRB Zona Padang pada triwulan IV-2007. Angka pertumbuhan PDRB non migas pada triwulan IV-2007 sebesar 8,62% (y-o-y), atau lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 7,21% (y-o-y) maupun pertumbuhan pada triwulan IV-2006 sebesar 7,20%. Percepatan ini terutama berasal dari pertumbuhan pada PDRB Kepulauan Riau, yang semula tumbuh 6,68% (y-o-y) pada triwulan III-2007 menjadi 10,36% (y-o-y) pada triwulan IV-2007. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga terjadi pada Provinsi Riau yang tumbuh 8,98% pada triwulan IV-2007.

¹ Zona Padang meliputi provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.

² Data PDRB Zona Padang terdiri dari data Provinsi Sumbar, Jambi dan Riau, dan Kepri

³ Data s.d November 2007

Dari sisi penawaran, struktur PDRB zona Padang triwulan IV-2007 didominasi sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan) dengan sumbangan sebesar 47,52%, selanjutnya sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air dan sektor bangunan) sebesar 26,31%, dan sektor tersier (yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor angkutan & komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa) sebesar 26,17%.



Meskipun pangsa terhadap total PDRB masih paling rendah, sektor tersier justru tumbuh paling tinggi pada triwulan IV-2007 ini. Angka pertumbuhan sektor tersier sebesar 8,65% jauh di atas pertumbuhan sektor sekunder sebesar 5,88% maupun sektor primer sebesar 4,72%. Semua sektor ekonomi pada sektor tersier tumbuh di atas 8% kecuali sektor jasa-jasa yang tumbuh 7,27%. Secara sektoral, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 9,76% (y-o-y) diikuti dengan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 9,63% dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 8,69%.

Tabel 1
PDRB Menurut Penggunaan Zona Padang*

PDRB Menurut Penggunaan	Pertumbuhan (%)				Share (%)			
	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-07	II-07	III-07	IV-07
Konsumsi Rumah Tangga	6.04	6.14	6.31	6.65	65.48	65.46	64.70	64.78
Konsumsi Swasta Nirlaba	5.29	5.60	5.61	7.55	0.68	0.68	0.67	0.67
Konsumsi Pemerintah	7.30	9.54	10.17	10.12	12.91	13.11	13.00	13.20
PMTDB	8.02	6.86	7.27	6.64	21.41	21.21	21.27	21.54
Perubahan Stok	10.53	4.37	(101.08)	72.53	(0.70)	(0.56)	0.01	(1.97)
Ekspor	7.01	8.14	9.79	12.11	39.53	39.84	39.80	40.41
Impor	7.29	8.74	10.16	7.67	39.31	39.74	39.44	38.64

Sumber : BPS

* Tidak Termasuk Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh faktor konsumsi rumah tangga dan ekspor. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar perekonomian Zona Padang tumbuh 6,65%. Sementara itu, ekspor juga tumbuh sebesar 12,11% sehingga kontribusinya terhadap perekonomian Zona Padang meningkat menjadi 40,41%. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah juga meningkatkan konsumsi pemerintah terhadap perekonomian dengan

sumbangan sebesar 13,20%. Namun hal tersebut dirasakan belum optimal mengingat masih tingginya penempatan dana pemerintah daerah di pada perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah sehingga dana tersebut kembali mengalir ke sistem moneter.

Tabel 2
10 Komoditas Ekspor Utama Zona Padang (US Dollar, FOB)

No	Komoditi	2004	2005	2006	2007
1	15 - Animal or veqt. fats and oils	2,158,752,886	2,118,562,734	3,288,008,260	3,893,405,015
2	85 - Elect. machinery, sound rec., tvetc	2,246,035,014	2,759,415,529	2,407,051,708	2,031,045,263
3	84 - Nuclear react.,boilers,mech. appli.	1,804,918,389	1,620,066,890	1,226,120,813	1,332,692,151
4	40 - Rubber and articles thereof	420,795,205	539,942,209	898,129,142	767,054,390
5	48 - Paper and paperboard	190,068,982	448,242,965	639,761,257	729,379,882
6	47 - Pulp of wood; waste of paper	359,905,080	713,908,507	853,436,431	542,584,939
7	73 - Articles of iron and steel	184,612,359	263,992,720	405,384,658	471,698,722
8	89 - Ships,boats and floating structures	27,034,482	88,171,911	248,676,885	448,626,995
9	90 - Optical,photographic,medical instr.	133,306,507	166,194,822	300,211,421	283,330,465
10	44 - Wood and articles of wood	304,378,806	277,877,287	254,357,640	188,118,360
	Total Ekspor	8,789,493,080	9,956,206,669	11,825,694,359	12,010,603,046

Sumber : Web DSM

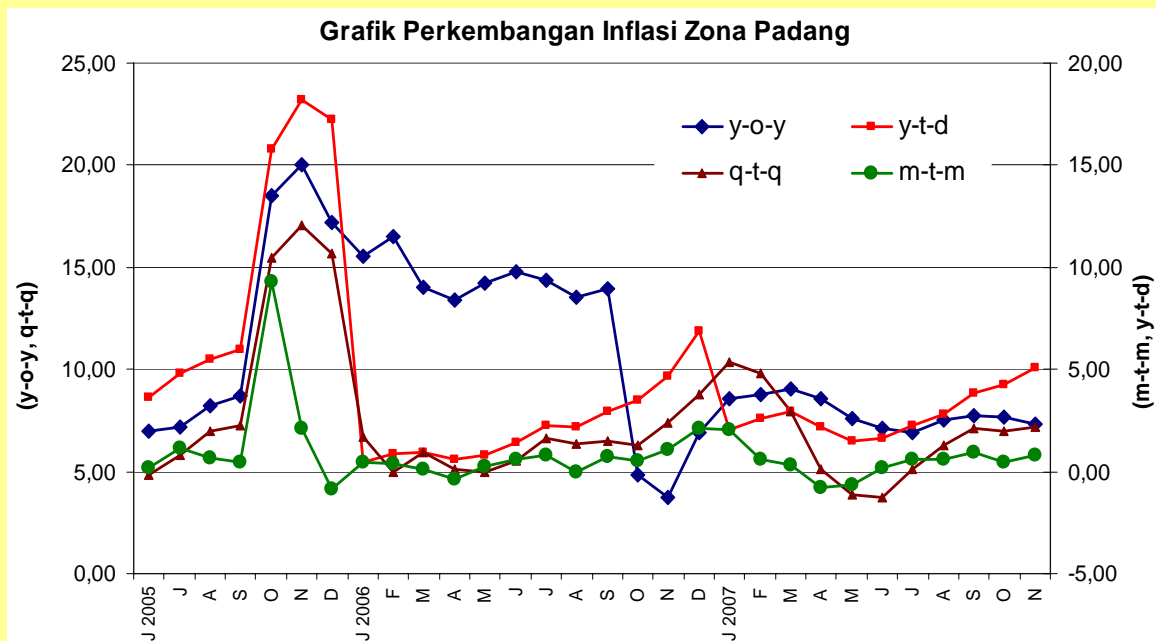
Komoditas perkebunan seperti CPO dan produk turunannya, karet dan produk karet masih mendominasi ekspor Zona Padang. Share ekspor kedua produk tersebut selama tahun 2007 mencapai 38,80% senilai USD 4,66 milyar. Nilai ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2007 bahkan tumbuh sebesar 32,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor manufaktur selama tahun 2007 sedikit menurun. Ekspor komoditas dengan pos tarif 85 mesin-mesin elektronik turun 15,62% menjadi sebesar USD 2,03 milyar, padahal pada tahun 2006 ekspor komoditas ini mencapai USD 2,41 milyar. Ekspor produk pulp juga menurun 36,42% dari USD 853,43 juta menjadi USD 542,58 juta atau 36,42%. Semakin ketatnya pengawasan terhadap illegal logging yang dilakukan Polda Riau diperkirakan menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor pulp.

Dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh faktor konsumsi rumah tangga dan ekspor. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar perekonomian Zona Padang tumbuh 6,65%. Sementara itu, ekspor semakin tinggi kontribusinya terhadap perekonomian dengan share sebesar 40,41% dengan pertumbuhan sebesar 12,11%. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah juga meningkatkan konsumsi pemerintah terhadap perekonomian. Namun hal tersebut dirasakan belum optimal mengingat masih tingginya penempatan dana pemerintah daerah di pada perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah sehingga dana tersebut kembali mengalir ke sistem moneter.

III. Asesmen Inflasi

Adanya faktor musiman mewarnai pergerakan inflasi di zona Padang pada triwulan IV-2007. Tekanan inflasi di zona Padang, secara tahunan (y-o-y), mengalami

penurunan dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,76% pada triwulan III-2007 menjadi 7,32%⁴ di triwulan laporan. Meskipun y-o-y menurun, namun secara kuartalan (q-t-q), inflasi di zona Padang sedikit meningkat, yaitu dari 2,12% pada triwulan III-2007 menjadi 2,19% di triwulan laporan. Peningkatan inflasi q-t-q pada triwulan laporan tersebut merupakan efek faktor musiman adanya hari raya keagamaan. Di zona Padang, kenaikan harga selain karena faktor adanya hari raya keagamaan, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca yang relatif kurang mendukung, terutama pada produksi tanaman pangan dan aktifitas nelayan laut. Selain itu, adanya permasalahan distribusi juga berdampak terhadap kelangkaan suatu barang.



Sampai dengan November 2007, laju inflasi zona Padang mencapai 5,08% (y-t-d) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2006 yang tercatat sebesar 4,64%. Laju inflasi tertinggi terjadi di kota Pekanbaru yang tercatat sebesar 5,82% (y-t-d), selanjutnya adalah kota Jambi sebesar 5,47%, kota Padang sebesar 5,30%, dan laju inflasi terendah di kota Batam sebesar 3,89%.

Berdasarkan kotanya, kota Pekanbaru merupakan kota dengan inflasi tertinggi di zona Padang. Pada triwulan laporan, inflasi kota Pekanbaru tercatat sebesar 2,78% (q-t-q), diikuti dengan kota Padang sebesar 2,49%, kota Jambi sebesar 2,00%, dan terendah di kota Batam sebesar 1,38%.

Dilihat dari kelompok barang dan jasa secara kuartalan (q-t-q), pada triwulan laporan kelompok sandang mengalami inflasi tertinggi di zona Padang dengan angka inflasi mencapai 6,87% (sumbangan 0,44%), disusul kemudian kelompok

⁴ Data s.d November 2007

bahan makanan sebesar 3,84% (sumbangan 1,15%), kelompok makanan jadi sebesar 1,46% (sumbangan 0,26%) dan kelompok perumahan sebesar 1,27% (sumbangan 0,29%). Secara tahunan (y-o-y), pada triwulan laporan kelompok bahan makanan mengalami inflasi tertinggi di zona Padang dengan angka inflasi mencapai 12,30% (sumbangan 3,59%), disusul kemudian kelompok sandang sebesar 8,82% (sumbangan 0,58%), kelompok makanan jadi sebesar 7,56% (sumbangan 1,33%) dan kelompok perumahan sebesar 5,77% (sumbangan 1,32%).

Perkembangan Inflasi Kota Tetangga (%)

Kota	Periode	y-o-y	y-t-d	q-t-q	m-t-m
Zona Padang	Nov 2006	3,75	4,64	2,41	1,09
	Mar 2007	9,03	2,96	2,96	0,33
	Jun	7,11	1,66	-1,26	0,16
	Sept	7,76	3,81	2,12	0,96
	Nov	7,32	5,08	2,19	0,79
Padang	Nov 2006	3,25	4,95	2,95	0,27
	Mar 2007	10,73	3,68	3,68	1,22
	Jun	7,79	1,64	-1,96	0,22
	Sept	9,00	3,74	2,07	0,98
	Nov	8,41	5,30	2,49	0,87
Pekanbaru	Nov 2006	3,20	3,96	1,12	1,45
	Mar 2007	9,42	3,67	3,67	0,13
	Jun	6,84	2,12	-1,49	-0,01
	Sept	7,58	4,08	1,92	1,09
	Nov	8,22	5,82	2,78	0,85
Jambi	Nov 2006	7,71	8,48	5,74	2,42
	Mar 2007	12,61	3,17	3,17	0,68
	Jun	9,93	1,92	-1,21	0,68
	Sept	10,96	4,54	2,57	1,10
	Nov	7,60	5,47	2,00	1,06
Batam	Nov 2006	2,96	3,28	1,70	0,85
	Mar 2007	5,35	1,41	1,41	-0,50
	Jun	5,42	1,06	-0,35	0,04
	Sept	5,26	3,23	2,15	0,74
	Nov	5,20	3,89	1,38	0,52

Sumber : BPS, diolah

Pada kelompok sandang, masih tingginya harga emas internasional dan adanya tekanan konsumerisme permintaan emas dalam bentuk perhiasan guna menghadapi hari raya keagamaan, memberikan tekanan inflasi terhadap harga emas perhiasan pada triwulan laporan. Kenaikan harga emas tersebut terus berlangsung hingga minggu IV Desember 2007. Informasi yang diperoleh dari pedagang emas di Pasar Raya Padang, harga emas 24 karat mencapai Rp620.000/emas, padahal pada triwulan sebelumnya rata-rata berkisar di harga Rp550.000/emas. Naik turunnya harga emas domestik juga tergantung pada kondisi dan situasi dunia, seperti minyak bumi dan US dollar, yang terlebih dahulu mempengaruhi harga emas internasional.

Tabel Perkembangan Inflasi Zona Padang Menurut Kelompok Barang

(kuartalan, q-t-q, %)

Kelompok Barang & Jasa	2005		2006				2007				
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV*	Sumb.
UMUM / TOTAL	2,25	10,65	0,92	0,51	1,50	3,80	2,96	-1,26	2,12	2,19	2,19
Bahan Makanan	3,90	11,79	-0,11	-0,87	1,74	9,10	5,47	-5,21	4,45	3,84	1,15
Makanan Jadi	1,90	5,01	2,45	0,30	2,61	2,89	3,01	0,87	1,30	1,46	0,26
Perumahan	1,00	6,16	1,30	1,52	0,63	1,66	2,61	0,46	0,69	1,27	0,29
Sandang	3,11	3,58	0,97	3,44	0,65	2,20	0,98	-0,22	3,32	6,87	0,44
Kesehatan	0,73	2,65	3,19	0,92	1,44	2,97	1,18	1,27	1,12	0,90	0,03
Pendidikan	5,59	3,64	0,25	0,69	6,30	0,87	0,54	0,05	3,34	0,21	0,01
Transportasi & Komnk	0,37	31,21	0,38	0,47	0,18	0,11	0,42	0,43	0,01	0,10	0,02

(tahunan, y-o-y, %)

Kelompok Barang & Jasa	2005		2006				2007				
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV*	Sumb.
UMUM / TOTAL	8,71	17,23	14,00	14,76	13,92	6,87	9,03	7,11	7,76	7,32	7,32
Bahan Makanan	12,33	19,76	13,64	15,01	12,63	9,92	16,06	10,98	13,94	12,30	3,59
Makanan Jadi	9,46	11,27	11,07	9,96	10,72	8,48	9,08	9,70	8,30	7,56	1,33
Perumahan	3,45	8,71	8,86	10,26	9,86	5,20	6,57	5,46	5,52	5,77	1,32
Sandang	8,73	7,81	8,49	11,55	8,88	7,43	7,44	3,65	6,40	8,82	0,58
Kesehatan	4,53	6,67	8,79	7,67	8,44	8,77	6,65	7,02	6,68	4,42	0,14
Pendidikan	6,20	9,70	9,82	10,47	11,21	8,24	8,56	7,86	4,86	4,11	0,19
Transportasi & Komnk	11,92	46,38	32,54	32,82	32,57	1,15	1,19	1,14	0,98	1,04	0,17

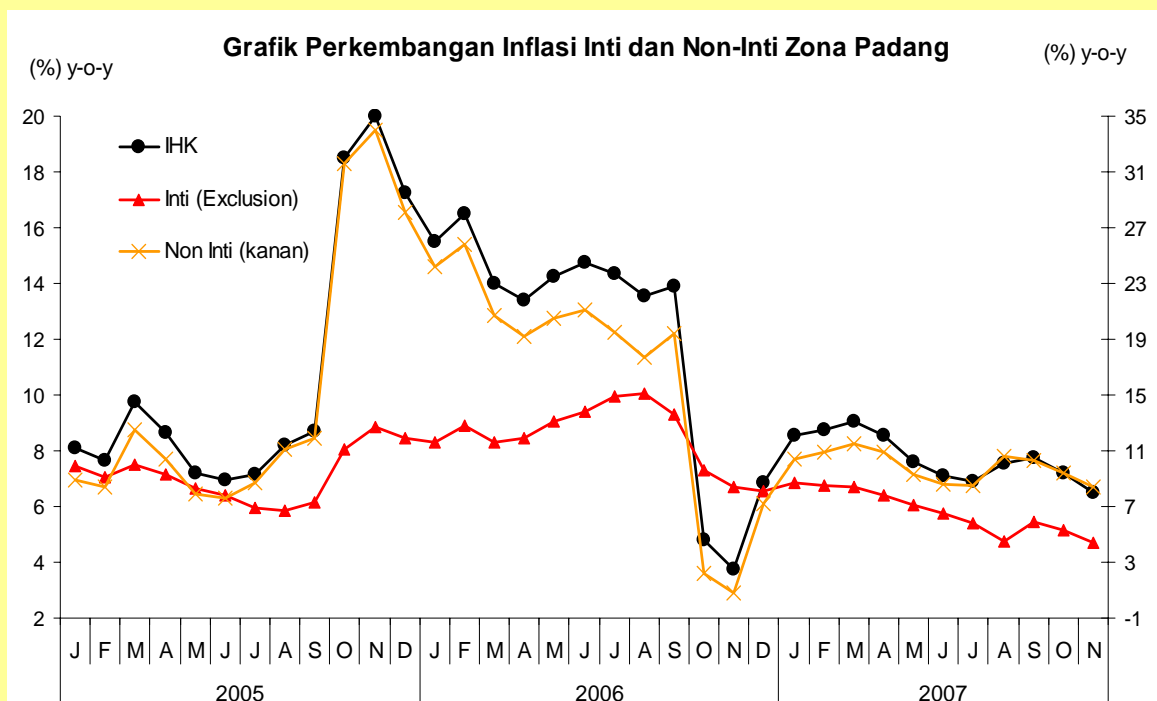
Sumber : BPS diolah, * posisi Nov 2007

Sementara itu, beberapa komoditi pada kelompok bahan makanan, seperti beras, cabe, bawang, tomat, udang basah, daging sapi, tahu, dll, juga memberikan sumbangan inflasi yang cukup tinggi di zona Padang. Kurang baiknya cuaca sepanjang triwulan IV-2007, berpengaruh signifikan terhadap produksi komoditi bahan makanan, terutama pada sayuran dan bumbu-bumbuan. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan relatif tingginya permintaan dalam rangka menyambut hari raya keagamaan. Pada bulan Desember 2007, harga beras IR42 di kota Padang sebesar Rp9.000/gantang, dan beras Solok berada pada harga Rp11.000-12.000/gantang. Cabe merah sempat mencapai harga Rp30.000/kg pada minggu III Desember 2007, sebelum akhirnya berada pada harga Rp11.000-12.000/kg. Informasi dari media lokal, tersendatnya pasokan dari luar Sumbar menyebabkan berkurangnya pasokan cabe merah di pasar-pasar Padang. Cabe merah hanya dipasok dari Alahan Panjang, Solok dan beberapa daerah sentra tanaman pangan di Sumbar. Kondisi yang sama terjadi pula di Riau, cabe merah melonjak hingga 75% dari sebelumnya. Berkurangnya pasokan dari Jawa dan Sumbar berdampak terhadap pasokan cabe di pasar-pasar di Pekanbaru.

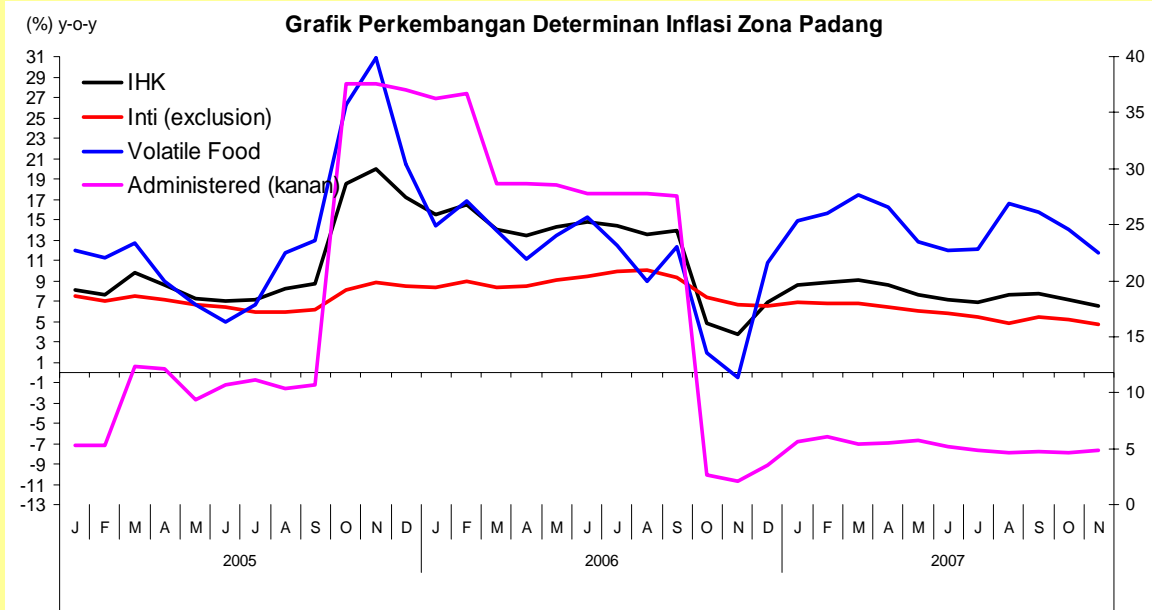
Pada kelompok makanan jadi, beberapa jenis rokok kretek filter masih memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pembentukan inflasi kelompok ini. Rokok kretek filter mengalami inflasi sebesar 2,04% (q-t-q) dengan sumbangan sebesar 0,07%, disusul kemudian rokok kretek (inflasi 2,62%, sumbangan 0,04%), dan rokok putih (inflasi 2,36%, sumbangan 0,02%). Selain itu, beberapa produk roti/bakery, seperti roti tawar dan donat, mengalami kenaikan harga seiring dengan meningkatnya bahan baku utamanya. Informasi dari Sekjen Asosiasi Bakery

Indonesia (ABI), kenaikan harga tepung terigu, margarine, minyak, telur dan gula menyebabkan pertumbuhan industri bakery secara nasional stagnan karena biaya produksi meningkat 40-70% dibanding awal tahun 2007. Pemanasan global telah menyebabkan gagal panen di sejumlah negara eksportir utama gandum, seperti Australia. Akibatnya pasokan gandum dunia menurun drastis tahun ini.

Meskipun sempat meningkat di bulan September 2007, secara tahunan (y-o-y) inflasi inti (*core inflation*) di zona Padang mengalami trend yang menurun. Begitu pula pada inflasi non inti (*non-core inflation*), trend menurun setelah mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2007. Berdasarkan determinan inflasi, inflasi inti di zona Padang pada bulan November 2007 tercatat sebesar 4,71%, sedangkan inflasi non inti sebesar 8,37%. Tingginya inflasi non inti tersebut disebabkan oleh masih tingginya inflasi *volatile food*.



Kenaikan harga komoditi pertanian yang masuk dalam kelompok bahan makanan, memberikan tekanan terhadap inflasi *volatile food* di bulan November 2007. Inflasi *volatile food* pada triwulan laporan masih berada pada level dua digit, namun bergerak dengan kecenderungan yang menurun. Pada triwulan laporan (November 2007) inflasi *volatile food* sebesar 11,72% (y-o-y). Sementara itu, inflasi kategori *administered price* di zona Padang menunjukkan arah yang relatif *flat/mendatar*. Inflasi *administered price* pada triwulan laporan (November 2007) sebesar 4,84% (y-o-y) lebih tinggi dari triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 4,73%.



IV. Asesmen Keuangan

Secara umum, kegiatan usaha perbankan pada akhir November 2007 tetap mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat bila dibandingkan akhir September 2007. Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan perbankan Zona Padang mencapai Rp 64,69 triliun atau tumbuh 3,45% dibandingkan akhir September 2007. Kredit yang disalurkan perbankan Zona Padang juga meningkat sebesar 2,58% dengan nominal sebesar Rp 39,23 triliun. Dengan demikian rasio LDR perbankan Zona Padang sedikit menurun dari 61,16% pada akhir September 2007 menjadi 60,65% pada akhir November 2007. Berdasarkan provinsi, Dana Pihak Ketiga di Provinsi Sumatera Barat tumbuh paling tinggi sebesar 8,81% diikuti Jambi sebesar 6,17%, sementara di sisi kredit yang disalurkan, kredit di Kepulauan Riau tumbuh paling tinggi sebesar 4,60% diikuti pertumbuhan kredit di Provinsi Sumbar sebesar 3,95%.

Tabel Perkembangan Dana Pihak Ketiga (dalam Juta Rp)

Provinsi	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Nov-07
Jambi	7,534,689	7,702,742	8,179,619	8,727,202	9,265,631
Kepulauan Riau	10,182,616	10,512,523	11,221,283	11,850,686	12,439,951
Riau	27,877,475	26,380,036	27,490,096	29,122,857	29,022,151
Sumbar	11,505,355	11,499,458	12,211,656	12,834,792	13,965,053
Total DPK	57,100,135	56,094,759	59,102,654	62,535,537	64,692,786
Growth q-t-q		-1.76%	5.36%	5.81%	3.45%

Tabel Perkembangan Kredit (dalam Juta Rp)

Provinsi	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Nov-07
Jambi	4,347,052	4,481,416	4,844,795	5,222,744	5,410,886
Kepulauan Riau	6,328,833	6,343,254	6,810,167	7,088,335	7,414,128
Riau	14,023,433	14,187,152	14,767,515	15,467,813	15,527,122
Sumbar	8,934,621	9,255,881	10,036,715	10,470,159	10,883,997
Total Kredit	33,633,939	34,267,703	36,459,192	38,249,051	39,236,133
Growth q-t-q		1.88%	6.40%	4.91%	2.58%

LDR	58.90%	61.09%	61.69%	61.16%	60.65%
-----	--------	--------	--------	--------	--------

Secara tahun berjalan (ytd), DPK dan kredit tahun 2007 (s.d bulan November 2007) masing-masing tumbuh sebesar 13,30% (ytd) dan 16,66% (ytd). Hal ini mengakibatkan rasio LDR mengalami peningkatan dari 58,90% pada akhir Desember 2006 menjadi 60,65% pada akhir November 2007. Meskipun demikian, rasio LDR tersebut masih dibawah pencapaian pada pertengahan tahun 2007 yang sempat mencapai 61,69%.

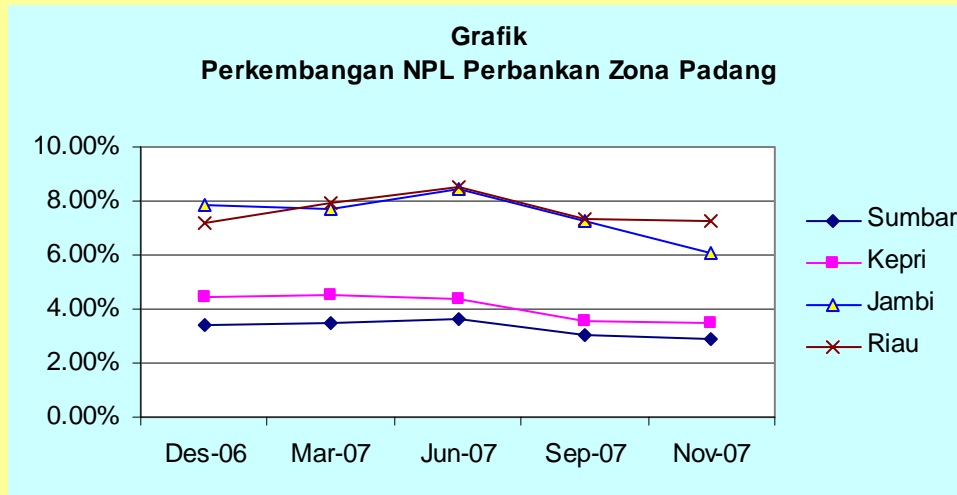
Perkembangan komposisi DPK menunjukkan terjadinya peningkatan porsi tabungan dan giro sedangkan pangsa deposito cenderung turun. Hal ini mengindikasikan bahwa suku bunga deposito yang semakin rendah menjadi tidak menarik bagi masyarakat untuk menabung dalam bentuk deposito. Selama periode September-November 2007, posisi tabungan hanya tumbuh 0,16%, sementara tabungan meningkat 6,10% hingga menjadi Rp 24,16 triliun.

Jenis DPK	Posisi					Pertumbuhan (q-t-q,%)			
	Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Nov-07	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Nov-07
Tabungan	20,588,954	19,761,745	21,038,682	22,775,368	24,164,313	-4.02%	6.46%	8.25%	6.10%
Deposito	14,477,492	15,157,034	15,731,975	15,988,025	16,012,984	4.69%	3.79%	1.63%	0.16%
Giro	21,809,693	20,975,431	22,120,134	23,664,731	24,236,521	-3.83%	5.46%	6.98%	2.42%

Dari sisi penyaluran kredit sektoral, selama triwulan IV-2007 sektor perdagangan, hotel dan restoran memperoleh kucuran paling tinggi sebesar Rp 9,41 triliun, sekaligus tumbuh paling tinggi sebesar 46,59%. Tingginya aktivitas ekonomi selama triwulan IV-2007 juga meningkatkan exposure kredit perbankan ke sektor perindustrian yang tumbuh sebesar 43,85% serta sektor lainnya (konsumsi) sebesar 43,24%. Yang menarik dicermati pada penyaluran kredit sektoral ini adalah selama tahun 2007 terjadi peningkatan penyaluran kredit yang sangat tinggi pada sektor pertambangan yaitu sebesar 228,68%. Peningkatan kredit sektor pertambangan ini terjadi pada semua provinsi di Zona Padang antara lain Riau sebesar 4470,46%, Kepulauan Riau sebesar 174,18%, Jambi sebesar 166,28%, dan Sumatera Barat sebesar 45,24%. Total kredit yang disalurkan perbankan Zona Padang untuk sektor ini sebesar Rp 162,14 miliar. Meskipun share kredit sektor ini masih kecil, namun jika melihat tren peningkatan yang cukup tinggi serta semakin banyak investor yang mulai melirik sektor pertambangan maka sektor ini diperkirakan akan terus diminati perbankan.

Kredit Sektoral	Posisi (Juta Rp)			Share (%)			Growth (%)	
	Des-06	Sep-07	Nov-07	Des-06	Sep-07	Nov-07	q-t-q	y-t-d
Pertanian	6,063,125	4,047,609	5,634,575	18.12	14.42	14.44	39.21	(7.07)
Pertambangan & Penggalian	49,331	124,083	162,141	0.15	0.44	0.42	30.67	228.68
Perindustrian	3,772,296	2,775,299	3,992,138	11.27	9.89	10.23	43.85	5.83
Listrik, Gas & Air	45,365	62,445	64,293	0.14	0.22	0.16	2.96	41.72
Konstruksi	1,334,231	1,501,231	1,632,324	3.99	5.35	4.18	8.73	22.34
Perdag, Hotel & Restoran	7,834,473	6,422,438	9,414,649	23.41	22.89	24.13	46.59	20.17
Pengangkutan & Komunikasi	599,543	623,888	820,366	1.79	2.22	2.10	31.49	36.83
Jasa-Jasa	2,356,468	2,498,687	2,972,013	7.04	8.90	7.62	18.94	26.12
Lain-lain	11,410,515	10,004,239	14,329,973	34.10	35.65	36.72	43.24	25.59
Total	33,465,347	28,059,919	39,022,472	100.00	100.00	100.00	39.07	16.61

Memasuki triwulan IV-2007, alokasi penempatan dana pada SBI oleh perbankan di zona Padang mulai menunjukkan penurunan meskipun masih tetap relatif tinggi. Posisi penempatan pada SBI pada bulan November 2007 mencapai Rp 7,43 triliun atau menurun Rp 1,59 triliun (17,65%) dibandingkan dengan posisi Juni 2007. Penurunan penempatan SBI oleh perbankan Zona Padang diperkirakan terjadi karena akselerasi pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi pada triwulan IV-2007.



Berdasarkan asesmen terhadap sistem keuangan zona Padang, risiko kredit perbankan di zona Padang dilihat dari rasio NPL selama triwulan laporan menunjukkan tren yang menurun. Rasio NPL perbankan di Riau dan Jambi mengalami penurunan dari 8,49% dan 8,43% pada pertengahan 2007 menjadi 7,25% dan 6,09% pada akhir November 2007. Sementara itu, rasio NPL di Sumbar dan Kepulauan Riau juga semakin menurun hingga mencapai 2,89% dan 3,45% pada akhir November 2007.

Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) Zona Padang hingga akhir November 2007 telah mencapai Rp 27,76 triliun atau 70,76% dari total kredit yang disalurkan perbankan Zona Padang. Pangsa kredit UMKM tersebut meningkat sebesar 4,84% dari 65,92% pada akhir Desember 2006. Peningkatan kredit UMKM terbesar terjadi di Provinsi Jambi sebesar 31,84%, serta Provinsi Sumatera Barat sebesar 26,63%.

V. Outlook Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Prospek perekonomian Zona Padang pada triwulan I-2008 diprediksikan tumbuh positif dengan pertumbuhan sedikit menurun daripada triwulan IV-2007, berkisar pada 7,4%-7,9%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2008 merupakan faktor musiman dimana terjadi sedikit kontraksi pada konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Investasi juga diperkirakan belum optimal. Pelaksanaan Riau Investment Summit pada bulan November 2007 serta Silaturahmi Saudagar

Minang pada bulan Oktober 2007 masih sebatas pada pertemuan informal yang belum ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih riil. Ekspor komoditas perkebunan diperkirakan juga akan mengalami sedikit perlambatan mengingat masuknya musim penghujan yang mengakibatkan penurunan produktivitas.

Cuaca yang diprediksi masih kurang baik hingga triwulan pertama 2008, diperkirakan berdampak negatif terhadap hasil produksi tanaman pangan, bumbu-bumbuan dan ikan laut. Di kota Padang, Pekanbaru dan Jambi, tekanan inflasi diperkirakan berasal kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan akibat tingginya permintaan barang konsumsi dan bahan bangunan seperti semen & kayu balokan. Selain itu, rencana PT. Pertamina yang akan menaikkan harga gas elpiji 50 kg & elpiji industri dan kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2008 juga diperkirakan akan meningkatkan inflasi administered. Kemungkinan shock harga BBM juga dapat memicu kenaikan tarif dasar listrik yang dapat juga meningkatkan inflasi administered. Dengan memperhitungkan determinan-determinan inflasi tersebut diproyeksikan inflasi zona Padang triwulan I-2008 dan inflasi tahun 2008 masih berkisar pada angka 6-8% (y-o-y).

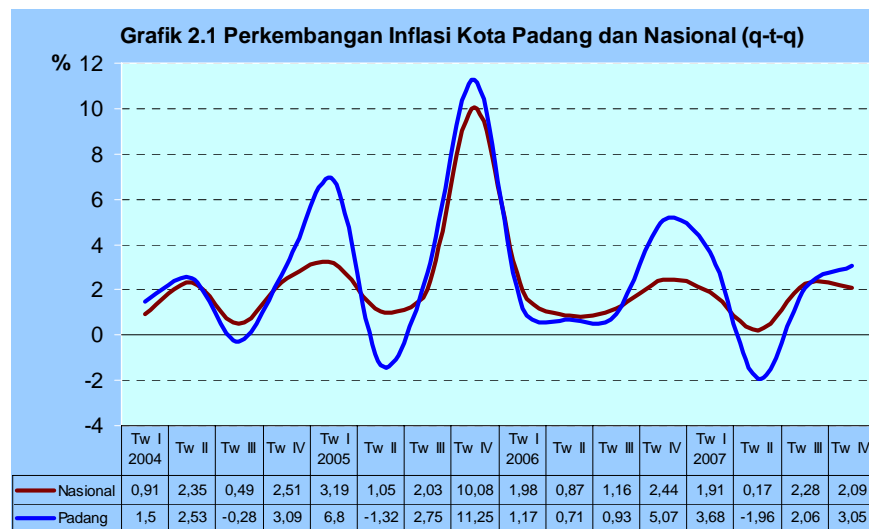
BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

2.1. Umum

Tekanan harga yang berasal dari faktor musiman adanya bulan puasa dan hari raya keagamaan pada triwulan III-2007 berlanjut di triwulan laporan dengan tekanan yang lebih tinggi. Permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan dan makanan jadi serta bahan sandang meningkat secara signifikan pada triwulan IV-2007. Kondisi ini cukup berbeda dengan nasional. Pada triwulan IV-2007, inflasi secara nasional justru lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV-2007 angka inflasi kota Padang tercatat sebesar 3,05% (q-t-q) atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06%. Angka inflasi tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan inflasi nasional pada triwulan IV-2007 yang tercatat sebesar 2,09%. Namun demikian, dibandingkan dengan inflasi kota Padang pada triwulan yang sama tahun 2006, yaitu sebesar 5,07%, inflasi kota Padang triwulan laporan masih lebih rendah (Grafik 2.1).



Meskipun secara kuartalan (q-t-q) inflasi kota Padang meningkat, namun secara tahunan (y-o-y) inflasi kota Padang justru mengalami trend yang menurun. Pada triwulan IV-2007 inflasi tahunan sebesar 6,90% (y-o-y) lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,00% (y-o-y). Namun jika dibandingkan dengan inflasi tahunan nasional pada triwulan IV-2007 yang

tercatat sebesar 6,59% (y-o-y), inflasi tahunan kota Padang relatif masih lebih tinggi (Grafik 2.2).



Seperti triwulan sebelumnya, faktor utama penyebab inflasi yang terjadi di kota Padang pada triwulan IV-2007 didorong dari peningkatan harga barang/jasa pada kelompok bahan makanan, terutama pada sub kelompok komoditi bumbu-bumbuan dan sub kelompok komoditi padi-padian. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 5,12% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 1,63%. Masih tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditi bahan makanan selama bulan puasa dan hari raya keagamaan merupakan faktor musiman yang rutin terjadi setiap tahunnya.

2.2 Determinan Inflasi

Dilihat dari determinannya, inflasi non inti (*non core inflation*) pada triwulan laporan bergerak turun dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, tren inflasi inti (*core inflation*) yang terus menurun sejak triwulan IV-2006, terhenti di triwulan IV-2007. Inflasi inti kota Padang tercatat sebesar 6,56% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 2,94%, sementara inflasi non inti sebesar 7,18% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 3,96%. Relatif bergejolaknya kurs rupiah terhadap mata uang asing, terutama US\$, ditenggarai merupakan penyebab meningkatnya inflasi inti tersebut.

Pada triwulan IV-2007, meskipun kebijakan pemerintah terhadap cukai rokok dilakukan pada bulan Maret dan Juli 2007, namun dampaknya masih tetap ada hingga triwulan laporan. Inflasi pada barang yang masuk kategori *administered price* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya,

yaitu dari 5,62% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,34% pada triwulan III-2007 menjadi 4,95% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 1,15% di triwulan laporan. Sebaliknya, pada kategori *non administered* terjadi penurunan angka inflasi yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 10,06% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 7,66% pada triwulan III-2007, menjadi 7,50% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 5,75% di triwulan laporan. Meskipun menurun, inflasi pada kelompok makanan (*food inflation*) di triwulan IV-2007 mendominasi terjadinya inflasi, dengan angka inflasi sebesar 9,72% (y-o-y) dan sumbangan sebesar 4,76%. Inflasi *non food* naik tipis dan berada pada 4,20% (y-o-y) dengan sumbangan sebesar 2,14% (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Inti, *Food & Administered* Kota Padang (y-o-y, %)

Kelompok Barang & Jasa	2006		2007							
	Tw. IV		Tw. I		Tw. II		Tw. III		Tw. IV	
	Perubhn.	Sumbgn.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumbgn.
Core	8,95	3,97	8,20	3,68	6,77	3,08	5,86	2,71	6,56	2,94
Non Core	7,34	4,08	12,79	7,05	8,64	4,71	11,69	6,29	7,18	3,96
Food	9,57	4,62	15,85	7,65	12,13	5,71	14,63	6,87	9,72	4,76
Non Food	6,63	3,43	5,96	3,09	3,93	2,08	4,00	2,12	4,20	2,14
Administered	6,73	1,58	4,69	1,12	4,27	1,03	5,62	1,34	4,95	1,15
Non Administered	8,46	6,47	12,61	9,61	8,91	6,76	10,06	7,66	7,50	5,75

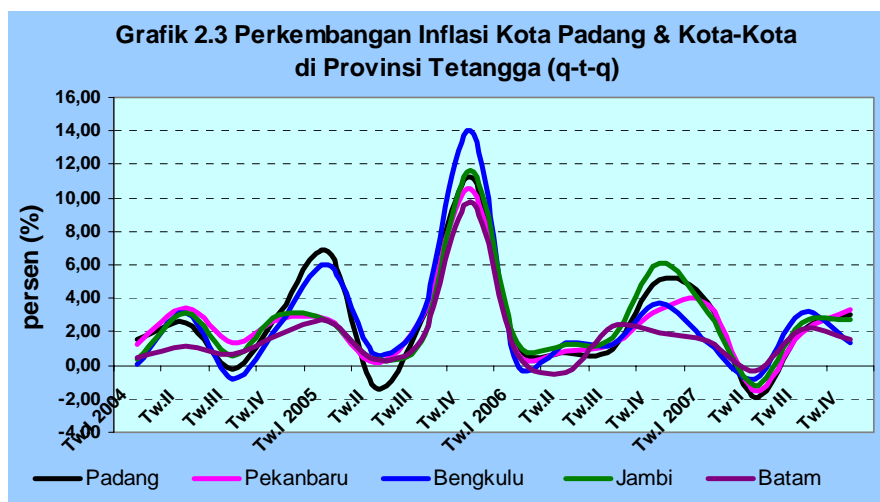
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

2.3. Perkembangan Inflasi Kota Padang, Nasional dan Kota-kota di Provinsi Tetangga

Faktor musiman adanya bulan puasa dan hari raya keagamaan merupakan faktor pendorong meningkatnya angka inflasi kota Padang. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya masalah pasokan/supply barang akibat cuaca yang kurang menguntungkan. Pada triwulan IV-2007 kota Padang mengalami inflasi sebesar 3,05% (q-t-q), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 2,06% (q-t-q). Selama periode triwulan IV-2007, kota Padang mengalami inflasi pada bulan Oktober 2007 sebesar 0,62% (m-t-m), bulan November 2007 sebesar 0,87% (m-t-m), dan bulan Desember 2007 sebesar 1,53% (m-t-m).

Inflasi pada triwulan IV-2007 secara nasional sebesar 2,09% (q-t-q) atau sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 2,28% (q-t-q). Sementara itu, pergerakan inflasi triwulanan (q-t-q) kota-kota di provinsi tetangga seperti Pekanbaru dan Jambi pada triwulan IV-2007 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara inflasi

kota Batam dan Bengkulu cenderung menurun. Kota-kota yang mengalami peningkatan angka inflasi yaitu kota Pekanbaru dari 1,91% pada triwulan III-2007 menjadi 3,31% pada triwulan IV-2007, dan kota Jambi dari 2,56% pada triwulan III-2007 menjadi 2,75% pada triwulan IV-2007. Kota Batam menurun dari 2,15% pada triwulan III-2007 menjadi 1,56% pada triwulan IV-2007, dan kota Bengkulu dari 3,10% pada triwulan III-2007 menjadi 1,37% pada triwulan IV-2007 (Grafik 2.3).



Tabel. 2.2 Inflasi Kota Padang dan Kota-Kota di Provinsi Tetangga (m-t-m, %)

Periode	Nasional	Kota				
		Padang	Pekanbaru	Bengkulu	Jambi	Batam
2006						
Jul	0,45	0,93	0,44	0,77	0,27	1,21
Agt	0,33	-0,88	0,72	-0,17	-0,28	0,07
Sept	0,38	0,88	0,05	0,62	1,62	1,00
Okt	0,86	1,77	-0,04	1,15	1,59	-0,02
Nov	0,34	0,27	1,45	0,97	2,42	0,86
Des	1,21	2,96	2,27	1,59	2,01	1,27
2007						
Jan	1,04	1,27	2,72	0,12	1,49	2,26
Feb	0,62	1,14	0,79	-0,02	0,97	-0,34
Mar	0,24	1,22	0,13	1,26	0,68	-0,50
Apr	-0,16	-0,87	-0,90	-2,01	-1,87	-0,03
Mei	0,10	-1,32	-0,58	-0,54	-0,01	-0,35
Jun	0,23	0,22	-0,01	1,70	0,68	0,04
Jul	0,72	0,71	0,47	1,53	0,90	0,36
Agt	0,75	0,36	0,34	0,13	0,54	1,04
Sept	0,80	0,98	1,09	1,42	1,10	0,74
Okt	0,79	0,62	0,82	1,41	-0,17	0,12
Nov	0,18	0,87	0,85	-1,10	1,06	0,52
Des	1,10	1,53	1,61	1,04	1,84	0,92
y-t-d (Des'07)	6,59	6,90	7,53	5,00	7,42	4,84

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Apabila diperhatikan dari inflasi bulanan (*m-t-m*), pada bulan Oktober 2007 inflasi terendah terjadi di kota Jambi sebesar -0,17% sedangkan inflasi tertinggi di kota Bengkulu sebesar 1,41%. Pada bulan November 2007, inflasi terendah terjadi di kota Bengkulu sebesar -1,10% dan inflasi tertinggi

di kota Jambi sebesar 1,06%. Di bulan Desember 2007, inflasi terendah terjadi di kota Batam sebesar 0,92% dan tertinggi di kota Jambi sebesar 1,84% (Tabel 2.2).

2.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa

Perkembangan inflasi berdasarkan kelompok barang & jasa (q-t-q), terlihat bahwa semua kelompok barang & jasa mengalami inflasi. Seperti halnya triwulan III-2007, pada triwulan laporan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 5,12% (sumbangan inflasi 1,63%), disusul kemudian kelompok makanan jadi sebesar 4,29% (sumbangan inflasi 0,75%). Selanjutnya secara berturut-turut pada kelompok sandang sebesar 2,03% (sumbangan inflasi 0,14%), kelompok perumahan sebesar 1,74% (sumbangan inflasi 0,34%), kelompok pendidikan sebesar 0,93% (sumbangan inflasi 0,05%), kelompok kesehatan sebesar 0,56% (sumbangan inflasi 0,00%), dan kelompok transportasi & komunikasi sebesar 0,32% dengan sumbangan inflasi sebesar 0,05% (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Perkembangan Inflasi Triwulanan Padang Menurut Kel. Barang (q-t-q, %)

Kelompok Barang & Jasa	2006		2007							
	Tw. IV		Tw. I		Tw. II		Tw. III		Tw. IV	
	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.	Perubhn.	Sumb.
UMUM / TOTAL	5,07	5,07	3,68	3,68	-1,96	-1,96	2,06	2,06	3,05	3,05
Bahan Makanan	12,59	3,76	8,88	2,84	-7,97	-2,68	3,30	1,04	5,12	1,63
Makanan Jadi	4,14	0,71	2,63	0,45	1,91	0,32	2,19	0,38	4,29	0,75
Perumahan	1,74	0,35	0,99	0,19	0,87	0,17	1,73	0,34	1,74	0,34
Sandang	2,06	0,15	1,16	0,08	0,22	0,02	2,50	0,18	2,03	0,14
Kesehatan	1,56	0,05	0,40	0,01	3,65	0,10	1,57	0,05	0,56	0,00
Pendidikan	0,34	0,02	0,46	0,03	-0,26	-0,01	1,69	0,10	0,93	0,05
Transportasi & Komk	0,17	0,03	0,50	0,08	0,81	0,12	-0,08	-0,01	0,32	0,05

Sumber : BPS Sumbar, diolah

Kelompok bahan makanan pada triwulan IV-2007 kembali mengalami kenaikan angka inflasi yang cukup tinggi setelah triwulan sebelumnya juga mengalami inflasi. Masih tingginya permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan di bulan puasa dan dalam rangka menyambut hari raya keagamaan memberi tekanan yang cukup tinggi terhadap inflasi kelompok bahan makanan di kota Padang. Kelompok bahan makanan pada triwulan IV-2007 mengalami inflasi sebesar 5,12% (q-t-q) dengan sumbangan inflasi sebesar 1,63%.

Peningkatan inflasi secara signifikan pada sub kelompok bumbu-bumbuan merupakan faktor utama penyebab inflasi pada kelompok bahan makanan di triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sub

kelompok bumbu-bumbuan mengalami inflasi sebesar 24,36%, disusul kemudian inflasi pada sub kelompok padi-padian sebesar 8,17%, sub kelompok kacang-kacangan sebesar 5,85%, sub kelompok lemak & minyak sebesar 5,66%, sub kelompok ikan diawetkan sebesar 5,23%, sub kelompok sayur-sayuran sebesar 4,65%, sub kelompok bahan makanan lainnya sebesar 4,09% dan sub kelompok telur, susu & hasil-hasilnya sebesar 1,69%. Sementara itu, sub kelompok ikan segar, sub kelompok buah-buahan dan sub kelompok daging & hasil-hasilnya mengalami deflasi masing-masing sebesar -5,13%, -2,93% dan -1,80% (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Bahan Makanan	-2,35	-0,63	12,59	8,88	-7,97	3,30	5,12
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	-9,65	0,24	8,78	22,19	-17,81	-1,50	8,17
Daging dan Hasil-hasilnya	2,46	3,82	-0,99	-3,77	8,58	4,14	-1,80
Ikan Segar	15,01	1,37	-13,57	16,00	6,66	4,91	-5,13
Ikan Diawetkan	2,99	-4,24	6,76	9,72	-3,12	4,34	5,23
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	1,06	2,68	2,09	-2,70	4,56	12,31	1,69
Sayur-sayuran	3,20	-11,04	14,50	6,39	-4,52	2,42	4,65
Kacang-kacangan	13,58	1,31	-4,17	-0,49	-0,40	10,34	5,85
Buah-buahan	-4,37	-5,93	16,47	10,44	-4,58	8,10	-2,93
Bumbu-bumbuan	-21,00	1,02	100,30	-0,05	-29,75	0,78	24,36
Lemak & Minyak	2,49	-0,76	5,06	23,68	11,26	6,07	5,66
Bahan makanan lainnya	-2,61	5,93	10,49	3,94	-0,27	6,25	4,09

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Kurang baiknya cuaca sepanjang triwulan IV-2007, berpengaruh signifikan terhadap produksi komoditi bahan makanan, terutama pada sayuran dan bumbu-bumbuan. Beberapa sentra cabe yang ada di Sumatera Barat, seperti Alahan Panjang dan Solok, mengalami penurunan produktivitas. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan relatif tingginya permintaan dalam rangka menyambut hari raya keagamaan. Informasi yang diperoleh dari media massa, Cabe merah sempat mencapai harga Rp30.000/kg pada minggu III Desember 2007 di Pasar Raya Padang, sebelum akhirnya berada pada harga Rp11.000-12.000/kg. Sementara harga bawang merah mencapai Rp20.000/kg.

Begitu pula dengan harga beras, tepung terigu dan mie kering instan dalam sub kelompok padi-padian, umbi-umbian & hasilnya, masih relatif tinggi. Beras jenis Sokan Bukittinggi yang biasanya Rp9.000/gantang naik menjadi Rp10.000/gantang. Untuk jenis 42 C harga sebelumnya Rp10.500/gantang menjadi Rp11.500/gantang. Seperti halnya cabe dan bawang, kenaikan harga beras karena berkurangnya pasokan beras dari Sumatera Barat. Untuk tepung terigu,

Pada sub kelompok kacang-kacangan, inflasi terutama berasal dari naiknya harga tempe sebagai akibat dari meningkatnya harga kedelai

secara nasional. Inflasi sub kelompok minyak & lemak disumbang dari naiknya harga komoditi minyak goreng dan kelapa. Masih tingginya harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng berdampak terhadap harga minyak goreng yang masih cukup tinggi. Kondisi tersebut ditambah dengan baru terealisasinya 103.868 liter jatah minyak goreng bersubsidi untuk wilayah Sumatera Barat hingga minggu kedua Desember 2007 dari alokasi sebanyak 200.000 liter. Sementara itu, naiknya harga kelapa selain karena meningkatnya permintaan karena adanya bulan puasa dan hari raya keagamaan, juga diduga karena efek substitusi dari tingginya harga minyak goreng. Masyarakat menggunakan kelapa untuk menghasilkan minyak kelapa yang digunakan sendiri.

Pada triwulan IV-2007 peningkatan angka inflasi kelompok makanan jadi kembali terjadi. Pada triwulan laporan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,29% (q-t-q) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,19%. Seperti halnya di triwulan III-2007, inflasi kelompok makanan jadi pada triwulan laporan terutama disumbang dari inflasi yang terjadi pada sub kelompok tembakau & minuman beralkohol sebesar 5,24%, selanjutnya sub kelompok makanan jadi sebesar 3,96%, dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,60% (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,05	2,98	4,14	2,63	1,91	2,19	4,29
Makanan Jadi	0,03	5,38	4,27	2,82	0,33	0,94	3,96
Minuman yang Tidak Beralkohol	0,21	-0,30	1,70	2,13	0,59	-0,16	3,60
Tembakau & Minuman Beralkohol	0,00	0,00	5,22	2,52	5,88	5,85	5,24

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Seperti pada triwulan III-2007, produk rokok, terutama jenis rokok kretek dan rokok putih, masih memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pembentukan inflasi kelompok makanan jadi. Kebijakan pemerintah yang menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada Maret 2007 dan tarif cukai spesifik rokok pada 1 Juli 2007, masih terus berdampak di tingkat pengecer yang menaikkan harga jual rokok. Pada sub kelompok makanan jadi, komoditi berbahan baku tepung terigu dan beras mengalami kenaikan harga seiring dengan naiknya harga dua komoditi tersebut. Pada triwulan laporan produk roti tawar, kue basah dan biskuit mengalami inflasi masing-masing sebesar 11,82% (q-t-q), 10,72% dan 3,52%. Sedangkan ketupat/lontong sayur terjadi inflasi sebesar 13,575 (q-t-q). Informasi dari Sekjen Asosiasi Bakery Indonesia (ABI), kenaikan harga tepung terigu, margarine, minyak, telur dan gula menyebabkan

pertumbuhan industri bakery secara nasional stagnan karena biaya produksi meningkat 40-70% dibanding awal tahun 2007. Pemanasan global telah menyebabkan gagal panen di sejumlah negara eksportir utama gandum, seperti Australia. Akibatnya pasokan gandum dunia menurun drastis tahun ini.

Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar mengalami inflasi sebesar 1,74% (q-t-q) pada triwulan laporan atau sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 1,73%. Kenaikan angka inflasi tersebut berasal dari sub kelompok biaya tempat tinggal yang mengalami inflasi sebesar 2,94%, sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga sebesar 1,57%, sub kelompok perlengkapan rumah tangga sebesar 1,19%, dan sub kelompok bahan bakar, penerangan & air sebesar 0,23% (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	4,82	1,15	1,74	0,99	0,87	1,73	1,74
Biaya Tempat Tinggal	4,72	1,89	0,69	1,08	0,47	1,60	2,94
Bahan Bakar, Penerangan & Air	6,82	0,01	3,75	0,00	0,00	-0,06	0,23
Perlengkapan Rumah Tangga	1,05	1,71	0,41	4,00	6,65	9,31	1,19
Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,46	0,86	1,05	1,32	0,23	0,32	1,57

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Tekanan inflasi pada sub kelompok biaya tempat tinggal berasal dari produk besi beton, semen dan kayu balokan. Sebagaimana diketahui, ketiga bahan bangunan tersebut merupakan komponen penting dalam sebuah bangunan/konstruksi. Adanya masalah pasokan dan meningkatnya permintaan yang cukup tinggi pada triwulan laporan, terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang banyak dikerjakan pada triwulan terakhir, memberikan tekanan terhadap kenaikan harga ketiga bahan bangunan tersebut. Sementara itu, naiknya harga gas elpiji ukuran 50 kg pada tanggal 1 September 2007 dari Rp4.250/kg menjadi Rp6.200/kg menyumbang inflasi pada sub kelompok bahan bakar, penerangan & air. Gas elpiji ukuran 50 kg merupakan gas terbanyak digunakan untuk usaha skala kecil/menengah. Dengan demikian kenaikan harga gas elpiji tersebut selain berdampak terhadap inflasi juga meningkatkan biaya produksi usaha kecil & menengah.

Setelah mengalami deflasi pada triwulan III-2007, kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan pada triwulan laporan mengalami tekanan harga/inflasi sebesar 0,32% (q-t-q). Inflasi pada triwulan laporan disumbang oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok sarana & penunjang transportasi sebesar 0,55% dan sub kelompok transportasi sebesar 0,38%. Sedangkan sub

kelompok jasa keuangan dan sub kelompok komunikasi & pengiriman tidak mengalami perubahan harga di triwulan laporan (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Transportasi, Komunkasi & Jasa Keuangan	0,31	0,10	0,17	0,50	0,81	-0,08	0,32
Transportasi	0,37	0,09	-0,05	0,56	1,04	-0,11	0,38
Komunikasi & Pengiriman	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sarana & Penunjang Transportasi	0,00	0,44	4,37	1,25	0,00	0,00	0,55
Jasa Keuangan	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Pada triwulan IV-2007 kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,62% (q-t-q). Angka inflasi tersebut lebih tinggi dari tripulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,57%. Sub kelompok obat-obatan merupakan penyumbang terbesar pada kelompok kesehatan dengan angka inflasi sebesar 6,76%, disusul kemudian sub kelompok perawatan jasmani & kosmetik sebesar 3,21%, dan sub kelompok jasa kesehatan sebesar 0,56%. Sementara itu, sub kelompok jasa perawatan & jasmani tidak mengalami perubahan harga (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (q-t-q, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Kesehatan	-0,18	0,32	1,56	0,40	3,65	1,57	2,62
Jasa Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1,29	6,07	2,24	0,56
Obat-obatan	2,32	0,00	-2,98	2,06	5,76	0,34	6,76
Jasa Perawatan & Jasmani	0,00	4,22	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
Perawatan Jasmani & Kosmetik	-0,69	0,12	3,24	-0,36	2,58	1,61	3,21

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Harga obat yang mengalami peningkatan, seperti obat batuk, obat sakit kepala, obat gosok, obat dengan resep dan vitamin, secara umum menyebabkan inflasi pada sub kelompok obat-obatan. Persentase kenaikan harga obat berkisar antara 5-15%. Kenaikan harga obat tersebut dikarenakan harga bahan baku obat yang juga naik. Informasi dari Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, menyatakan bahwa harga bahan baku obat naik sejak triwulan I-2007, diantaranya bahan baku amoksisilin yang naik dari US\$30/kg menjadi lebih dari US\$60/kg, sedangkan komponen lain naik sekitar 6%. Untuk komoditi-komoditi yang masuk dalam sub kelompok perawatan jasmani & kosmetik, umumnya karena pengaruh harga *crude palm oil* (CPO) yang masih relatif tingginya. Tingginya harga CPO sebagai bahan baku pembuatan produk perawatan jasmani & kosmetik, berdampak terhadap naiknya harga sabun, pasta gigi dan shampoo pada triwulan laporan.

Pada triwulan IV-2007, kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga mengalami penurunan angka inflasi apabila dibandingkan triwulan sebelumnya. Di triwulan laporan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,93% (*q-t-q*), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,69%. Inflasi yang terjadi merupakan sumbangan dari inflasi pada sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 5,61%, sub kelompok olahraga sebesar 2,49% dan sub kelompok rekreasi sebesar 1,56%. Sementara itu, sub kelompok jasa pendidikan dan sub kelompok kursus pelatihan tidak mengalami perubahan harga pada triwulan laporan (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	1,57	5,46	0,34	0,46	-0,26	1,69	0,93
Jasa Pendidikan	0,15	8,45	0,82	0,00	0,00	2,29	0,00
Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	4,62	-0,80	0,52	0,00	-2,26	3,86	5,61
Rekreasi	5,09	0,38	-1,46	-1,16	0,00	-1,37	1,56
Olahraga	0,00	4,21	0,26	0,00	0,00	0,00	2,49

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Pada triwulan laporan, buku tulis bergaris dan kertas HVS, yang masuk dalam sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan, mengalami inflasi masing-masing sebesar 16,66% dan 5,88%. Adanya penurunan pasokan kayu alam sebagai bahan baku kertas merupakan faktor penyebab naiknya harga produk kertas. Selain itu, produk lainnya yang terkait dengan kertaspun turut mengalami peningkatan, seperti majalah, surat kabar harian dan tabloid yang tergabung dalam sub kelompok rekreasi.

Kelompok sandang pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 2,03% (*q-t-q*) atau lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 2,50%. Inflasi yang terjadi pada kelompok sandang berasal dari sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya sebesar 4,31%, sub kelompok sandang laki-laki sebesar 1,45%, sub kelompok sandang anak-anak sebesar 0,64% dan sub kelompok sandang wanita sebesar 0,28% (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (*q-t-q*, %)

Kelompok / Subkelompok	2006			2007			
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Sandang	5,28	0,80	2,06	1,16	0,22	2,50	2,03
Sandang Laki-laki	1,50	1,33	1,73	0,09	0,94	2,36	1,45
Sandang Wanita	5,29	0,54	1,09	0,45	0,27	1,10	0,28
Sandang Anak-anak	1,35	1,55	1,95	0,14	-0,45	0,62	0,64
Barang Pribadi, Sandang lainnya	9,58	0,38	3,13	2,86	-0,03	4,47	4,31

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah.

Inflasi yang terjadi pada komoditi emas perhiasan masih mendominasi inflasi sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya pada kelompok sandang. Masih relatif tingginya harga emas internasional mengakibatkan harga emas domestik bertahan di harga yang relatif tinggi. Pada posisi 18 Desember 2007, harga emas 24 karat sebesar Rp600.000/emas, emas dengan kadar 75% sebesar Rp220.000/gram dan emas dengan kadar 70% sebesar Rp200.000/gram. Pada triwulan laporan, harga beberapa produk sandang juga mengalami peningkatan. Peningkatan harga terjadi pada produk sandang laki-laki, wanita dan anak-anak. Kenaikan harga tersebut terkait dengan meningkatnya permintaan dalam rangka menyambut dan merayakan hari raya keagamaan, terutama pada produk kain sarung, mukena dan jilbab.

2.5. Komoditi dan Jasa Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar

Dilihat secara lebih spesifik, komoditi-komoditi yang merupakan penyumbang inflasi terbesar (total sumbangan sebesar 2,91%) pada triwulan IV-2007 (q-t-q), antara lain adalah : beras dengan sumbangan inflasi sebesar 0,60%, selanjutnya adalah cabe merah (0,54%), bawang merah (0,33%), ketupat/lontong sayur (0,24%), kayu balokan (0,18%), rokok putih (0,18%), rokok kretek (0,10%), emas perhiasan (0,09%), minyak goreng (0,09%), kelapa (0,07%), petai (0,06%), tempe (0,05%), bensin (0,05%), roti tawar (0,05%), teh manis (0,05%), bubur kacang hijau (0,05%), semen (0,05%), mie kering instan (0,05%), tomat sayur (0,04%), dan kol putih/kubis sebesar 0,04% (Tabel 2.11).

Tabel 2.11 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw III/07		Komoditi	Tw IV/07	
		Inflasi	Sumb.		Inflasi	Sumb.
1	Tongkol	9,59%	0,19%	Beras	7,91%	0,60%
2	Rokok Kretek Filter	6,82%	0,18%	Cabe Merah	22,70%	0,54%
3	Pepaya	63,63%	0,16%	Bawang Merah	64,49%	0,33%
4	Telur Ayam Ras	20,71%	0,16%	Ketupat / Lontong Sayur	13,57%	0,24%
5	SLTA	19,11%	0,15%	Kayu Balokan	67,86%	0,18%
6	Minyak Goreng	8,28%	0,14%	Rokok Putih	20,13%	0,18%
7	Tempat Tidur	42,86%	0,13%	Rokok Kretek	5,93%	0,10%
8	Sewa Rumah	5,17%	0,13%	Emas Perhiasan	4,31%	0,09%
9	Emas Perhiasan	5,34%	0,11%	Minyak Goreng	4,83%	0,09%
10	Rokok Kretek	5,14%	0,08%	Kelapa	7,45%	0,07%
11	Tahu Mentah	13,64%	0,08%	Petai	50,12%	0,06%
12	Jeruk	13,14%	0,06%	Tempe	30,00%	0,05%
13	Daging Ayam Ras	5,30%	0,06%	Bensin	1,72%	0,05%
14	Soto	15,38%	0,06%	Roti Tawar	11,82%	0,05%
15	Tomat Sayur	36,01%	0,06%	T e h Manis	16,67%	0,05%
16	Cabe Merah	1,99%	0,05%	Bubur Kacang Hijau	24,29%	0,05%
17	Kentang	11,79%	0,04%	Semen	10,25%	0,05%
18	Rokok Putih	4,28%	0,04%	Mie Kering Instan	16,46%	0,05%
19	Meja Kursi Tamu	12,50%	0,04%	Tomat Sayur	19,13%	0,04%
20	Alpukat	54,54%	0,04%	Kol Putih/Kubis	29,91%	0,04%
	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi		1,93% 0,13%	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi		2,91% 0,14%
		2,06%			3,05%	

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

Selain terdapat komoditi/jasa yang mengalami inflasi, pada triwulan IV-2007 terdapat pula beberapa komoditi/jasa yang mengalami deflasi. Komoditi-komoditi yang mengalami deflasi terbesar, dengan total sumbangan sebesar -0,62%, diantaranya adalah ikan tongkol dengan sumbangan deflasi sebesar -0,26%, selanjutnya adalah pepaya (-0,07%), daging ayam ras (-0,05%), tuna (-0,03%), sepeda motor (-0,03%), daun singkong (-0,03%), kangkung (-0,03%), dendeng (-0,02%) dan kentang (-0,02%). Sedangkan bedak, jeruk, bawang putih, anggur, wortel, ikan teri, gula pasir, televisive berwarna, telur ayam ras, pakis dan hati sapi masing-masing menyumbang deflasi sebesar -0,01% (Tabel 2.12).

Tabel 2.12 Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar Terhadap Inflasi/Deflasi Kota Padang (q-t-q)

No.	Komoditi	Tw III/07		Komoditi	Tw IV/07	
		Deflasi	Sumb.		Deflasi	Sumb.
1	Beras	-1,61%	-0,13%	Tongkol	-12,50%	-0,26%
2	Jengkol	-37,61%	-0,12%	Pepaya	-16,67%	-0,07%
3	Pisang	-20,00%	-0,10%	Daging Ayam Ras	-3,69%	-0,05%
4	SLTP	-11,79%	-0,06%	Tuna	-6,78%	-0,03%
5	Petai	-16,71%	-0,03%	Sepeda Motor	-3,58%	-0,03%
6	Bawang Merah	-4,37%	-0,02%	Daun Singkong	-13,45%	-0,03%
7	Gula Pasir	-2,03%	-0,02%	Kangkung	-5,39%	-0,03%
8	Salak	-15,91%	-0,02%	Dendeng	-9,09%	-0,02%
9	Sekolah Dasar	-6,15%	-0,02%	Kentang	-7,05%	-0,02%
10	Bawang Putih	-8,83%	-0,02%	Bedak	-4,17%	-0,01%
11	Bensin	-0,43%	-0,01%	Jeruk	-1,93%	-0,01%
12	Televisi Berwarna	-6,55%	-0,01%	Bawang Putih	-6,45%	-0,01%
13	Udang Basah	-4,35%	-0,01%	Anggur	-6,64%	-0,01%
14	Sabun Cream Detergen	-3,32%	-0,01%	Wortel	-8,05%	-0,01%
15	Asam	-11,11%	-0,01%	Teri	-7,14%	-0,01%
16	-	-	-	Gula Pasir	-0,87%	-0,01%
17	-	-	-	Televisi Berwarna	-3,72%	-0,01%
18	-	-	-	Telur Ayam Ras	-0,66%	-0,01%
19	-	-	-	Pakis	-8,89%	-0,01%
20	-	-	-	Hati Sapi	-2,80%	-0,01%
	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi	2,06%	-0,58% 2,64%	Total Sumbangan Komoditi lain Inflasi	3,05%	-0,62% 3,67%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, diolah

BAB III

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Kegiatan usaha perbankan di Sumatera Barat sampai dengan akhir November 2007 menunjukkan tren yang positif baik dari sisi penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun risiko usaha.

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun perbankan terus meningkat dan diikuti pula oleh pertumbuhan kredit yang disalurkan. Yang lebih menggembirakan adalah kredit yang berasal dari luar wilayah Sumbar tumbuh lebih tinggi daripada kredit yang disalurkan perbankan wilayah Sumbar. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit menurut lokasi proyek lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit menurut bank pelapor (tabel 3.1). Faktor yang mempengaruhi peningkatan penghimpunan dana antara lain akselerasi kegiatan ekonomi, membaiknya pendapatan masyarakat, serta peningkatan simpanan milik pemerintah daerah. Sementara itu, kegiatan yang meningkat juga mempengaruhi peningkatan penyaluran kredit sehingga kebutuhan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi masyarakat meningkat. Peningkatan kegiatan usaha perbankan tersebut ternyata tidak meningkatkan risiko bisnis perbankan. Rasio NPL gross terus mengalami penurunan setelah sempat meningkat pada pertengahan tahun 2007. Menurunnya risiko bisnis perbankan ini dipengaruhi oleh peningkatan pelunasan kredit, restrukturisasi kredit, serta penyaluran kredit yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tabel 3.1. Perkembangan Beberapa Indikator Perbankan

Indikator Perbankan	Mar'07	Jun'07	Sep'07	Nov'07
DPK (Rp Juta)	11,424,187	12,095,791	12,663,389	13,921,205
Pert.(%,q-t-q)	3.67%	5.88%	4.69%	9.93%
Kredit menurut Lokasi Proyek (Rp Juta)	9,924,547	10,890,662	11,704,936	12,575,771
Pert.(%,q-t-q)	3.89%	9.73%	7.48%	7.44%
Kredit menurut Bank Pelapor (Rp Juta)	9,106,812	10,036,715	10,470,123	10,883,997
Pert.(%,q-t-q)	1.93%	10.21%	4.32%	3.95%
LDR menurut Lokasi Proyek (%)	86.87%	90.04%	92.43%	90.34%
LDR menurut Bank Pelapor (%)	79.72%	82.98%	82.68%	78.18%
NPL menurut Bank Pelapor (%)	3.48%	3.67%	3.01%	2.89%

Sumber : SEKDA dan Laporan Bulanan Bank Umum

3.1. Intermediasi Perbankan

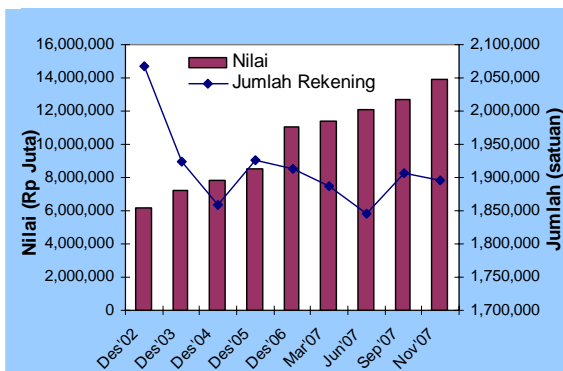
Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan dan jumlah kredit yang disalurkan perbankan pada triwulan IV-2007 menunjukkan peningkatan daripada triwulan sebelumnya. Posisi DPK pada triwulan IV-2007 tumbuh lebih ekspansif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan posisi DPK yang ekspansif didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan. Akselerasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi serta peningkatan pendapatan masyarakat diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan DPK. Sementara itu, posisi kredit yang disalurkan perbankan ke perekonomian Sumbar tumbuh cukup tinggi sebesar 7,44%. Peningkatan posisi kredit tersebut berasal dari akselerasi penyaluran kredit investasi, serta meningkatnya kredit modal kerja dan konsumtif. Tumbuhnya kredit investasi berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp 427,94 milyar menunjukkan bahwa ekspektasi bisnis Sumatera Barat semakin membaik.

3.1.1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 tumbuh lebih ekspansif dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi DPK bank umum bulan November tumbuh Rp 1,25 triliun atau 9,93% dibandingkan posisi September 2007. Secara nominal pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada komponen tabungan yang tumbuh Rp 460,21 milyar, sementara secara persentase pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada komponen giro sebesar 10,45%. Meskipun secara nominal DPK terus mengalami pertumbuhan, namun secara jumlah rekening justru terus mengalami penurunan (grafik 3.3-3.4). Jumlah rekening tabungan menurun 0,6%, rekening deposito menurun 0,25%, dan rekening giro turun 0,17%. Penurunan jumlah rekening ini menunjukkan kualitas masing-masing rekening DPK semakin meningkat. Meskipun demikian, penurunan jumlah rekening DPK ini mengindikasikan bahwa akses perbankan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan. Tahun edukasi perbankan yang diluncurkan pada tahun ini sebagai pelaksanaan pilar ke 6 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan sarana yang bagus untuk meningkatkan akses perbankan terhadap masyarakat.

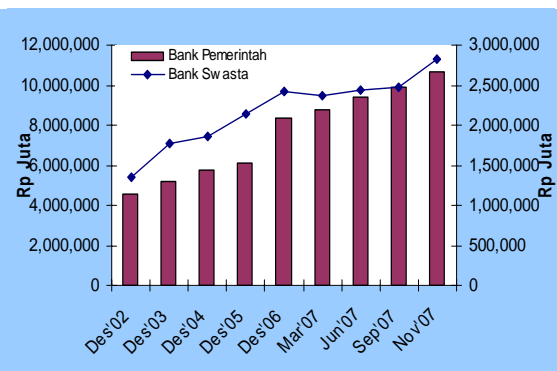
Bank swasta lebih ekspansif dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Meskipun secara nominal pengumpulan dana masyarakat oleh bank swasta masih

lebih kecil dibandingkan bank pemerintah, namun pertumbuhan posisi DPK oleh bank swasta secara persentase lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan posisi DPK oleh bank pemerintah (grafik 3.2). Posisi DPK bank swasta tumbuh 14,10% sementara posisi DPK bank pemerintah meningkat 7,65%. Semakin beragamnya produk dan fasilitas tabungan yang ditawarkan bank-bank swasta serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank swasta diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan DPK bank swasta.



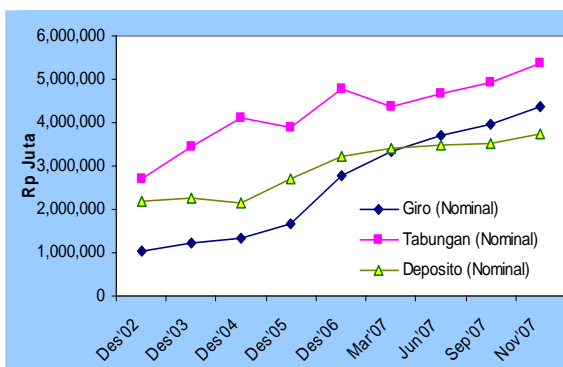
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.1. Perkembangan Nilai dan Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Bank Umum



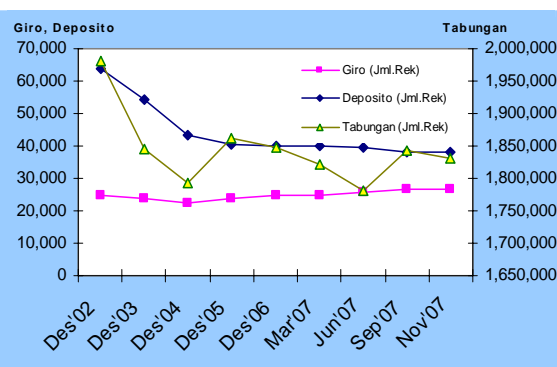
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.2. Perkembangan Nilai Dana Pihak Ketiga Bank Umum Menurut Kelompok Bank



Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.3. Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga (Nominal)

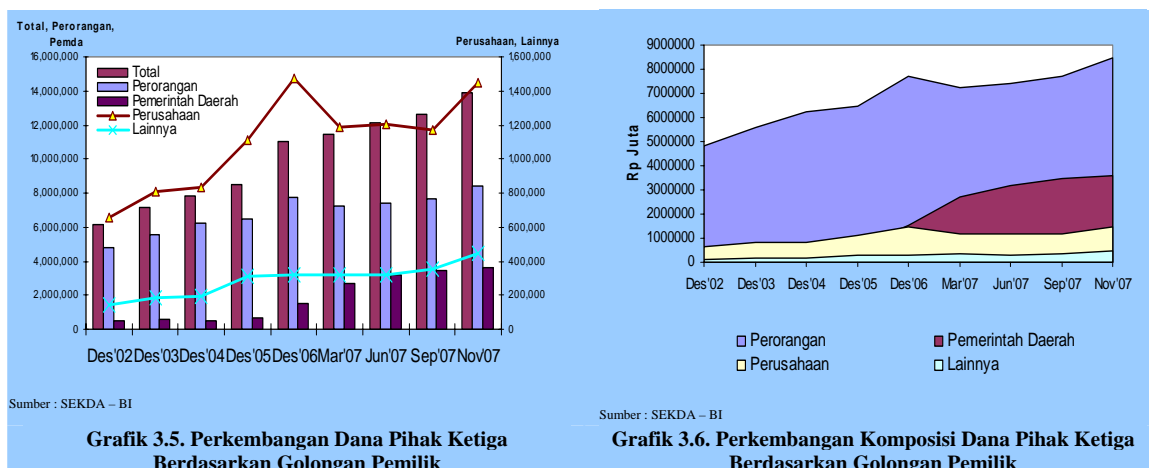


Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.4. Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga (Jumlah Rekening)

Seiring dengan pertumbuhan giro yang ekspansif, simpanan perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi (grafik 3.5). Simpanan perusahaan meningkat 19,27% atau Rp 279,50 miliar, dari Rp 1,17 triliun (September 2007) menjadi Rp 1,45 triliun (November 2007). Peningkatan simpanan perusahaan ini diperkirakan terjadi karena peningkatan realisasi kredit dan kegiatan usaha yang meningkat selama triwulan IV-2007. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, porsi kepemilikan dana masyarakat di perbankan

masih didominasi oleh kelompok perorangan. Yang cukup menarik dicermati adalah masih tingginya *share* dana milik pemerintah daerah selama tahun 2007. Selama tahun 2002-2006, *share* dana pemerintah daerah terhadap total DPK relatif kecil, namun sejak tahun 2007 terjadi peningkatan yang cukup tinggi (grafik 3.6). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami keterlambatan dalam melakukan realisasi belanja APBD, meskipun dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat telah dilakukan sejak awal tahun.

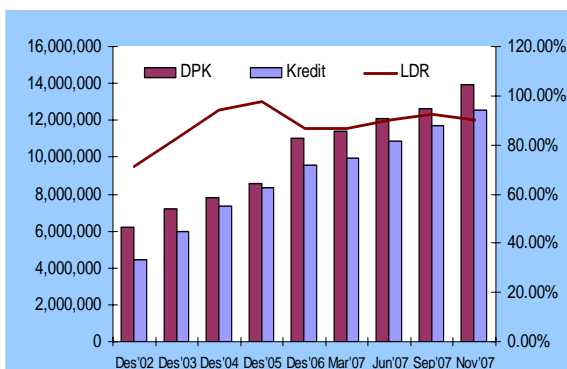


3.1.2. Penyaluran Kredit

Peningkatan Dana Pihak Ketiga yang ekspansif pada triwulan IV-2007 diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang cukup tinggi (grafik 3.7). Posisi kredit bank umum berdasarkan lokasi proyek per November 2007 tumbuh 7,44% dibandingkan posisi September 2007 hingga menjadi Rp 12,57 triliun. Dilihat dari sisi kelompok bank penyalur kredit, seperti halnya penyaluran kredit, bank swasta terlihat lebih ekspansif (grafik 3.9-3.10). Jika posisi kredit yang disalurkan bank pemerintah hanya tumbuh 3,57%, maka posisi kredit yang disalurkan bank swasta tumbuh 11,97%. Secara nominal, kredit bank swasta juga tumbuh lebih kencang. Pertumbuhan posisi kredit bank swasta periode September-November 2007 mencapai Rp 385,34 miliar sementara bank pemerintah hanya Rp 291,97 milyar. Pertumbuhan kredit bank swasta yang ekspansif menggerogoti pangsa kredit yang disalurkan bank pemerintah.

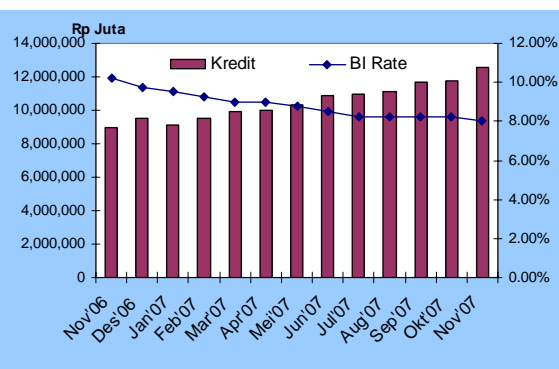
Tren penurunan BI rate diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong penyaluran kredit perbankan di Sumatera Barat selain faktor akselerasi

pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari berkorelasinya arah penurunan BI Rate dengan arah pertumbuhan kredit (grafik 3.8). Analisis lebih lanjut mengenai transmisi kebijakan moneter terhadap kredit perbankan di Sumatera Barat melalui Bank Lending Channel dapat dibaca pada boks di akhir bab III ini.



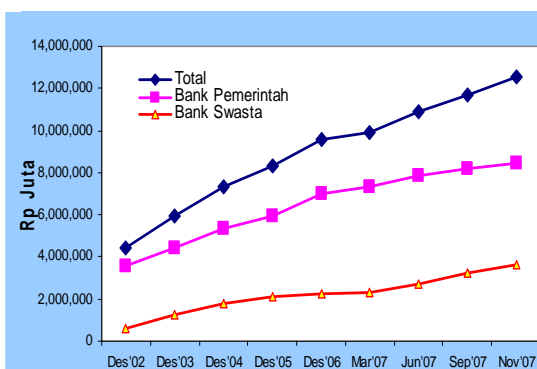
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.7. Perkembangan DPK, Kredit (Lokasi Proyek) dan LDR



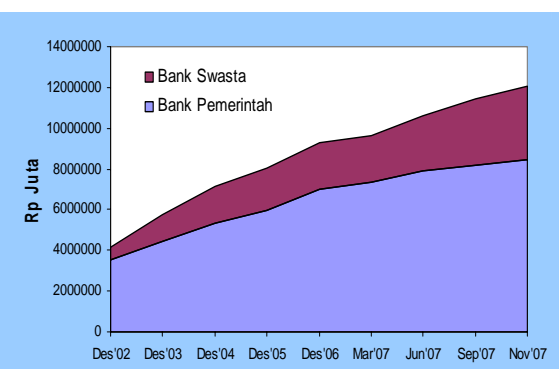
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.8. Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) dan BI Rate



Sumber : SEKDA – BI

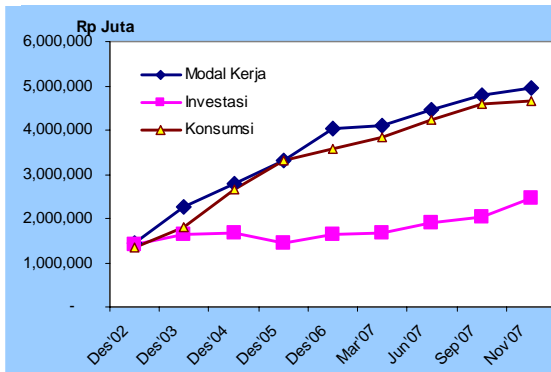
Grafik 3.9. Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) menurut Kelompok Bank



Sumber : SEKDA – BI

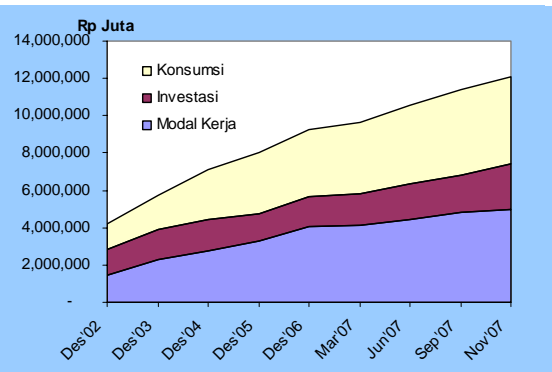
Grafik 3.10. Perkembangan Share Kredit (Lokasi Proyek) Bank Pemerintah dan Bank Swasta

Berdasarkan lokasi proyek, kredit investasi meningkat paling tinggi dibandingkan kredit menurut jenis penggunaan lainnya (grafik 3.11-3.12). Secara nominal, kredit investasi pada posisi November 2007 tumbuh Rp 427,94 milyar atau 21,03% dibandingkan posisi September 2007 menjadi Rp 2,46 triliun. Kredit modal kerja juga tumbuh cukup tinggi sebesar Rp 170,84 milyar atau 3,57% menjadi Rp 4,96 triliun. Pertumbuhan ekspansif kredit investasi meningkatkan pangsa kredit investasi terhadap total kredit dari 17,84% (September 2007) menjadi 20,39% (November 2007).



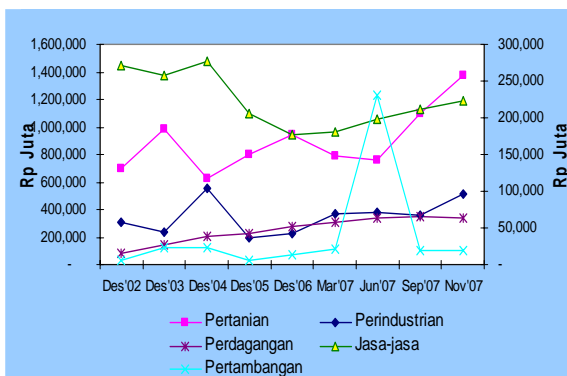
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.11. Perkembangan Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Jenis Penggunaan



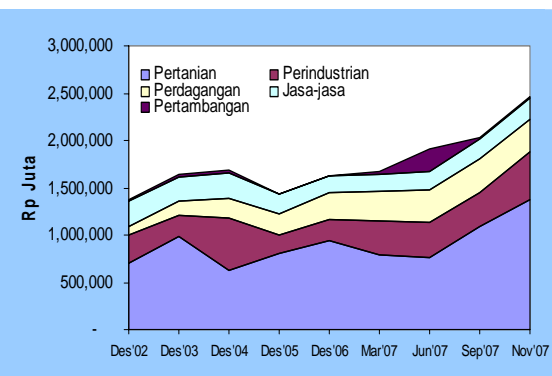
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.12. Perkembangan Share Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Jenis Penggunaan



Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.13. Perkembangan Kredit Investasi (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama



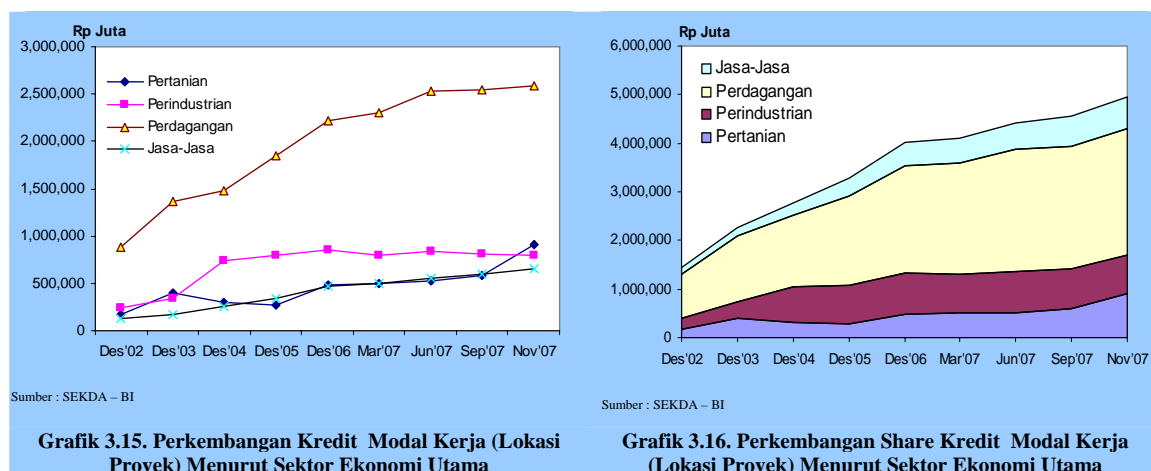
Sumber : SEKDA – BI

Grafik 3.14. Perkembangan Share Kredit Investasi (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi Utama

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sektor pertanian mendorong penyaluran kredit investasi perbankan ke sektor tersebut. Posisi kredit investasi bank umum yang disalurkan ke sektor pertanian bulan November 2007 meningkat Rp 281,93 milyar atau 25,81%. Secara nominal, pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya (grafik 3.15). Hal ini mengakibatkan sektor pertanian menjadi sektor yang paling dituju perbankan dalam menyalurkan kredit investasi.

Dalam hal penyaluran kredit modal kerja, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan tertinggi selama triwulan IV-2007. Jika posisi kredit modal kerja untuk sektor perdagangan hanya mampu tumbuh 7,43%, maka pertumbuhan posisi kredit modal kerja untuk sektor pertanian tumbuh hingga 54,39% (grafik 3.13). Posisi kredit modal kerja untuk sektor pertanian pada bulan November 2007 tercatat sebesar Rp 909,20 milyar. Pertumbuhan posisi kredit modal kerja untuk sektor pertanian yang cukup tinggi ini mendongkrak pangsa kredit modal kerja

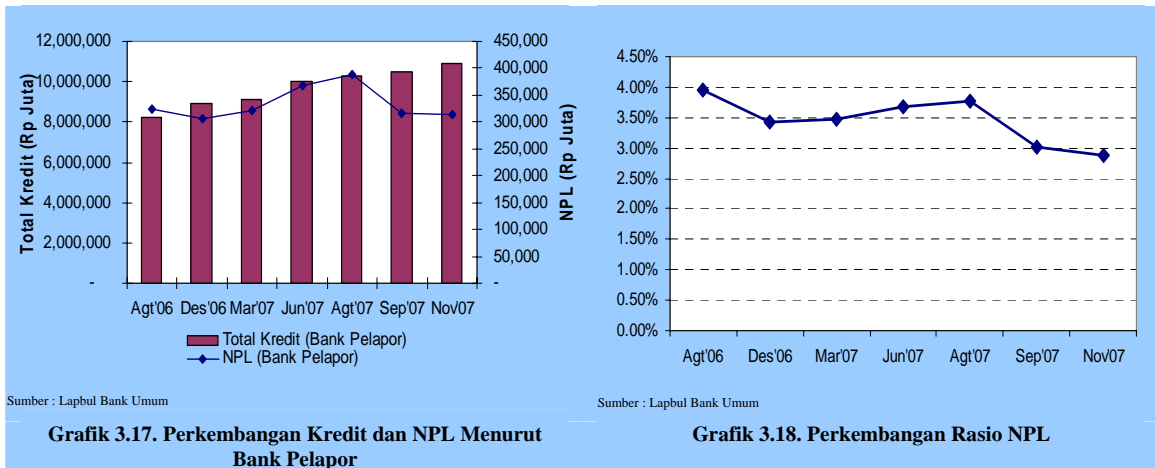
sektor pertanian dari 12,94% pada September 2007 menjadi 18,40% pada November 2007 (grafik 3.14)



3.2. Risiko Kredit Perbankan

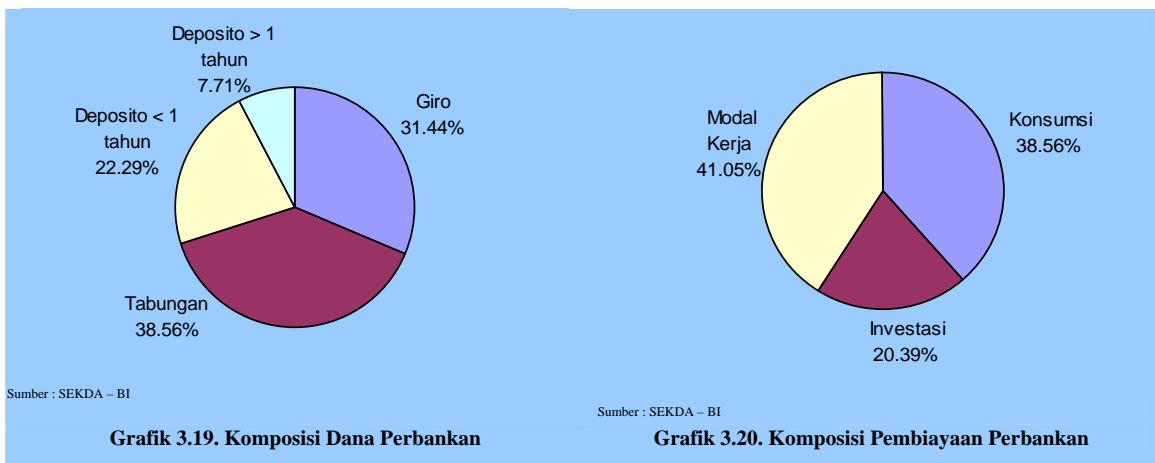
Risiko kredit perbankan Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 terus mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat diikuti dengan pengelolaan kredit yang relatif baik. Meskipun kredit yang disalurkan terus meningkat, kredit *non performing* terus mengalami penurunan (grafik 3.17). Hal ini mengakibatkan rasio NPL gross pada triwulan IV-2007 terus menurun meskipun sempat meningkat pada bulan Agustus 2007. Rasio NPL gross bank umum pada bulan November 2007 tercatat sebesar 2,89%, jauh di bawah batas aman NPL yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%.

Efek gempa bumi 12 September 2007 terhadap kualitas kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat relatif kecil. Gempa bumi 12 September 2007 yang menimpa beberapa wilayah di Sumatera Barat ternyata tidak menurunkan kualitas kredit perbankan. Rasio NPL bank umum justru terus menurun hingga November 2007. Justru gempa bumi diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan kredit konstruksi sebesar 19,92% dari Rp 186,48 milyar pada bulan September 2007 menjadi Rp 223,62 milyar pada bulan November 2007.



3.3. Risiko Likuiditas

Posisi dana perbankan masih didominasi oleh dana jangka pendek. Pada posisi November 2007, dana jangka panjang yang dikumpulkan bank umum hanya 7,71% (grafik 3.19). Deposito yang diharapkan dapat menjangkau dana jangka panjang masyarakat ternyata didominasi dengan deposito 1 bulan. Share deposito dengan jangka waktu 1 bulan mencapai 67,27%. Hal ini tentu menghambat penyaluran kredit investasi oleh perbankan. Jika ekspansi terhadap kredit investasi dilakukan akan meningkatkan risiko likuiditas perbankan.



Peningkatan dana milik pemerintah daerah di perbankan khususnya BPD Sumbar juga meningkatkan risiko likuiditas karena sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik untuk membiayai pemerintahan. Meskipun demikian BPD Sumbar terlihat cukup konservatif dimana dana pemda tersebut diperlakukan

bukan sebagai *loanable funds*. Dana tersebut disimpan sebagai *secondary reserves* dan ditempatkan di SBI yang bersifat sangat likuid.

3.4. Risiko Pasar

Risiko pasar perbankan Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 menunjukkan arah yang menurun. Risiko pasar adalah fluktuasi nilai aset yang disebabkan perubahan harga-harga pasar dan yields. Bagi bank risiko itu tercermin pada suku bunga dan sebagian pada nilai tukar. Untuk suku bunga, perbankan diuntungkan dengan fleksibelnya suku bunga DPK, sementara suku bunga kredit relatif lebih rigid. Hal ini tercermin pada perbankan Sumbar, dimana meski terjadi tren penurunan suku bunga namun net interest yang diperoleh tiap bulan justru meningkat (tabel 3.2). Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan suku bunga relatif tidak berpengaruh terhadap risiko pasar.

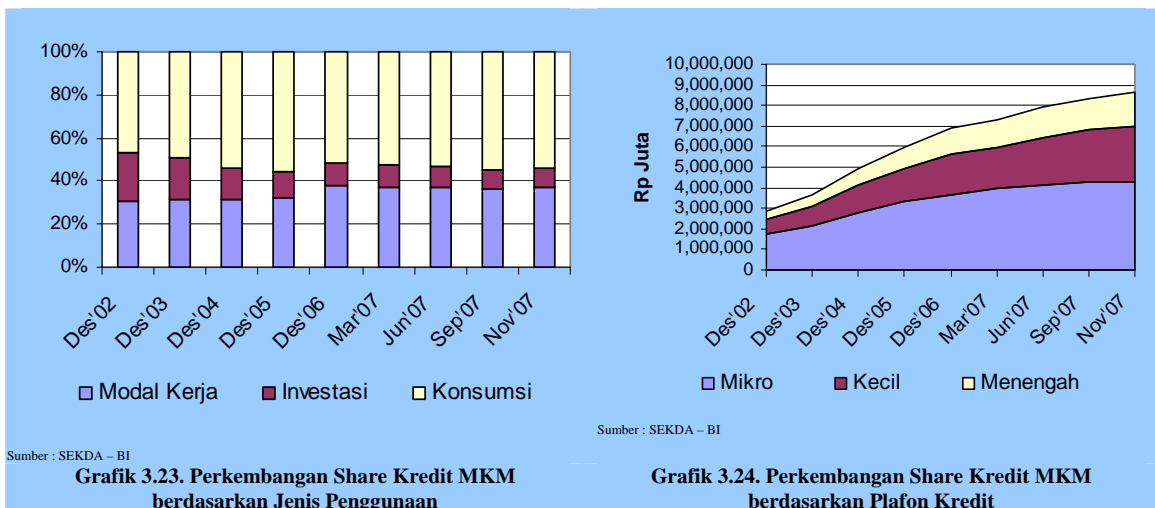
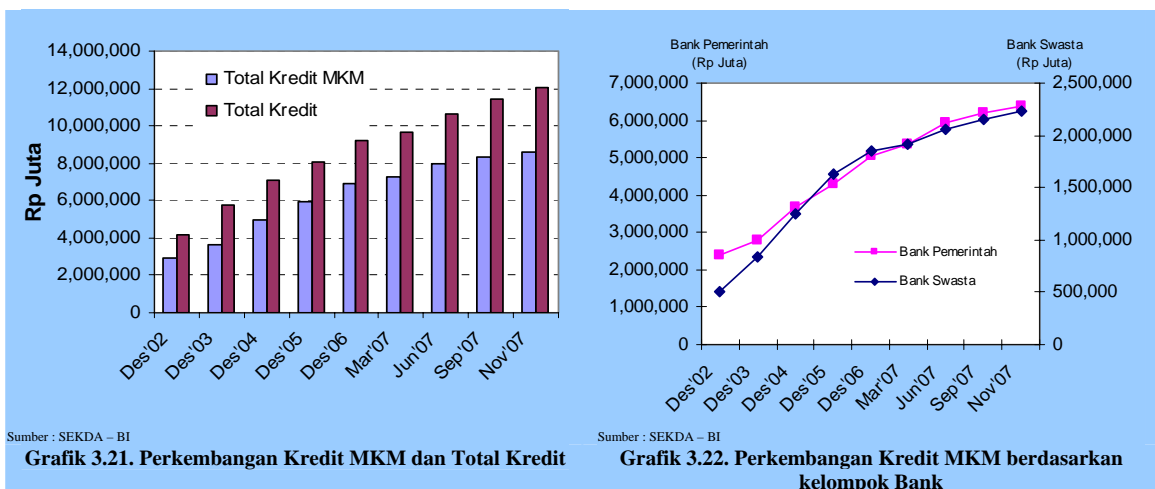
Tabel 3.2. Perkembangan Net Interest Bank Umum

Bulan	Pendapatan Bunga	Beban Bunga	Net Interest
Jan-07	127,421	54,450	72,971
Feb-07	123,533	52,052	71,481
Mar-07	137,913	57,132	80,781
Apr-07	133,026	51,889	81,137
May-07	135,103	53,246	81,857
Jun-07	132,805	52,659	80,146
Jul-07	138,445	53,603	84,842
Aug-07	140,946	55,634	85,312
Sep-07	136,588	52,865	83,723
Oct-07	139,602	55,756	83,846
Nov-07	140,083	52,723	87,360

Meskipun demikian, perbankan harus mewaspadaai pengaruh ekonomi global berupa kenaikan harga minyak dunia, resesi ekonomi yang melanda Amerika Serikat, serta kenaikan harga pangan. Kenaikan harga minyak dunia ternyata memicu kenaikan harga emas dunia hingga menembus rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 850 per ounce. Hal ini mengakibatkan harga emas di Sumatera Barat juga mengalami peningkatan. Pada awal Januari 2008, harga emas di Pasar Raya Padang sempat mencapai Rp 700 ribu per emas. Jika hal ini terus berlanjut sementara tekanan inflasi juga meningkat akibat kenaikan harga pangan atau kenaikan harga barang impor, maka nasabah bank dapat melakukan pengambilan dananya di bank dan menukarnya dengan emas.

3.5. Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) Lokasi Proyek

Pertumbuhan kredit MKM pada triwulan IV-2007 sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (grafik 3.21). Kredit MKM bank umum berdasarkan lokasi proyek pada bulan November 2007 tercatat sebesar Rp 8,64 triliun dengan pangsa sebesar 71,48%. Baik bank pemerintah maupun bank swasta juga mencatat perlambatan pertumbuhan kredit MKM dengan angka pertumbuhan kredit MKM masing-masing sebesar 2,87% dan 4,12% (grafik 3.22). Hal ini berbeda dengan triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan kredit MKM yang disalurkan bank pemerintah bisa mencapai 5,18%.



Pada kredit MKM, kredit investasi justru menurun. Berbeda dengan penyaluran kredit secara total, posisi kredit MKM untuk investasi mengalami penurunan 0,17%. Kredit modal kerja meningkat sebesar 6,17% sementara kredit konsumsi meningkat 1,80%. Akibatnya, share kredit investasi terus menciut (grafik

3.23). Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan investasi terjadi pada proyek-proyek besar terutama proyek-proyek perkebunan. Peningkatan kredit modal kerja diperkirakan terjadi karena peningkatan kegiatan ekonomi selama triwulan IV-2007.

Kredit mikro masih mendominasi penyaluran kredit MKM. Penyaluran kredit mikro pada bulan November 2007 tercatat sebesar Rp 4,29 triliun atau 49,69% (grafik 3.23). Meskipun demikian, pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada kredit kecil dengan kenaikan sebesar 6,96% menjadi Rp 2,70 triliun. Melambatnya pertumbuhan kredit mikro diperkirakan terjadi karena alternatif pembiayaan bagi usaha mikro semakin banyak dan berkembang antara lain melalui lembaga keuangan non bank, koperasi, maupun kredit *channelling* yang dilakukan pemerintah daerah.

3.6. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Peningkatan kegiatan usaha pada bank umum juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat. Beberapa indikator BPR menunjukkan kegiatan intermediasi yang dilakukan BPR terus mengalami perbaikan. Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan BPR pada posisi November 2007 tercatat sebesar Rp 469,59 milyar atau tumbuh 10,68% dibandingkan posisi September 2007. Dibandingkan posisi tahun sebelumnya DPK BPR tumbuh hampir separuhnya atau 42,88% (tabel 3.3). Peningkatan DPK BPR ini juga searah dengan peningkatan DPK bank umum. Hal ini mengindikasikan peningkatan pendapatan masyarakat relatif menyebar hingga nasabah BPR yang tersebar di pelosok Sumbar.

Tabel 3.3. Perkembangan Beberapa Indikator BPR

Indikator	Nov'06	Sep'07	Nov'07	Pertumbuhan (%)	
				y-o-y	q-t-q
Asset	529.771.370	682.093.866	741.207.930	39,91	8,67
Kredit	367.633.335	524.265.039	541.764.015	47,37	3,34
DPK	328.659.795	424.283.651	469.591.800	42,88	10,68
LDR	111,86%	123,56%	115,37%		
Modal Disetor	45.856.869	59.364.322	60.889.731	32,78	2,57

Sumber : Lapbul BPR

Peningkatan DPK langsung direspon dengan peningkatan kredit. Posisi kredit yang disalurkan BPR per November 2007 tercatat sebesar Rp 541,76 milyar

atau meningkat 47,37% dibandingkan posisi November 2007 (tabel 3.3). Pertumbuhan kredit BPR yang ekspansif meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dari 111,86% pada November 2006 menjadi 115,37% pada November 2007.

Membaiknya proses intermediasi perbankan oleh BPR meningkatkan jumlah modal disetor BPR. Modal disetor BPR pada bulan November 2007 tercatat sebesar Rp 60,89 milyar atau tumbuh 32,78% dibandingkan posisi November 2006. Salah satu faktor yang turut mendorong pertumbuhan kegiatan usaha BPR adalah linkage program yang dilakukan antara BPD Sumbar dengan beberapa BPR di Sumatera Barat. Linkage program adalah suatu bentuk kerjasama antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam membiayai Usaha Mikro dan Kecil (UMK), baik dalam bentuk/pola *executing*, *channeling* atau *joint financing*. Dalam hal ini BPR bertindak sebagai bank pelaksana (*executor*) atau *agent* sesuai pola kerjasama yang dilakukan. Peningkatan linkage program ini terlihat cukup pesat dimana dalam waktu dua tahun terjadi peningkatan penyaluran kredit dari BPD Sumbar ke BPR melalui pola linkage program sebesar Rp 8,3 milyar. Posisi plafon kredit melalui linkage program per November 2007 tercatat sebesar Rp 11,1 milyar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia melalui Jalur Kredit Perbankan (*Bank Lending Channel*) di Sumatera Barat

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya BI-rate sebagai suku bunga acuan moneter oleh Bank Indonesia pada Juli 2005, perbankan nasional menunjukkan respon yang positif. Hal ini terlihat dari penentuan suku bunga pasar yang mengacu kepada BI-rate, seperti suku bunga deposito dan PUAB. Adapun suku bunga kredit pada umumnya juga akan mengikuti pergerakan suku bunga deposito.

Efek dari kebijakan moneter BI terhadap pergerakan suku bunga tidak hanya berlaku secara nasional, namun juga secara regional. Penelitian secara nasional telah banyak dikaji, sedangkan penelitian efek BI-rate dalam skala regional masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, dirasakan perlu melihat respon suku bunga pasar secara regional terhadap suku bunga kebijakan moneter atau BI-rate.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan moneter Bank Indonesia dapat ditransmisikan melalui jalur kredit perbankan (*Bank Lending Channel*) di wilayah Sumatera Barat dan apakah karakteristik bank mempengaruhi dalam efektivitas transmisi kebijakan tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan yakni *panel data* dengan *cross section*. Periode data yang diteliti yaitu dalam rentang waktu Januari 2001 hingga Desember 2006 (*time series*). Peneliti menggunakan model yang dikembangkan Ehrmann et al (2001) untuk *asymmetric responses* kredit bank pada suku bunga kebijakan, PDB, dan harga dengan memasukan variabel-variabel yang berinteraksi dengan karakteristik bank. Model dinamis dengan *first difference* sebagai berikut:

$$\Delta \log(L_{it}) = a_i + \sum_{j=1}^l b_j \Delta \log(L_{it-j}) + \sum_{j=0}^l c_j \Delta r_{t-j} + \sum_{j=0}^l d_j \Delta \log(PDB_{t-j}) + \sum_{j=0}^l e_j \inf l_{t-j} + f x_{it-1} + \sum_{j=0}^l g_{1j} x_{it-1} \Delta r_{t-j} + \sum_{j=0}^l g_{2j} x_{it-1} \Delta \log(PDB_{t-j}) + \sum_{j=0}^l g_{3j} x_{it-1} \inf l_{t-j} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

$$i = 1, \dots, N$$

$$t = 1, \dots, J$$

N = jumlah bank

l = jumlah lag

L_{it} = kredit bank I pada kuartal t pada swasta non bank

Δr_t = first difference suku bunga nominal

$\Delta \log(PDB_t)$ = growth rate of real GDP

$\inf l_t$ = inflation rate

x_{it} = bank specific characteristic

Model di atas menggunakan *fixed effect across banks* dengan indikasi *bank specific intercept* = a_i . Untuk estimasi model dengan *complete set of time dummies*, persamaanya dimodifikasi sebagai berikut:

$$\Delta \log(L_{it}) = a_i + \sum_{j=1}^l b_j \Delta \log(L_{it-j}) + f x_{it-1} + \sum_{j=0}^l g_{1j} x_{it-1} \Delta r_{t-j} + \sum_{j=0}^l g_{2j} x_{it-1} \Delta \log(PDB_{t-j}) + \sum_{j=0}^l g_{3j} x_{it-1} \inf l_{t-j} + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan: λ_t = time dummies

Cakupan penelitian ini adalah bank umum yang beroperasi di Sumatera Barat dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Bank-bank yang telah tutup, merger, konversi, dan datanya tidak lengkap dikeluarkan dari *database*, sehingga tersisa 13 bank umum untuk dianalisis.

Data 13 bank umum kemudian dikelompokkan berdasarkan besarnya aset, tingkat likuiditas, dan pemilik (BUMN dan Non-BUMN), untuk mendapatkan efek karakteristik bank. Pembagian kelompok berdasarkan nilai aset dan likuiditas di atas dilakukan dengan *ad hoc* sesuai dengan data yang tercatat per Desember 2006.

Berdasarkan aset, bank dikelompokkan menjadi dua yaitu bank dengan aset besar (di atas Rp 400 milyar) dan bank dengan aset kecil (di bawah Rp 400 milyar). Sementara berdasarkan likuiditas, bank dibagi menjadi dua kelompok yaitu bank dengan likuiditas besar (di atas Rp 15 milyar) dan bank dengan likuiditas kecil (di bawah Rp 15 miliar). Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi dua kelompok yaitu bank umum milik negara (BUMN) termasuk Bank Pembangunan Daerah dan bank umum milik swasta. Peneliti mengelompokkan bank hanya menjadi dua kelompok pada masing-masing kategori karena keterbatasan jumlah sampel.

Berdasarkan pengelompokan di atas, terlihat bahwa keanggotaan bank dengan likuiditas besar sama dengan bank dengan aset besar. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa perilaku bank dengan aset dan likuiditas besar relatif sama.

4. Hasil Estimasi

4.1. Model Umum

Tujuan penelitian yang akan dijawab adalah apakah kebijakan moneter dapat ditransmisikan melalui jalur kredit perbankan di Sumatera Barat dan apakah karakteristik bank juga mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter di daerah. Untuk mengetahui efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan secara umum di Sumatera Barat, peneliti mengestimasi model (2) dengan memasukkan seluruh data 13 bank umum. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah karakteristik bank juga mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan, peneliti mengestimasi model (2) dengan memasukkan data bank dengan karakteristik yang sama sesuai dengan pengelompokan yang telah peneliti lakukan, antara lain menurut likuiditas/aset dan kepemilikan. Hasil ringkasan estimasi model dengan menggunakan fixed effect panel data terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Hasil estimasi koefisien secara umum

Variabel	Umum
BI Rate lag 8 bulan	-0.473*** (0.0789)
PDRB lag 6 bulan	5.891*** (0.368)
Inflasi lag 3 bulan	-0.008 (0.0098)
R ²	0.895
F-Stat	449.52***

Ket : */**/** melambangkan signifikansi pada level 10%/5%/1%
angka dalam kurung merupakan standar error

Hasil estimasi model secara umum menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan PDRB merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi nominal kredit yang disalurkan perbankan di Sumatera Barat sementara tingkat inflasi tidak signifikan. Secara umum, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan berjalan efektif di Sumatera Barat. Variabel suku bunga kebijakan BI Rate signifikan dengan tingkat kepercayaan 1% dengan koefisien -0,473%. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan hubungan negatif antara perubahan suku bunga kebijakan dengan perubahan nominal kredit yang disalurkan. Angka koefisien juga menunjukkan tingkat elastisitas perubahan Penurunan suku bunga kebijakan moneter sebesar 1% akan meningkatkan nominal kredit yang disalurkan perbankan 8 bulan berikutnya sebesar 0,473%.

PDRB merupakan variabel yang sangat signifikan dalam mempengaruhi nominal kredit di Sumbar. Tanda koefisien yang positif dan koefisien sebesar 5,891 menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Sumatera Barat sebesar 1% akan menaikkan nominal kredit yang disalurkan perbankan periode 6 bulan berikutnya sebesar 5,891%. Tingginya signifikansi PDRB dan tingginya elastisitas perubahan nominal kredit yang disalurkan perbankan terhadap perubahan PDRB menunjukkan bahwa posisi kredit yang disalurkan perbankan tergantung pada tingkat kegiatan ekonomi di Sumatera Barat. Semakin besar tingkat kegiatan ekonomi yang dilambungkan dengan PDRB akan meningkatkan permintaan kredit. Permintaan kredit yang meningkat akan segera direspon dengan penawaran kredit sehingga posisi LDR berdasarkan lokasi proyek di Sumatera Barat pada akhir 2006 mencapai 92,9%.

Tingginya signifikansi PDRB dalam mempengaruhi nominal kredit di Sumatera Barat dapat dikaitkan dengan perilaku perbankan yang "growth-led finance". Bank akan masuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang sedang meningkat. Hal ini dikuatkan dalam studi yang dilakukan Lukman et al (2007) yang menyimpulkan bahwa bank-bank di Sumatera Barat cenderung memprioritaskan debitur yang telah lama untuk dibiayai/penambahan fasilitas kredit daripada debitur baru.

Sementara itu, faktor inflasi secara umum tidak signifikan dalam mempengaruhi angka nominal kredit yang disalurkan perbankan di Sumatera Barat. Naik turunnya angka inflasi secara langsung tidak berdampak terhadap naik turunnya kredit yang disalurkan bank. Hal ini tampak pada saat terjadi shock inflasi di akhir tahun 2005 dan naik turunnya inflasi selama tahun 2006, posisi kredit modal kerja terus mengalami kenaikan dengan persentase yang cukup tinggi. Posisi kredit modal kerja pada akhir tahun 2006 meningkat 21,48% daripada posisi akhir tahun 2005, sementara pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi hanya sebesar masing-masing 3,77% dan 8,02%.

4.2. Karakteristik Bank

Untuk mengetahui apakah karakteristik bank berpengaruh terhadap efektivitas dan kecepatan respon terhadap kebijakan moneter, peneliti melakukan estimasi model (1) dengan memasukkan data bank secara terpisah menurut klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan aset/likuiditas bank serta kepemilikan bank. Peneliti memasukkan perbedaan kepemilikan bank berdasarkan bank umum milik negara (BUMN) dan non-BUMN karena peneliti berasumsi bahwa perbedaan kepemilikan tersebut memiliki perbedaan gaya manajemen yang berimplikasi pada respon terhadap kebijakan maupun kondisi perekonomian.

Tabel 2 Hasil estimasi koefisien menurut karakteristik bank

Variabel	Aset/Likuiditas		Pemilik	
	Besar	Kecil	BUMN	Non BUMN
BI Rate lag 6 bulan		-0.383*** (0.121)		-0.542*** (0.115)
BI Rate lag 10 bulan	-0.450*** (0.0784)		-0.332*** (0.0519)	
PDRB lag 5 bulan	3.380*** (0.380)	8.083*** (0.577)		7.680*** (0.516)
PDRB lag 6 bulan			3.439*** (0.252)	
Inflasi lag 3 bulan			-0.010* (0.006)	
Inflasi lag 4 bulan				-0.0002 (0.0152)
Inflasi lag 5 bulan	-0.015* (0.009)			
Inflasi lag 9 bulan		-0.001 (0.0162)		
R ²	0.867	0.733	0.940	0.758
F-Stat	295.54***	129.0181***	679.94***	162.217***

Keterangan : **/*** melambangkan signifikansi pada level 10%/5%/1%
angka dalam kurung merupakan standar error

Hasil estimasi model (2) berdasarkan aset/likuiditas bank menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan berlangsung lebih cepat pada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil. Pada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil, penurunan suku bunga kebijakan direspon dengan peningkatan nominal kredit 6 bulan berikutnya. Sementara pada bank dengan aset/likuiditas lebih besar, penurunan suku bunga kebijakan direspon dengan peningkatan nominal kredit 10 bulan berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa bank dengan aset/likuiditas lebih besar cenderung melihat lebih dahulu pergerakan suku bunga kebijakan sebelum memutuskan peningkatan / penurunan penyaluran kredit.

Meskipun demikian, elastisitas perubahan nominal kredit terhadap perubahan suku bunga kebijakan pada bank dengan aset/likuiditas lebih besar terlihat lebih elastis daripada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil. Berdasarkan koefisien hasil estimasi, pada bank dengan aset/likuiditas besar, setiap penurunan 1% suku bunga kebijakan akan meningkatkan nominal kredit sebesar 0,45%. Sementara itu, pada bank dengan aset/likuiditas kecil, setiap penurunan 1% suku bunga kebijakan akan meningkatkan nominal kredit sebesar 0,38%.

Estimasi yang dilakukan terhadap koefisien PDRB menunjukkan bahwa PDRB merupakan variabel yang sangat dominan dalam mempengaruhi nominal kredit pada kedua jenis bank dengan elastisitas yang berbeda. Perubahan nominal kredit pada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil terlihat lebih elastis terhadap perubahan

PDRB daripada pada bank dengan aset/likuiditas lebih besar. Hal ini diperkirakan terjadi karena dominasi kredit pada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil terdapat pada kredit modal kerja, sementara kredit pada bank dengan aset/likuiditas lebih besar terdapat pada kredit konsumsi terutama Bank Pembangunan Daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan ekspektasi pelaku usaha sehingga akan meningkatkan modal kerja dengan meningkatkan permintaan kredit modal kerja kepada perbankan. Sementara kredit konsumsi relatif inelastis terhadap kegiatan ekonomi, namun lebih sensitif terhadap inflasi. Hal ini terbukti pada signifikansi tingkat inflasi pada hasil estimasi model (1) pada kelompok bank dengan aset/likuiditas besar dimana inflasi dengan lag 5 bulan ternyata signifikan mempengaruhi posisi nominal kredit yang disalurkan.

Bank-bank umum milik negara (BUMN), termasuk BPD, ternyata lebih lambat merespon perubahan suku bunga kebijakan terhadap penyaluran kreditnya. Pada bank-bank tersebut, nominal kredit meningkat setelah 10 bulan dilakukannya penurunan suku bunga kebijakan, sementara pada bank-bank non-BUMN membutuhkan waktu 6 bulan. Selain lebih responsif terhadap perubahan suku bunga kebijakan, perubahan nominal kredit yang disalurkan pada bank-bank non-BUMN terlihat lebih elastis daripada bank-bank BUMN. Pada bank-bank non BUMN, setiap suku bunga kebijakan turun 1%, nominal kredit yang disalurkan meningkat 0,542% pada 6 bulan berikutnya. Sementara pada bank-bank BUMN, setiap suku bunga kebijakan turun 1%, nominal kredit yang disalurkan meningkat 0,332% pada 10 bulan berikutnya. Peneliti memperkirakan kecepatan respon dan perubahan nominal kredit yang lebih elastis pada bank-bank non BUMN terjadi karena gaya manajemen pada bank-bank tersebut lebih longgar daripada gaya manajemen pada bank-bank BUMN yang cenderung lebih birokratis.

5. Kesimpulan

Paper ini menganalisis perilaku bank umum yang berada di wilayah Sumatera Barat pada periode 2001 sampai dengan 2006. Dengan menggunakan data panel, sebanyak 13 bank dianalisis respon nominal kredit terhadap perubahan suku bunga kebijakan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan terbukti berjalan efektif di Sumatera Barat dengan lag antara perubahan suku bunga kebijakan terhadap perubahan nominal kredit yang disalurkan perbankan Sumatera Barat selama 8 bulan.

2. Karakteristik bank mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan berlangsung lebih cepat pada bank dengan aset/likuiditas lebih kecil. Meskipun demikian bank dengan aset/likuiditas lebih besar terlihat lebih elastis dalam penyaluran kredit dibandingkan dengan bank dengan aset/likuiditas lebih kecil.
3. Kepemilikan bank juga mempengaruhi efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan. Transmisi kebijakan moneter pada bank-bank BUMN terbukti lebih lambat dan lebih inelastis dalam penyaluran kreditnya di Sumatera Barat.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Umum

Realisasi APBN di provinsi Sumatera Barat hingga akhir triwulan IV-2007 terus mengalami ekspansi baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada posisi 31 Desember 2007 meningkat sebesar Rp 495,26 milyar atau 29,20% dibandingkan tahun sebelumnya (tabel 4.1). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah di Sumbar juga meningkat lebih ekspansif dibandingkan peningkatan penerimaan. Hingga akhir tahun 2007, realisasi belanja APBN di wilayah Sumbar mencapai Rp 12,09 triliun, meningkat Rp 2,44 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2006. APBN 2007 yang ekspansif di wilayah Sumatera Barat meningkatkan defisit APBN dari Rp 8,5 triliun pada triwulan IV-2006 menjadi Rp 9,91 triliun pada triwulan IV-2007. Hal ini mengindikasikan pemerintah pusat lebih ekspansif dalam melaksanakan kebijakan fiskalnya di Sumatera Barat.

Tabel 4.1.
Ringkasan Realisasi APBN Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat (dalam Juta Rp)

Keterangan	Tw. IV 2006	Tw. IV 2007	Perubahan (y-o-y, %)
Pendapatan Negara dan Hibah	1,696,187	2,191,451	29.20
Penerimaan Perpajakan	1,533,305	1,911,526	24.67
Penerimaan Negara Bukan Pajak	158,957	279,870	76.07
Belanja Negara	10,211,771	12,098,759	18.48
Belanja Pemerintah Pusat	4,197,235	5,172,094	23.23
Belanja Daerah	6,014,537	6,926,664	15.17
Defisit	(8,515,585)	(9,907,308)	16.34

Sumber : Kanwil III DJPBN Padang, Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

Sayangnya ekspansifnya APBN Pemerintah Pusat belum diikuti realisasi belanja APBD baik pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Prompt indikator realisasi belanja pemerintah daerah berupa posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan per November 2007 masih belum menunjukkan penurunan. Hingga laporan ini diterbitkan, realisasi APBD semester II 2007 belum dirilis pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Namun, diperkirakan realisasi belanja pemerintah akan memuncak pada bulan Desember 2007 mengingat penempatan SBI Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada posisi November 2007 menunjukkan tren yang menurun.

4.2. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan pajak pusat di wilayah Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2007 terealisasi sebesar Rp 1,99 triliun, meningkat 22,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2006 (grafik 4.2). Secara nominal, peningkatan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp 251,55 milyar, diikuti dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 101,15 milyar. Meningkatnya kegiatan ekonomi terutama pada subsektor perkebunan, subsektor komunikasi, serta sektor perdagangan diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, kebijakan ekstensifikasi wajib pajak yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi faktor pendorong kenaikan penerimaan pajak.

Tabel 4.2.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat (dalam Juta Rp)

Jenis Pendapatan Negara	Tw. IV 2006	Tw. IV 2007	Perubahan	
			Nominal	%
Penerimaan Perpajakan	1.629.910	1.994.552,35	364.641,98	22,37
Pajak Penghasilan	769.479	968.602,38	199.123,74	25,88
Pajak Pertambahan Nilai	513.510	610.922,65	97.412,71	18,97
Pajak Bumi dan Bangunan	286.469	322.831,50	36.362,04	12,69
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.579	18.262,45	(316,38)	(1,70)
Pendapatan Pajak Lainnya	25.053	29.002,11	3.948,69	15,76
Bea Masuk	16.820	44.931,27	28.111,18	167,13
Pengembalian (Restitusi)	(12.983)	(83.026,04)	(70.042,82)	539,49
Pengembalian BM	68	-	(68,00)	(100,00)
Pengembalian Pendapatan Pajak dan Cukai	(13.051)	(83.026,04)	(69.974,82)	536,16
Penerimaan Perpajakan Bersih	1.642.894	2.077.578,39	434.684,80	26,46

Sumber : Kanwil III DJPBN Padang, Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

Peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2007 diikuti dengan meningkatnya permintaan pengembalian (restitusi) pajak. Jika pada triwulan IV-2006, realisasi pengembalian pajak (termasuk Bea Masuk) hanya

sebesar Rp 12,98 milyar, namun pada tahun 2007 terjadi kenaikan restitusi pajak hingga mencapai Rp 83,02 milyar (tabel 4.2). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan kegiatan ekonomi pada tahun 2007, namun beberapa kegiatan usaha justru mengalami penurunan.

Pertumbuhan Pajak Penghasilan yang cukup tinggi meningkatkan pangsa pajak penghasilan terhadap jenis pajak lainnya. Sumbangan pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak pada triwulan IV-2007 mencapai 48,56%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV-2006 sebesar 47,21%. Peningkatan pangsa yang cukup besar terjadi pada penerimaan bea masuk. Jika pada triwulan IV-2006, pangsa bea masuk hanya 1,03%, maka pada triwulan IV-2006 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 2,25%.

Tabel 4.3.
Perkembangan Komposisi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat

Jenis Pendapatan Negara	Komposisi		
	Tw. IV 2006	Tw. III 2007	Tw. IV 2007
Penerimaan Perpajakan	100.00%	100.00%	100.00%
Pajak Penghasilan	47.21%	53.91%	48.56%
Pajak Pertambahan Nilai	31.51%	28.41%	30.63%
Pajak Bumi dan Bangunan	17.58%	12.65%	16.19%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.14%	1.05%	0.92%
Pendapatan Pajak Lainnya	1.54%	1.66%	1.45%
Bea Masuk	1.03%	2.32%	2.25%

Sumber : Kanwil III DJPBN Padang, Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

4.3. Realisasi Belanja Negara

4.3.1. Belanja Pemerintah Pusat

Di sisi peningkatan realisasi belanja, belanja modal merupakan kelompok belanja dengan peningkatan tertinggi dibandingkan triwulan IV-2006. Dengan realisasi sebesar Rp 239,73 miliar, belanja modal pemerintah pusat meningkat sebesar 76,56%. Peningkatan belanja modal terjadi pada hampir semua jenis belanja modal kecuali belanja modal peralatan dan mesin yang menurun 19,96%. Belanja modal terbesar hingga triwulan IV-2007 terjadi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 129,67 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan triwulan IV-2006.

Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat sampai dengan triwulan IV-2007 mencapai Rp3,44 triliun atau meningkat sebesar

35,38% dibandingkan triwulan IV-2006. Yang lebih menggembirakan adalah peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat terjadi pada komponen belanja modal. Peningkatan realisasi belanja modal mencapai Rp 338,43 milyar atau 129,57% dibandingkan triwulan IV-2006. Alokasi terbesar belanja modal pemerintah terjadi pada pos belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkat Rp 141,98 milyar atau 116,14% (tabel 4.4). Hal ini mengindikasikan pemerintah pusat memberikan perhatian yang serius dalam peningkatan kapasitas infrastruktur perekonomian di Sumbar. Peningkatan belanja modal pemerintah pusat yang cukup ekspansif pada triwulan IV-2007 ini diperkirakan mendorong peningkatan ekspektasi kegiatan usaha di masa mendatang. Hal ini tercermin dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit investasi oleh perbankan.

Tabel 4.4.
Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat
di Provinsi Sumatera Barat

Keterangan	Nominal		Perkembangan (y-o-y)	
	Tw.IV-2006	Tw.IV-2007	Nominal	%
Belanja Pemerintah Pusat	2.546.106	3.447.022	900.915	35,38
Belanja Pegawai	1.030.304	1.309.448	279.144	27,09
Belanja Gaji dan Tunjangan	868.958	1.075.741	206.783	23,80
Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	165.772	236.149	70.377	42,45
Belanja Kontribusi Sosial	(4.426)	(2.442)	1.983	-44,82
Belanja Barang	483.242	604.320	121.078	25,06
Belanja Barang	295.073	390.590	95.516	32,37
Belanja Jasa	57.408	71.498	14.090	24,54
Belanja Pemeliharaan	47.073	58.176	11.103	23,59
Belanja Perjalanan	83.688	84.057	369	0,44
Belanja Bantuan Sosial	547.274	641.315	94.041	17,18
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	267.820	255.989	(11.831)	-4,42
Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan	279.454	385.326	105.872	37,89
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	71.410	186.352	114.942	160,96
Belanja Lain-Lain	224.094	292.309	68.215	30,44
Belanja Lain-Lain	224.094	292.309	68.215	30,44
Belanja Modal	261.192	599.629	338.437	129,57
Belanja Modal Tanah	6.362	12.947	6.584	103,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.998	133.179	65.181	95,86
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.890	171.662	112.771	191,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	122.250	264.235	141.985	116,14
Belanja Modal fisik Lainnya	5.691	17.607	11.915	209,35

Sumber : Kanwil III DJPBN Padang, Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, ur

4.3.2. Belanja untuk Daerah dan Belanja Pemerintah Daerah

Hingga triwulan IV-2007, pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat mendapat transfer dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dana perimbangan terbesar yang diperoleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Rp 5,78

triliun. Alokasi DAU terbesar disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang mendapat 89,75% dari total DAU atau Rp 5,19 triliun, sementara pemerintah provinsi memperoleh Rp 592,52 milyar (tabel 4.4). Sementara itu, realisasi belanja dana bagi hasil justru menurun sebesar 0,38% dibandingkan triwulan IV-2006. Penurunan paling besar terjadi pada bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan yang menurun 23,83%. Jika dilihat terjadi peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang cukup tinggi pada triwulan IV-2007, diperkirakan akan terjadi selisih kurang dana bagi hasil pajak penghasilan yang akan ditransfer pada tahun 2008. Sementara itu, alokasi Dana Alokasi Khusus juga meningkat cukup tinggi pada triwulan IV-2007. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi DAK yang diperoleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat meningkat 48,21% atau Rp 224,89 milyar. Peningkatan Dana Alokasi Khusus ini terutama disalurkan untuk beberapa bidang antara lain pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 4.5.
Perkembangan Dana Perimbangan
di Provinsi Sumatera Barat

dalam jutaan rupiah

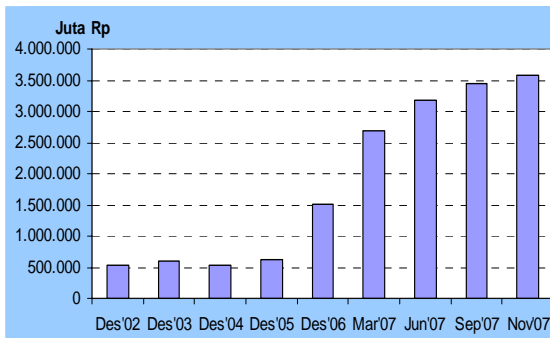
Keterangan	Nominal				Perkembangan (y-o-y, %)	
	Tw.III-2006	Tw.IV-2006	Tw.III-2007	Tw.IV-2007	Tw.III-2007	Tw.IV-2007
Belanja Dana Bagi Hasil	177,759	399,989	223,327	398,460	25.63	(0.38)
PPh	18,799	47,090	25,375	35,867	34.98	(23.83)
Pajak Bumi dan Bangunan	132,531	316,581	162,486	314,889	22.60	(0.53)
BPHTB	26,428	36,318	60,840	47,704	130.21	31.35
Belanja Dana Alokasi Umum	4,273,912	5,128,700	4,796,439	5,779,339	12.23	12.69
Belanja DAU untuk Provinsi	397,524	477,029	501,465	592,520	26.15	24.21
Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota	3,876,388	4,651,671	4,294,974	5,186,819	10.80	11.50
Belanja Dana Alokasi Khusus	202,074	466,475	240,050	691,364	18.79	48.21
Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang	11,761	19,373	19,000	57,500	61.55	196.80

Sumber : Kanwil III DJPBN Padang, Laporan Arus Kas SAKUN Wilayah Sumbar, unaudited, diolah

Peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ternyata tidak otomatis meningkatkan belanja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pantauan data simpanan pemerintah daerah di perbankan terlihat bahwa posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan masih terus mengalami peningkatan (grafik 4.2). Peningkatan posisi simpanan pemerintah daerah diperkirakan karena dua faktor. Pertama, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pemerintah daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan dari transfer dana perimbangan. Kedua, realisasi belanja masih belum optimal. Akibatnya terjadi surplus APBD. Hal yang sama terjadi pada realisasi APBD 2006 dimana pada saat perekonomian membutuhkan ekspansi pengeluaran pemerintah, APBD semua pemerintah daerah di Sumatera Barat justru surplus. Surplus APBD yang dialami pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkisar antara 4,61% (Kota Pariaman) hingga 23,48% (Kabupaten Kepulauan Mentawai). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri mengalami surplus sebesar 9,31%.

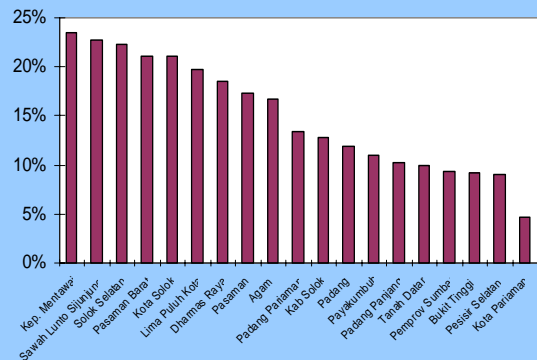
Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah pusat khususnya Departemen Keuangan dalam mengatasi lambatnya realisasi APBD. Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan Menteri Keuangan pada awal tahun

anggaran 2007 adalah melakukan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum yang tidak terkait dengan pembayaran gaji PNS bila pemerintah daerah dan DPRD belum menyelesaikan penyusunan Perda APBD. Kebijakan ini terbukti efektif bagi pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan APBD. Namun penyusunan APBD yang lebih cepat ternyata tidak otomatis mempercepat realisasi belanja APBD. Menurut Public Expenditure Analysis (PEA) tahun 2007 yang dilakukan World Bank terhadap realisasi belanja publik pada tingkat pemerintah daerah, ruang fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah sebenarnya semakin meluas. Perluasan ruang fiskal ini disebabkan semakin meningkatnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Namun, ruang fiskal yang meluas ini belum digunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Menurut World Bank dalam laporan PEA tersebut, sistem anggaran yang tidak fleksibel, terlalu rinci, butuh waktu yang sangat lama untuk menyiapkan dan banyak komplikasi dalam implementasinya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran.



Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan

Grafik 4.1. Perkembangan Posisi Simpanan Milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Perbankan



Sumber : SEKDA - BI

Grafik 4.2. Posisi Surplus APBD Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2006

BAB V

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral terus mengupayakan terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran merupakan salah satu jenis layanan utama perbankan dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Transaksi pembayaran dapat berupa transaksi tunai dan transaksi non tunai. Pada sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang cukup dan layak edar. Pada sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan Sistem Kliring Nasional (SKN) dan RTGS.

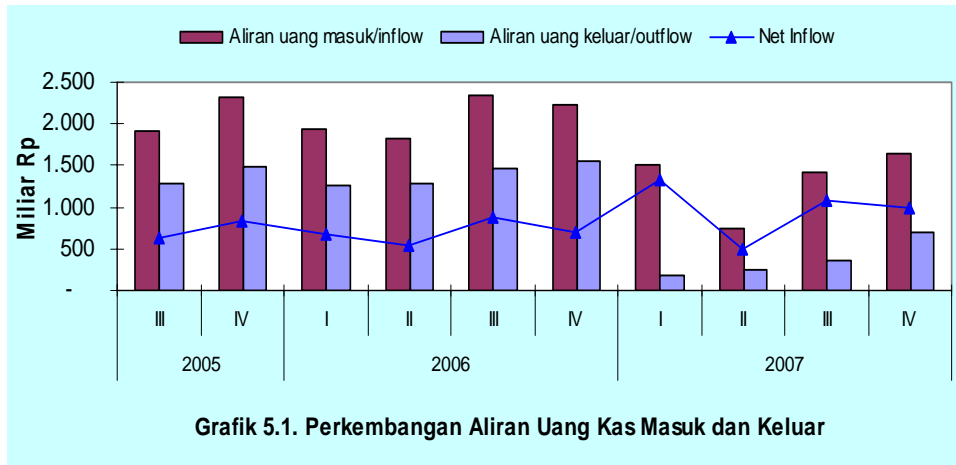
Aliran uang kas yang masuk dan keluar Kantor Bank Indonesia (KBI) Padang pada triwulan IV-2007 meningkat cukup signifikan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kegiatan ekonomi dan perbankan di akhir tahun 2007. Adanya bulan puasa di bulan September 2007 dan hari raya keagamaan di bulan Oktober & Desember 2007 memberikan stimulus bagi pelaku ekonomi, terutama yang bergerak di sektor perdagangan, untuk meningkatkan skala usahanya. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya proyek pemerintah yang diselesaikan di triwulan akhir tahun 2007. Begitu pula dengan transaksi non tunai, secara umum juga mengalami peningkatan.

5.2. Perkembangan Alat Pembayaran Tunai.

5.2.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

Seperti biasanya, karakteristik kas Kantor Bank Indonesia Padang adalah *net-inflow*. Selama triwulan IV-2007, *net-inflow* yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya aktifitas perekonomian di bulan puasa dan hari raya keagamaan diduga merupakan penyebab tingginya aliran kas keluar Bank Indonesia. Aliran kas keluar dari Bank Indonesia Padang (*cash-outflow*) meningkat dari Rp351 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp689 miliar di triwulan IV-2007 atau meningkat 96,10%. Sedangkan aliran kas masuk ke Bank Indonesia Padang (*cash-inflow*) meningkat dari Rp1.425 miliar di triwulan III-

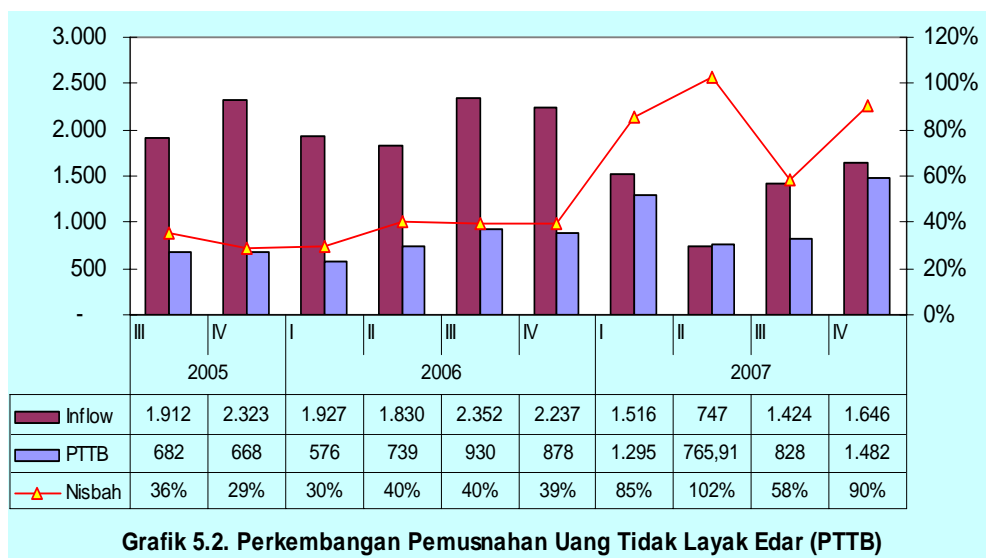
2007 menjadi Rp1.646 miliar di triwulan IV-2007 atau meningkat hampir 2 kali lipat (96,10%). Dengan perkembangan tersebut, aliran uang kas masuk bersih (*net-inflow*) pada triwulan laporan sebesar Rp982 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2007 yang tercatat hanya sebesar Rp1.073 miliar (Grafik 5.1).



Grafik 5.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk dan Keluar

5.2.2. Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan terhadap uang yang sudah lusuh/rusak sehingga tidak layak lagi untuk diedarkan (Uang Tidak Layak Edar/UTLE) untuk selanjutnya akan dicatat sebagai Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Pemusnahan UTLE dilakukan dengan menggunakan mesin racik uang kertas (MRUK) maupun mesin sortasi uang kertas (MSUK).



Grafik 5.2. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)

Jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan selama triwulan laporan sebesar Rp1.482 miliar, meningkat sekitar 79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp828 miliar (Grafik 5.2). Nisbah antara jumlah uang yang dimusnahkan dengan jumlah aliran uang masuk (inflow) pada triwulan IV-2007 adalah sebesar 90% atau jauh meningkat dibandingkan nisbah triwulan III-2007 yang tercatat sebesar 58%. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa uang yang beredar di Sumatera Barat dan disetorkan oleh bank umum relatif terjaga kebersihan dan fisiknya.

5.3. Perkembangan Alat Pembayaran Non-Tunai

Transaksi non tunai pada umumnya dapat dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem kliring dan sistem *Real Time Gross Settlement (RTGS)*. Sistem kliring apabila nilai transfer dana/transaksi kredit kurang dari Rp100 juta maupun transaksi debit dengan menggunakan warkat debit. Sedangkan sistem RTGS untuk nilai transaksi transfer dana di atas Rp100 juta.

5.3.1. Perkembangan Kliring

Pada triwulan IV-2007, transaksi kliring mengalami kenaikan di sisi nominal, sementara volume mengalami penurunan. Perputaran uang non-tunai melalui sarana kliring di Bank Indonesia Padang pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 7,20%, yaitu dari Rp2.609 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp2.798 miliar di triwulan laporan. Peningkatan transaksi nominal kliring tidak diiringi dengan peningkatan volume kliring. Volume kliring di triwulan IV-2007 menurun dari 96,8 ribu lembar di triwulan III-2007 menjadi 85,1 ribu lembar pada triwulan laporan atau turun 12,1%.

Dari perkembangan transaksi kliring tersebut, bila dilihat secara rata-rata harian, volume/warkat kliring yang berhasil diproses pada triwulan IV-2007 juga mengalami penurunan, yaitu dari 1.562 lembar per hari pada triwulan III-2007 menjadi 1.395 lembar per hari pada triwulan laporan. Rata-rata nilai transaksi per hari meningkat dari Rp41 miliar per hari pada triwulan III-2007 menjadi Rp46 miliar per hari pada triwulan laporan. Hal ini mengindikasikan nominal dana yang ditransfer meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan diduga adanya aliran dana dari perantau kepada keluarganya di Sumatera Barat.

Meningkatnya transaksi kliring ternyata diiringi dengan meningkatnya penolakan cek/BG yang kosong selama triwulan laporan, yaitu dari Rp13,7 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp19,7 miliar di triwulan IV-2007 atau meningkat 43,7% (Tabel 5.1). Peningkatan penolakan cek/BG yang kosong ini tidak secara langsung mengindikasikan risiko transaksi melalui non-tunai yang cenderung meningkat, namun perlu ditelaah penyebab penolakan yang umumnya berupa kesalahan teknis pengisian keterangan pada lembar cek/BG, seperti nomor dan nama rekening.

Tabel 5.1 Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

Keterangan	2006		2007				Perubahan (qtq)	
	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	(+/-)	(%)
Perputaran Kliring								
- Volume (ribuan lembar)	103,4	88,3	93,0	94,6	96,8	85,1	-12	-12,1%
- Nominal (miliar rp)	2.401,9	2.286,4	2.284,6	2.455,5	2.609,2	2.798,2	189	7,2%
Penolakan Cek/BG Kosong								
- Nominal (miliar rp)	13,1	16,8	27,2	11,5	13,7	19,7	6	43,7%
Rata-rata Harian Perputaran Kliring								
- Volume (lembar)	1.641	1.448	1.476	1.525	1.562	1.395	-167	-10,7%
- Nominal (miliar rp)	38,1	37	36	40	41	46	5	12,8%

5.3.2. Perkembangan Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sedikit berbeda dengan transaksi kliring, perkembangan transaksi non-tunai dengan menggunakan sarana BI-RTGS di Kantor BI Padang selama triwulan IV-2007 menunjukkan peningkatan transaksi masuk. Untuk transfer masuk ke Sumatera Barat melalui BI-RTGS, nilai transaksi meningkat sebesar 47,45% yaitu dari Rp9.155 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp13.499 miliar pada triwulan laporan. Volume RTGS transfer masuk juga meningkat sebesar 27,74% yaitu dari 9.293 transaksi di triwulan III-2007 menjadi 11.871 transaksi di triwulan laporan. Hal ini mengindikasikan rata-rata nilai transaksi masuk pada triwulan laporan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, untuk transfer RTGS keluar dari Sumatera Barat nilai transaksi mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Nilai transaksi menurun sebesar 12,34%, yaitu dari Rp9.626 miliar di triwulan III-2007 menjadi Rp8.438 miliar di triwulan laporan. Begitu pula dengan volume transaksi keluar juga mengalami peningkatan. Volume transaksi keluar pada triwulan IV-2007 sebesar 9.265 transaksi atau meningkat 20,67% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7.678 transaksi. Dengan demikian, secara netto pada triwulan laporan terjadi aliran transfer dana masuk sebesar Rp5.061 miliar. Kondisi ini selain

mengindikasikan masih tingginya ketergantungan ekonomi Sumatera Barat dengan pelaku ekonomi di luar wilayah Sumatera Barat juga memberi dugaan relatif berhasilnya para perantau Minang di luar Sumatera Barat. Tradisi memberikan uang kepada kerabat/orang tua menjelang hari raya Idul Fitri telah berlangsung sejak lama dan terus berlangsung hingga kini.

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan		Tw.I-2007	Tw.II-2007	Tw.III-2007	Tw.IV-2007	Pertumbuhan (q-t-q)
Nilai Transaksi	Inflow	7.076,15	10.173,84	9.154,72	13.498,93	47,45%
	Outflow	7.109,96	7.049,78	9.625,75	8.438,37	-12,34%
	Intra	1.030,28	1.236,98	2.585,20	2.812,20	8,78%
Volume	Inflow	6.641	7.541	9.293	11.871	27,74%
	Outflow	7.253	7.133	7.678	9.265	20,67%
	Intra	1.338	1.779	2.310	3.069	32,86%

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

6.1. Ketenagakerjaan Daerah

Hasil Susenas yang dilaksanakan BPS Sumatera Barat pada bulan Agustus 2007 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat bergerak ke arah perubahan yang lebih baik dibandingkan kondisi awal tahun 2007 (Susenas Februari 2007). Beberapa indikator ketenagakerjaan mengalami perbaikan yang cukup berarti. Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Provinsi Sumatera Barat pada Susenas Agustus 2007 menunjukkan sedikit peningkatan, baik dibandingkan Februari 2007 maupun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Susenas Agustus 2007, PUK tercatat sebesar 3.225.756 orang atau meningkat 1,06% dari Februari 2007 dan 2,03% dari Agustus 2006. Dari jumlah PUK tersebut, yang menjadi angkatan kerja sebanyak 2.106.711 orang (65,30%) atau meningkat 5,36% dibandingkan Februari 2007. Penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 1.119.045 orang (34,70%) atau menurun 6,14% dibandingkan Februari 2007. Selain faktor demografis berupa peningkatan jumlah penduduk usia kerja, peningkatan juga disebabkan oleh makin bertambahnya jumlah penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuh dan siap memasuki dunia kerja (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Penduduk Sumatera Barat Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan

Kegiatan Utama	Agust 2006	Feb 2007	Agust 2007	Pertumb. (%)	
				Agt'07/Feb'07	Agt'07/Agt'06
1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	3.161.612	3.191.865	3.225.756	1,06	2,03
2. Angkatan Kerja	2.051.800	1.999.580	2.106.711	5,36	2,68
a. Bekerja	1.808.275	1.779.203	1.889.406	6,19	4,49
b. Pengangguran	243.525	220.377	217.305	-1,39	-10,77
3. Bukan Angkatan Kerja	1.109.812	1.192.285	1.119.045	-6,14	0,83
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,90	62,60	65,30	-	-
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,90	11,00	10,30	-	-

Sumber : BPS Sumbar

Dari sisi jumlah pengangguran, terjadi perbaikan yang relatif cukup berarti. Jumlah pengangguran pada Susenas Agustus 2007 sebanyak 217.305 orang yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,39% apabila dibandingkan

Februari 2007 dan 10,77% apabila dibandingkan Agustus 2006. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tampak mengalami penurunan yang relatif cukup berarti yaitu dari 11,90% pada bulan Agustus 2006 menjadi 11,30% pada bulan Agustus 2007. Penurunan jumlah pengangguran selain terserap lapangan kerja atau berwiraswasta, juga diduga karena ada sebagian angkatan kerja yang merantau ke luar Sumatera Barat dan ada yang pindah ke kelompok bukan angkatan kerja. Adanya kegiatan Bursa Tenaga Kerja yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha/sector swasta cukup membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, pada Susenas Agustus 2007 distribusi sektoral masih menunjukkan bahwa konsentrasi tenaga kerja terdapat di sektor pertanian yang menyerap 47,93% tenaga kerja. Angka ini menurun dibandingkan dengan Februari 2007 yang tercatat sebesar 48,45%. Walaupun sedikit menurun, namun masih mendominasi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Barat. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang paling tinggi, yaitu sebesar 17,74%. Disusul sektor pertanian sebesar 10,17%, sektor perdagangan sebesar 9,06% dan sektor angkutan/transportasi sebesar 6,87%. Sementara sektor lainnya, yang merupakan gabungan dari sektor pertambangan, listrik dan keuangan, mengalami penurunan tertinggi sebesar 31,14%.

Tabel 6.2 Penduduk Sumatera Barat Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan

Kegiatan Utama	Agust 2006	Feb 2007	Agust 2007	Pertumb. (%)		Pangsa	
				Agt'07/Feb'07	Agt'07/Ag't06	Feb 2007	Agt 2007
1. Pertanian	821.996	861.941	905.575	5,06%	10,17%	48,45%	47,93%
2. Industri	118.879	114.787	139.972	21,94%	17,74%	6,45%	7,41%
3. Konstruksi/Bangunan	94.203	71.904	78.358	8,98%	-16,82%	4,04%	4,15%
4. Perdagangan	352.187	370.616	384.094	3,64%	9,06%	20,83%	20,33%
5. Angkutan/Transportasi	114.211	113.268	122.053	7,76%	6,87%	6,37%	6,46%
6. Jasa	256.318	197.183	224.592	13,90%	-12,38%	11,08%	11,89%
7. Lainnya*	50.481	49.504	34.762	-29,78%	-31,14%	2,78%	1,84%
Jumlah	1.808.275	1.779.203	1.889.406	6,19%	4,49%	100,00%	100,00%

* Pertambangan, Listrik dan Keuangan
Sumber : BPS Sumbar

Transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier masih sangat lamban. Di tengah kondisi perekonomian yang ditandai oleh masih terbatasnya lapangan kerja sektor-sektor formal, sektor pertanian menjadi pilihan utama karena sifatnya yang fleksibel dan tidak terlalu membutuhkan keahlian yang tinggi. Sektor sekunder berupa sektor industri dan sektor konstruksi/bangunan secara keseluruhan hanya mampu menyerap 11,56%

dari total tenaga kerja. Sektor industri mampu menyerap 7,41% sementara sektor konstruksi/bangunan sebesar 4,15%. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa sektor sekunder belum mampu banyak menyerap kesempatan kerja yang lebih luas.

Melihat perkembangan penyerapan tenaga kerja yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa daya serap tenaga kerja sektoral masih belum mengalami perubahan dan cenderung berjalan lamban. Selain itu, dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk usia kerja sekitar rata-rata 0,5 persen, maka beban bertambahnya angkatan kerja masih belum dapat diserap oleh pertumbuhan lapangan kerja.

Sementara itu, jumlah pencari kerja di Sumatera Barat sampai dengan periode triwulan IV-2007 bertambah secara signifikan. Pencari kerja yang terdaftar hingga triwulan IV-2007 tercatat sebanyak 121.452 orang. Angka ini berarti terjadi penambahan pencari kerja sebanyak 103.476 orang selama triwulan IV-2007 (Tabel 6.3). Menurut tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja hingga triwulan IV-2007 terbanyak berpendidikan tingkat SMA/SLTA sebanyak 71.120 orang (58,56% dari total pencari kerja). Selanjutnya, pencari kerja terbanyak adalah tingkat Sarjana/S1 sebanyak 26.736 orang (22,01%), disusul kemudian D.I/D.II/D.III yaitu mencapai 20.264 orang (16,68%), SMP/SLTP sebanyak 2.633 orang (2,17%), tingkat SD sebanyak 605 orang (0,50%), pencari kerja yang tidak tamat SD sebanyak 75 orang (0,06%) dan lulusan S2/S3 sebanyak 19 orang (0,02%).

Tabel 6.3 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2006		s.d Jun 2007		s.d Sept 2007		s.d Nov 2007	
	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share	Jumlah	Share
Tidak Tamat SD	19	0,07%	0	0,00%	27	0,15%	75	0,06%
SD	263	1,02%	89	1,17%	177	0,98%	605	0,50%
SMP/SLTP	751	2,91%	261	3,43%	517	2,88%	2.633	2,17%
SMA/SLTA	16.465	63,87%	4.366	57,42%	10.524	58,54%	71.120	58,56%
D.I/D.II/D.III	3.601	13,97%	997	13,11%	2.597	14,45%	20.264	16,68%
Sarjana (S1)	4.677	18,14%	1.889	24,85%	4.126	22,95%	26.736	22,01%
S2/S3	3	0,01%	1	0,01%	8	0,04%	19	0,02%
Total	25.779	100,00%	7.603	100,00%	17.976	100,00%	121.452	100,00%

Sumber: Disnakertrans Sumbar

Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari dalam Provinsi Sumatera Barat ke luar negeri sampai dengan triwulan laporan terlihat meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1.322 tenaga kerja menjadi 1.613 tenaga kerja atau bertambah 291

tenaga kerja selama triwulan IV-2007. Banyaknya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Sumatera Barat dan kemudahan perizinan serta akses ke luar negeri, semakin meningkatkan minat tenaga kerja Sumatera Barat ke luar negeri. Pada triwulan ini jumlah tenaga kerja pada umumnya berpendidikan SLTA/Setingkat yaitu sebesar 91,32% dari total TKI, selanjutnya adalah tenaga kerja berpendidikan SLTP/Setingkat yang mencapai 8,62% (Tabel 6.4). Sampai dengan Desember 2007, TKI yang berusia >21 tahun sebanyak 932 tenaga kerja atau 57,78% dari total TKI. Dihubungkan dengan tingkat pendidikan, umumnya TKI merupakan lulusan SLTA/Setingkat yang lama menganggur/belum mendapatkan pekerjaan tetap kemudian mendaftar untuk menjadi TKI. Lapangan usaha yang banyak menyerap TKI di luar negeri adalah industri pengolahan yang mencapai 95,47% disusul kemudian sektor pertanian sebesar 3,35% dan sisanya ke sektor lainnya.

Negara tujuan utama dari TKI Provinsi Sumatera Barat adalah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam. Relatif dominannya pengiriman TKI ke Malaysia, disebabkan oleh faktor kemudahan transportasi dan faktor sosial budaya di kedua negara yang masih dapat dikatakan serumpun sehingga sangat membantu TKI dari Provinsi Sumatera Barat dalam bersosialisasi dengan masyarakat Malaysia.

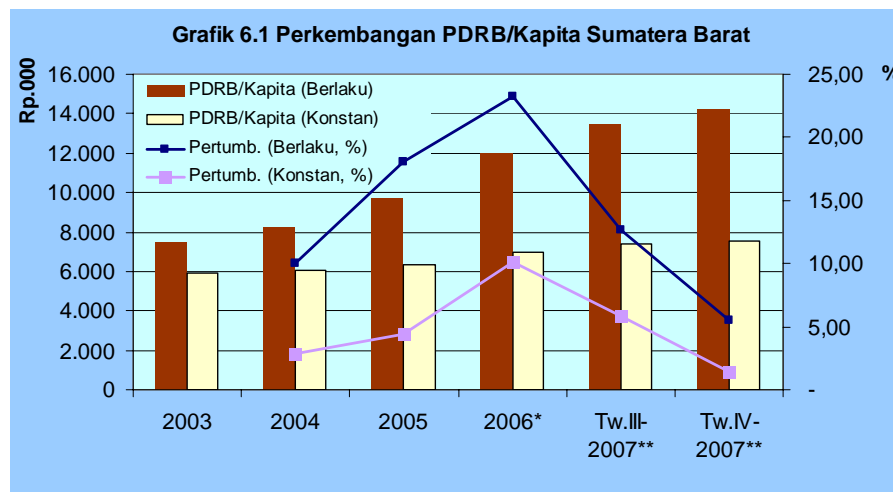
Tabel 6.4 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Daerah Asal Dalam Prov. Sumatera Barat

Keterangan	2006	2007			Share Des'07 (%)
		s.d Jun	s.d Sept	s.d Des	
Menurut Pendidikan	2.068	778	1.322	1.613	100,00
- SD	0	0	0	0	0,00
- SLTP/Setingkat	119	54	89	139	8,62
- SLTA/Setingkat	1.948	724	1.233	1.473	91,32
- D.I, D.II & D.III	0	0	0	1	0,06
- Sarjana	1	0	0	0	0,00
Menurut Usia	2.068	778	1.322	1.613	100,00
- < 15 tahun	0	0	0	0	0,00
- 15 - 21 tahun	837	267	535	681	42,22
- > 21 tahun	1.231	511	787	932	57,78
Menurut Lapangan Usaha	2.068	778	1.322	1.613	100,00
- Pertanian/Perkebunan	0	0	33	54	3,35
- Industri Pengolahan	2.068	775	1.272	1.540	95,47
- Perdagangan Besar, Rumah Makan	0	3	4	13	0,81
- Lainnya	0	0	13	6	0,37
Menurut Negara Tujuan	2.068	778	1.322	1.613	100,00
- Malaysia	2.068	775	1.319	1.610	99,81
- Brunei Darussalam	0	3	3	3	0,19

Sumber : Disnakertrans Sumbar

6.2 Kesejahteraan

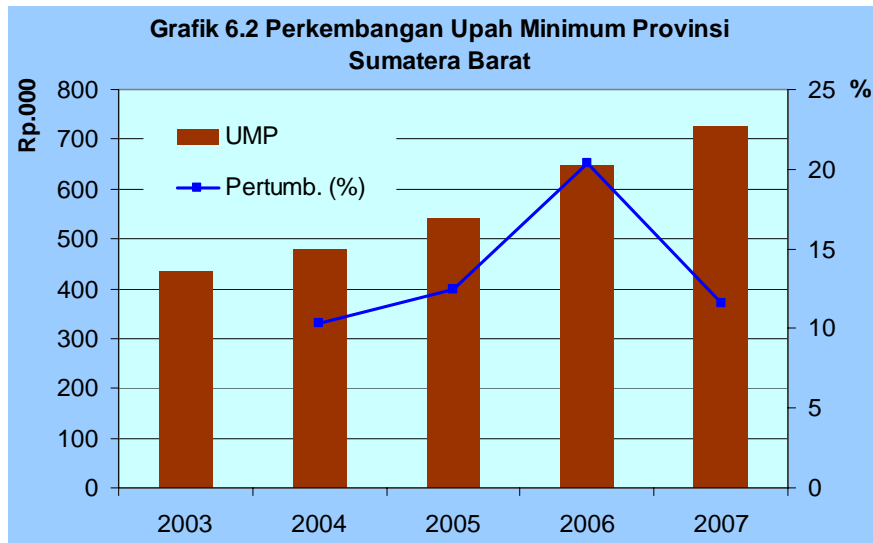
Tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Barat pada triwulan IV-2007 tercatat lebih baik dari tahun 2006. Berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp14,24 juta* lebih tinggi dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp11,98 juta**. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan, PDRB per kapita Sumatera Barat sebesar Rp7,51 juta* juga lebih tinggi dari tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp6,99 juta**. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya adanya kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2007, adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil di tahun 2007 dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang relatif lebih baik dari tahun 2006 (Grafik 6.1).



Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp725.000/bulan atau naik 11,54% dibandingkan tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp650.000/bulan. Pertumbuhan angka UMP tahun 2007 tersebut sebenarnya lebih rendah dari tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan mencapai 20,37% dari tahun 2005. Hal ini dikarenakan UMP tahun 2006 telah mengkompensasi melonjaknya biaya hidup akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (Grafik 6.2).

* PDRB/Kapita Tw.IV-2007 angka perkiraan

** PDRB/Kapita 2006 angka sementara

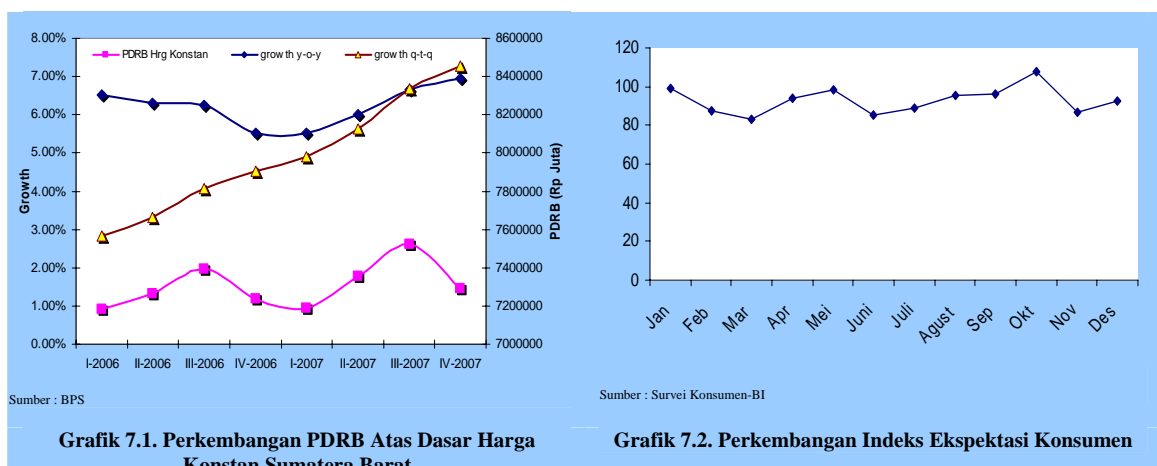


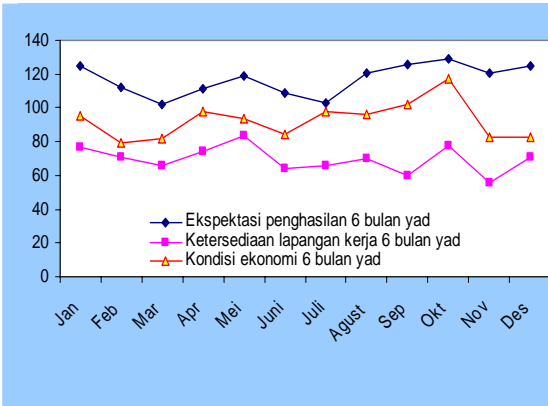
BAB VII

PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH

7.1. Perkiraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sumbang Triwulan I-2008 diperkirakan akan sedikit melambat dibandingkan triwulan IV-2007 dengan laju pertumbuhan pada kisaran 6,0%-7,0%. Data time series menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulanan (q-t-q) pada triwulan pertama sedikit mengalami penurunan dibandingkan triwulan keempat (grafik 7.1). Beberapa faktor diperkirakan menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang. Dari sisi konsumsi, akan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2007 ekspektasi konsumen terus menurun dan mulai meningkat pada triwulan II-2007 (grafik 7.2). Hal ini diperkirakan akan kembali terjadi pada tahun 2008. Tren inflasi yang meningkat pada awal tahun namun belum diikuti dengan penyesuaian gaji yang biasanya baru dilakukan pada triwulan II juga merupakan faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan konsumsi ini akan mempengaruhi pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi serta jasa-jasa. Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia mengkonfirmasi perkiraan penurunan konsumsi pada kedua sektor tersebut (tabel 7.1).





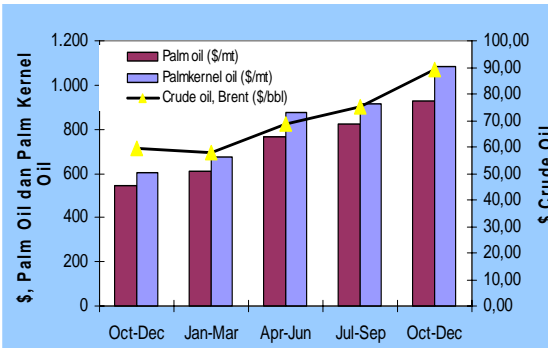
Sumber : Survei Konsumen BI

Grafik 7.3. Ekspektasi Penghasilan, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Kondisi Ekonomi

Tabel 7.1. Ekspektasi Ekonomi Dunia Usaha

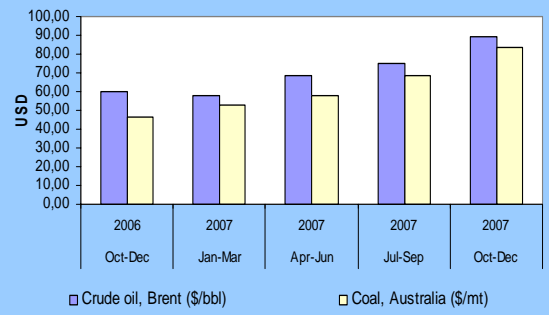
SEKTOR	INDEKS SBT
PERTANIAN	3.98
INDUSTRI PENGOLAHAN	1.97
LISTRİK, GAS DAN AIR BERSIH	0.81
BANGUNAN	1.54
PERDAGANGAN	1.74
PENGANKUTAN & KOMUNIKASI	-0.25
KEUANGAN	1.21
JASA - JASA	-0.14
Total	10,86

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha – BI



Sumber : World Bank

Grafik 7.4. Perkembangan Harga Palm Oil, Palm Kernel Oil, dan Minyak Dunia



Sumber : SEKDA – BI

Grafik 7.5. Perkembangan Harga Minyak dan Batu Bara Dunia

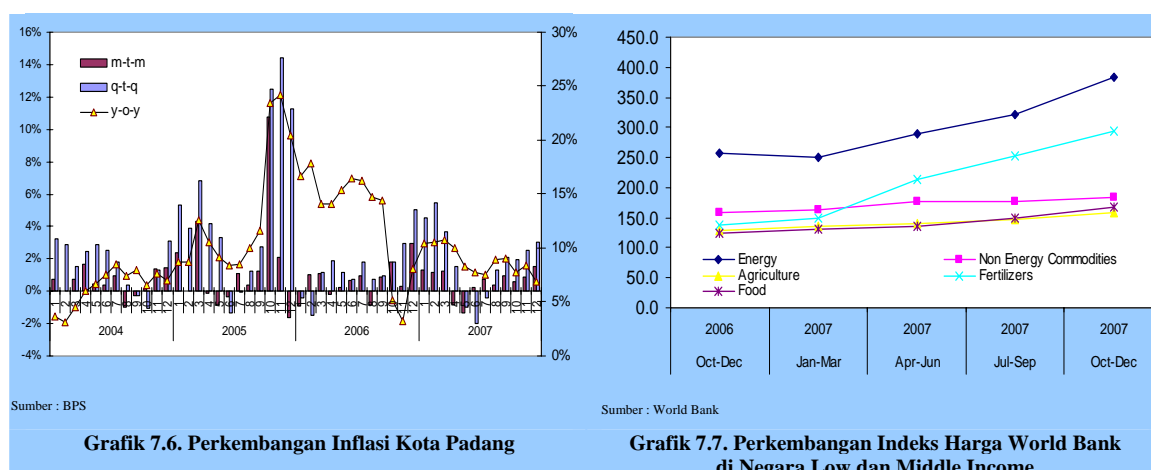
Perlambatan konsumsi akan diimbangi dengan peningkatan ekspor khususnya komoditas perkebunan. Tren kenaikan harga minyak dunia membawa pengaruh baik bagi ekspor Sumatera Barat serta nilai tambah sektor pertanian. Kenaikan harga minyak dunia mendorong permintaan bioenergy sebagai barang substitusi. Akibatnya, harga komoditas bioenergy seperti *palm oil* dan *palm kernel oil* terus mengalami peningkatan (grafik 7.4). Harga batubara juga terus melonjak seiring dengan kenaikan harga minyak dunia (grafik 7.5). Tren peningkatan harga komoditas dan batubara ini akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan sektor pertambangan.

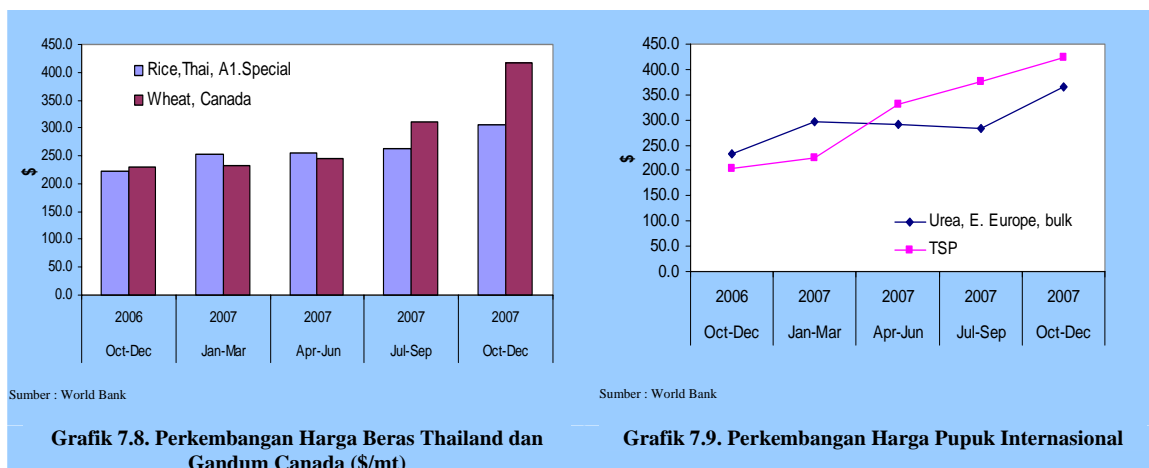
Menurunnya realisasi belanja modal pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga akan menjadi faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2007. Pengalaman menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah selalu kecil pada triwulan pertama. Belum disetujuinya Perda APBD oleh Departemen Dalam Negeri atau belum diserahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja modal pada bulan-bulan pertama di awal tahun. Belum tuntasnya proses reorganisasi pemerintah daerah dengan pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru berdasarkan PP 41 tahun 2007 juga akan menghambat realisasi belanja modal. Dari sisi pemerintah pusat, rencana Menteri Keuangan untuk memotong anggaran departemen sebesar 15% juga akan menghambat realisasi belanja pemerintah pusat karena departemen-departemen akan melakukan perencanaan ulang proyek-proyek mana yang akan ditunda.

7.2. Perkiraan Inflasi

Inflasi pada triwulan I-2008 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya berkisar antara 3,5-4,5%. Data perkembangan inflasi kota Padang tahun 2004-2007 menunjukkan tekanan inflasi meningkat pada triwulan pertama, kecuali pada tahun 2006 karena kebijakan kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005 (grafik 7.6). Tekanan inflasi diperkirakan berasal dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Tren kenaikan harga energi dan harga pangan dunia akan berpengaruh pada inflasi kota Padang. Indeks harga beberapa komoditas di negara berpendapatan rendah dan menengah yang dirilis World Bank menunjukkan tren yang terus meningkat, terutama untuk komoditas energi, pupuk, pertanian, dan makanan (grafik 7.7).





Tren kenaikan harga beras internasional (grafik 7.8) juga berpotensi meningkatkan inflasi kota Padang pada triwulan I-2008. Meskipun produksi padi Sumatera Barat meningkat cukup tinggi pada tahun 2007, namun hasil panen padi Sumbar juga mengalir ke daerah-daerah sekitar seperti Riau, Jambi, dan Batam. Kelangkaan pupuk yang gencar diberitakan media massa yang terjadi pada beberapa sentra produksi pertanian seperti Pesisir Selatan, Agam, dan Solok dapat mengurangi produktivitas panen padi pada bulan Maret-April 2008. Kelangkaan pupuk ini diperkirakan terkait dengan kenaikan harga pupuk dunia yang cukup tajam (grafik 7.9). Disparitas harga yang cukup tinggi antara pupuk bersubsidi dengan harga internasional dapat mendorong terjadinya penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri yang dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk di dalam negeri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Harga Minyak Dunia dan Implikasinya terhadap Ekonomi Sumatera Barat

Harga minyak dunia akhirnya memecahkan rekor sepanjang masa. Pada 2 Januari 2008, harga minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman Februari 2008 mencapai US\$ 100,09. Berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak tersebut antara lain masalah kenaikan tekanan geopolitik di Kenya, Algeria, dan Pakistan, kekhawatiran *cold winter* di Amerika dan Eropa, serta peningkatan permintaan dari Amerika, China, dan India (www.bbc.co.uk).

Tren harga minyak dunia ini sulit diprediksi kapan akan berakhir. Tingginya faktor spekulasi membuat harga minyak dunia sejak tahun 2003 menjadi sangat bergejolak (*volatile*). Tembusnya harga minyak dunia pada batas psikologis US\$ 100 per barrel patut diwaspadai implikasinya terhadap perekonomian Indonesia khususnya Sumatera Barat.

Mengapa demikian? Inflasi beberapa negara perekonomian utama dunia mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada akhir tahun 2007 ini. Inflasi di 13 negara-negara Uni Eropa per November 2007 tercatat sebesar 3,1%, padahal inflasi tahun 2003-2006 berkisar antara 2-2,2%. Inflasi China bulan November 2007 sebesar 6,9% juga menembus angka tertinggi inflasi di negara tersebut selama satu dekade terakhir.

Implikasi pertama dari kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian Sumatera Barat adalah meningkatnya inflasi melalui jalur kenaikan harga barang impor, biaya transportasi, maupun biaya energi. Hari ini beberapa hari yang lalu memberitakan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi di bulan November dan Desember 2007 bukan disebabkan faktor berkurangnya pasokan namun karena kenaikan biaya produksi seperti pupuk dan insektisida. Hal ini mengindikasikan beberapa barang yang tinggi kandungan impornya mulai bergerak naik dan mengakibatkan *cost push inflation*. Biaya transportasi pun bergerak naik. *Fuel Surcharge* untuk penerbangan Padang-Jakarta juga melonjak dari Rp 40 ribu menjadi Rp 160

ribu per penumpang. Harga BBM industri yang tidak disubsidi oleh pemerintah juga akan meningkat.

Meningkatnya angka inflasi akan menggerus daya beli masyarakat. Bila Anda menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan dengan suku bunga 3,5% setahun, sementara angka inflasi tahunan Sumbar tercatat sebesar 6,9%, maka pendapatan riil dari tabungan Anda di bank justru minus 3,4%. Penurunan daya beli masyarakat dalam jangka pendek akan menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga.

Bagaimana dengan investasi? Keynes menyatakan bahwa investasi dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga dan inflasi memiliki korelasi positif dimana kenaikan inflasi akan diikuti kenaikan suku bunga demikian pula sebaliknya. Di tengah kemungkinan kenaikan inflasi karena kenaikan harga minyak dunia, suku bunga yang terus menurun selama tahun 2007 dapat tertahan bahkan kembali meningkat pada tahun 2008. Tertahannya penurunan suku bunga tentu akan mempengaruhi keputusan investor dalam melaksanakan investasi. Penurunan daya beli masyarakat juga akan menambah waktu "*wait and see*" bagi investor.

Jika hal ini terus berlanjut selama tahun 2008, target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar 6,4% akan terpengaruh. Hal ini terjadi mengingat *share* konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 70%.

Apakah hanya kabar buruk yang menyertai kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian Sumatera Barat 2008? Ternyata tidak. Di sisi lain, permintaan dunia akan CPO sebagai barang substitusi minyak bumi sebagai energi alternatif semakin meningkat. Peningkatan permintaan yang tinggi sementara kapasitas penawaran yang terbatas akan meningkatkan harga CPO dunia. Selama tahun 2007, harga rata-rata CPO Rotterdam mencapai US\$ 776 per ton atau naik 64% pertahun. Jika hal ini berlanjut ke tahun 2008, pengaruh penurunan konsumsi dan investasi akan sedikit tereliminasi.

Ekspor CPO Sumatera Barat selama tahun 2007 meningkat 33,61%. Selama Januari-Oktober 2007, ekspor CPO Sumbar mencapai US\$ 563,54 juta

sementara periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$ 421,77 juta. CPO merupakan komoditas utama yang diekspor perekonomian Sumbar dengan kontribusi sebesar 41% dari total ekspor.

Ekspor merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada triwulan III-2007, kontribusi ekspor terhadap pembentukan PDRB mencapai 25,35% sementara pertumbuhan ekspor mencapai 16,90%. Pertumbuhan ekspor tersebut jauh melampaui pertumbuhan konsumsi sebesar 4,41% dan investasi sebesar 3,78%.

Yang lebih menarik lagi, kenaikan harga minyak bumi ternyata tidak hanya diikuti oleh komoditas perkebunan seperti CPO namun juga diikuti komoditas primer yang lain seperti emas, batubara, serta bahan tambang lainnya. Berdasarkan data kredit berdasarkan lapangan usaha yang dirilis Bank Indonesia, kredit sektor pertambangan selama tahun 2007 tumbuh 45,42%. Hal ini juga terjadi di provinsi tetangga Sumbar seperti Riau dan Jambi. Hal ini mengindikasikan minat investor untuk berinvestasi di sektor pertambangan semakin meningkat.

Apa yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholder di daerah berbagai implikasi kenaikan minyak dunia ini? Pertama, kebijakan fiskal pemerintah daerah yang ekspansif dimulai triwulan I-2008. Inilah saatnya pemerintah daerah berperan aktif dalam mendorong perekonomian. Melalui efek multiplier pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi dan investasi, perekonomian Sumbar yang tumbuh 6,29 pada triwulan IV-2007 ini terjaga. Selama ini, pengeluaran pemerintah selalu digenjot pada akhir tahun sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat pada semester pertama dan secara drastis melonjak pada semester kedua. Meningkatnya alokasi DIPA Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 11,93 triliun serta perubahan sistem transfer dana perimbangan merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.

Kedua, pemerintah daerah sebaiknya fokus dalam peningkatan kapasitas serta produktivitas kelapa sawit. Pada tahun 2007, Menteri Keuangan meluncurkan kebijakan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan khususnya kelapa sawit namun penyerapan kredit tersebut hingga akhir 2007

belum optimal. Salah satu sebab belum terkucurnya kredit tersebut secara optimal karena banyak petani/pemilik lahan kelapa sawit tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi para petani tersebut dengan memberikan bantuan atau subsidi biaya pengurusan sertifikat. Kemudahan juga perlu diberikan oleh Kantor Pertanahan guna mempercepat proses penerbitan sertifikat. Pihak perbankan juga perlu lebih aktif dalam menyalurkan kredit untuk sektor ini mengingat prospek usaha kelapa sawit sangat menjanjikan.

Ketiga, pemerintah daerah sebaiknya mengidentifikasi sumber-sumber pendorong inflasi di luar faktor-faktor yang dipengaruhi kenaikan minyak dunia seperti kenaikan tarif air minum, kelancaran infrastruktur jalan dan jembatan, serta pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Jika faktor pendorong inflasi tersebut dapat dijaga, tentunya efek kenaikan inflasi secara keseluruhan dapat dinetralisir.

Harian Padang Ekspres, 14 Januari 2008

Lampiran

LAMPIRAN I
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2006-2007

Sektor / Sub Sektor	Tahun 2006 **)		Total 2006	Tahun 2007 ***)				Total 2007***)
	TRW III	TRW IV		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	3.343.569	3.313.244	13.396.524	3.472.410	3.469.813	3.737.791	4.091.144	14.771.158
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops	1.705.809	1.650.241	6.954.105	1.777.943	1.734.450	1.892.402	2.117.917	7.522.713
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	753.132	756.415	2.976.457	774.371	805.927	866.128	924.305	3.370.731
c. Peternakan/Livestock	277.930	284.300	1.079.157	281.743	288.944	304.647	319.970	1.195.305
d. Kehutanan/Forestry	205.883	215.674	792.798	219.632	226.120	234.043	257.064	936.859
e. Perikanan/Fishery	400.815	406.614	1.594.006	418.721	414.373	440.570	471.887	1.745.550
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/	467.858	476.991	1.829.475	478.469	492.316	513.287	538.155	2.022.228
a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas	67.688	68.905	262.160	69.036	69.929	72.628	74.257	285.850
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	400.170	408.085	1.567.315	409.433	422.386	440.659	463.899	1.736.378
c. Penggalian / Quarrying								
3. INDUSTRI PENGOLAHAN /	1.562.867	1.637.939	6.055.971	1.675.207	1.722.584	1.814.194	1.948.625	7.160.610
a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries								
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing	1.562.867	1.637.939	6.055.971	1.675.207	1.722.584	1.814.194	1.948.625	7.160.610
1. Makan, Minuman dan Tembakau / Food, Dr	396.932	415.729	1.561.168	431.664	443.777	470.283	496.938	1.842.662
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	624.580	656.135	2.397.770	665.145	679.897	717.807	780.762	2.843.611
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	56.878	57.856	219.759	58.355	59.723	61.633	66.625	246.337
4. Kertas dan Barang Cetak	4.862	4.864	19.226	4.951	5.062	5.213	5.245	20.472
5. Pupuk Kimia dan Barnq dari Karet	98.580	100.299	386.733	103.593	106.722	112.602	116.043	438.960
6. Semen dan Barnq Non Logam	342.640	364.888	1.318.223	372.865	388.058	405.887	442.124	1.608.934
7. Logam Dasar, Besi dan Baja						0	0	
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	37.865	37.593	151.035	38.056	38.756	40.164	40.233	157.209
9. Barang Lainnya/Other	531	574	2.056	577	589	604	655	2.425
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /	190.767	193.345	754.790	194.580	201.350	212.127	214.132	822.189
a. Listrik / Electricity	175.763	177.880	695.631	178.936	185.232	195.494	197.898	756.759
b. Gas / Gas								
c. Air Bersih / Water Supply	15.004	15.495	59.159	15.644	16.118	16.634	17.034	65.430
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	752.435	767.907	2.972.397	794.888	809.562	830.456	855.239	3.290.146
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN /	2.317.069	2.407.662	8.992.233	2.459.524	2.524.213	2.642.258	2.742.004	10.367.999
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Tra	2.236.509	2.324.697	8.673.675	2.374.947	2.437.779	2.552.213	2.650.393	10.015.331
b. Hotel / Hotels	20.528	22.122	79.864	22.321	22.795	23.313	24.634	93.062
c. Restoran / Restaurant	60.032	60.843	238.694	62.256	63.639	66.733	66.978	259.606
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI /	2.022.664	2.066.394	8.022.487	2.123.384	2.186.382	2.312.661	2.434.181	9.056.609
a. Angkutan / Transport	1.671.787	1.704.759	6.646.456	1.747.405	1.795.799	1.897.949	2.002.321	7.443.474
1. Kereta Api /Railway Transport	10.724	10.736	43.132	11.056	11.603	12.166	12.193	47.018
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	1.173.263	1.195.247	4.667.779	1.222.524	1.252.481	1.323.532	1.402.153	5.200.690
3. Angkutan Laut / Sea Transport	126.785	127.756	509.363	128.014	131.420	136.867	139.606	535.907
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan/Inland	45.912	46.443	180.740	47.982	49.111	51.003	55.569	203.666
5. Angkutan Udara / Air Transport	164.143	169.825	647.683	178.699	186.775	202.017	215.562	783.054
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary	150.959	154.751	597.759	159.130	164.408	172.362	177.238	673.139
b. Komunikasi / Communication	350.878	361.636	1.376.031	375.979	390.583	414.712	431.860	1.613.135
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	669.106	686.906	2.632.089	704.843	724.683	752.736	782.498	2.964.759
a. Bank / Banking	206.639	218.367	792.659	220.881	225.328	229.078	240.877	916.165
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang /	171.707	174.730	676.265	179.762	183.393	191.769	198.117	753.040
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	271.906	274.756	1.088.259	284.705	295.975	310.778	321.314	1.212.771
d. Jasa Perusahaan / Business Services	18.853	19.053	74.906	19.495	19.987	21.112	22.190	82.783
9. JASA-JASA / SERVICES	2.111.413	2.137.833	8.373.621	2.217.127	2.293.298	2.387.579	2.437.090	9.335.094
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan / Public Administra	1.442.803	1.461.452	5.744.638	1.519.561	1.576.434	1.638.470	1.665.169	6.399.634
b. Swasta / Private Services	668.610	676.380	2.628.983	697.566	716.864	749.109	771.921	2.935.460
1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Service	259.068	265.014	1.008.362	272.969	279.517	289.907	302.834	1.145.227
2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Serv	66.377	67.106	262.684	67.940	69.161	71.832	74.323	283.255
3. Perorangan dan Rumah tangga/ Personal & Househol	343.165	344.260	1.357.937	356.657	368.187	387.370	394.764	1.506.977
PDRB / GRDP	13.437.748	13.688.220	53.029.588	14.120.432	14.424.201	15.203.089	16.043.069	59.790.792

Catatan : *) Angka Diperbaiki
 **) Angka Sementara
 ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 2
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2006-2007

Sektor / Sub Sektor	Tahun 2006 **)		Total 2006 **)	Tahun 2007 ***)				Total 2007***)
	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW. II	TRW. III	TRW. IV	
1. PERTANIAN / AGRICULTURE	1.929.175	1.938.802	7.658.395	1.946.093	1.974.867	2.040.555	2.085.080	8.046.594
a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm Food Crops	967.679	975.356	3.854.067	976.429	990.685	1.027.142	1.050.869	4.045.125
b. Perkebunan / Farm Non Food Crops	473.434	479.257	1.861.669	485.391	498.885	519.539	530.761	2.034.576
c. Peternakan/Livestock	153.868	152.699	611.828	152.607	154.851	158.133	159.367	624.958
d. Kehutanan/Forestry	122.959	118.840	489.512	117.271	116.439	118.454	118.415	469.449
e. Perikanan/Fishery	211.235	212.650	841.318	214.394	214.008	218.416	225.668	872.486
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/	246.392	246.247	980.827	246.481	250.605	255.182	258.882	1.011.150
a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum & Natural Gas	46.366	47.001	183.776	47.015	47.410	47.842	47.540	189.808
b. Non Migas / Non Crude Petroleum & Natural Gas	200.026	199.246	797.051	199.465	203.195	207.340	211.342	821.342
c. Penggalian / Quarrying								
3. INDUSTRI PENGOLAHAN /	998.227	1.004.390	3.978.641	1.013.370	1.034.250	1.067.805	1.082.877	4.198.302
a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries								
b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing	998.227	1.004.390	3.978.641	1.013.370	1.034.250	1.067.805	1.082.877	4.198.302
1. Makan, Minuman dan Tembakau / Food, Drink	268.951	269.973	1.068.579	273.563	278.925	288.492	294.089	1.135.069
2. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	400.165	403.327	1.597.682	404.577	411.738	426.808	434.575	1.677.698
3. Barang Kayu dan Hasil Hutan	33.546	33.087	134.883	32.581	32.317	32.452	32.706	130.055
4. Kertas dan Barang Cetakan	3.363	3.377	13.301	3.398	3.445	3.504	3.517	13.863
5. Pupuk Kimia dan Barg dari Karet	69.819	69.847	278.112	70.671	71.420	72.956	73.087	288.133
6. Semen dan Barg Non Logam	199.915	202.297	796.865	206.060	213.602	220.373	221.541	861.576
7. Logam Dasar, Besi dan Baja								
8. Alat Angk. Mesin dan Peralatan	22.117	22.130	87.823	22.168	22.447	22.856	22.995	90.466
9. Barang Lainnya/Other	351	352	1.396	353	356	365	368	1.441
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /	93.135	94.044	368.982	94.562	97.571	100.837	101.463	394.433
a. Listrik / Electricity	84.439	85.190	334.433	85.633	88.408	91.485	92.043	357.569
b. Gas / Gas								
c. Air Bersih / Water Supply	8.696	8.854	34.549	8.928	9.163	9.353	9.421	36.864
5. BANGUNAN / CONSTRUCTION	390.307	396.045	1.544.890	399.688	405.324	406.378	415.806	1.627.195
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN /	1.435.797	1.462.013	5.662.879	1.478.213	1.503.475	1.536.067	1.538.927	6.056.683
a. Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale & Retail Trade	1.387.618	1.412.873	5.472.369	1.428.556	1.453.127	1.484.805	1.486.884	5.853.371
b. Hotel / Hotels	12.327	12.618	48.647	12.664	12.848	12.997	13.235	51.744
c. Restoran / Restaurant	35.852	36.522	141.863	36.994	37.500	38.265	38.809	151.568
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI /	1.045.509	1.073.339	4.140.570	1.092.430	1.118.326	1.150.866	1.180.237	4.541.860
a. Angkutan / Transport	808.361	827.630	3.216.078	838.171	854.481	874.198	890.483	3.457.333
1. Kereta Api /Railway Transport	6.576	6.631	26.453	6.653	6.863	7.032	7.139	27.688
2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport	532.397	542.299	2.119.592	549.946	560.340	573.732	583.830	2.267.847
3. Angkutan Laut / Sea Transport	62.217	62.609	250.120	62.283	63.635	64.933	65.498	256.348
4. Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan/Inland	15.680	16.116	61.787	16.472	16.737	17.154	17.320	67.682
5. Angkutan Udara / Air Transport	100.316	107.323	396.648	108.922	111.482	113.890	117.056	451.349
6. Jasa Penunjang Angkutan / Supporting and Auxiliary	91.176	92.653	361.478	93.895	95.425	97.458	99.641	386.418
b. Komunikasi / Communication	237.148	245.709	924.492	254.259	263.845	276.668	289.754	1.084.527
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	401.186	405.871	1.579.348	411.294	418.132	428.229	434.835	1.692.490
a. Bank / Banking	138.393	141.396	544.300	142.824	145.452	147.794	148.045	584.116
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang /	97.918	99.083	386.365	100.807	101.765	104.075	106.531	413.179
c. Sewa Bangunan / Rent of Building	153.148	153.546	602.084	155.742	158.794	163.908	167.432	645.875
d. Jasa Perusahaan / Business Services	11.727	11.845	46.598	11.921	12.120	12.452	12.827	49.320
9. JASA-JASA / SERVICES	1.275.528	1.286.715	5.035.414	1.300.114	1.321.181	1.350.021	1.358.182	5.329.499
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration	849.004	854.390	3.351.829	861.567	873.973	889.530	893.266	3.518.337
b. Swasta / Private Services	426.523	432.325	1.683.585	438.547	447.207	460.491	464.916	1.811.162
1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services	152.381	153.204	602.737	155.870	158.878	163.374	165.155	643.278
2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Services	47.373	48.765	187.161	48.936	49.562	51.282	52.328	202.108
3. Perorangan dan Rumah tangga/ Personal & Household	226.768	230.355	893.687	233.742	238.767	245.835	247.433	965.776
PDRB / GRDP	7.815.255	7.907.465	30.949.945	7.982.245	8.123.731	8.335.939	8.456.290	32.898.205

Catatan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara
***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 3
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TRIWULANAN TAHUN 2006-2007

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun 2006 **)				Total Tahun 2006 **	Tahun 2007 ***)				Total Tahun 2007***
	TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW. II	TRW III	TRW. IV	
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	7.429.365,42	7.523.088,07	7.635.575,29	7.700.904,49	30.288.933,27	7.852.823,78	8.039.805,79	8.369.056,56	8.774.162,39	33.035.848,52
A. MAKANAN/Food	4.550.101,57	4.599.039,46	4.660.328,51	4.688.535,36	18.498.004,90	4.785.127,35	4.920.735,72	5.065.564,68	5.297.567,54	20.068.995,28
B. NON MAKANAN/Non-Food	2.879.263,85	2.924.048,61	2.975.246,78	3.012.369,13	11.790.928,37	3.067.696,43	3.119.070,08	3.303.491,88	3.476.594,86	12.966.853,24
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure	135.766,41	136.503,35	137.807,96	139.014,86	549.092,58	141.739,58	146.175,18	148.482,99	152.269,31	588.667,06
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure	1.467.947,60	1.493.761,55	1.526.053,27	1.557.376,94	6.045.139,36	1.608.574,04	1.638.748,00	1.701.225,10	1.764.510,67	6.713.057,82
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation	2.271.945,23	2.306.721,45	2.379.216,06	2.450.201,34	9.408.084,08	2.496.028,14	2.542.719,12	2.632.688,73	2.782.225,45	10.453.661,42
5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock	-138.042,93	-77.175,38	-59.957,43	-96.014,92	-371.190,65	-70.136,33	-118.718,45	-17.366,31	52.072,86	-154.148,23
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services	2.605.858,21	2.619.481,17	2.798.113,78	2.951.664,50	10.975.117,66	3.136.126,60	3.256.551,97	3.486.814,31	3.669.174,70	13.548.667,58
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services	922.239,54	949.361,01	979.060,71	1.014.926,94	3.865.588,20	1.044.723,33	1.081.080,44	1.117.811,99	1.151.346,35	4.394.962,13
Jumlah/ Total	12.850.600,40	13.053.019,20	13.437.748,22	13.688.220,28	53.029.588,10	14.120.432,47	14.424.201,17	15.203.089,38	16.043.069,03	59.790.792,05

(*) Angka Diperbaiki
 **) Angka Sementara
 ***) Angka Sangat sementara

LAMPIRAN 4
PDRB MENURUT PENGGUNAAN PROPINSI SUMATERA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TRIWULANAN TAHUN 2006-2007

Jenis Penggunaan/ Type of Expenditure	Tahun 2006 **)				Total 2006 **	Tahun 2007 ***)				Total Tahun 2007***
	TRW. I	TRW II	TRW. III	TRW. IV		TRW. I	TRW. II	TRW III	TRW. IV	
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure	4.198.724,93	4.243.879,45	4.285.316,10	4.309.989,54	17.037.910,03	4.336.467,89	4.410.979,66	4.474.348,59	4.517.054,95	17.738.851,08
A. MAKANAN/Food	2.689.810,36	2.715.014,58	2.738.324,55	2.748.408,10	10.891.557,60	2.773.825,16	2.828.102,52	2.856.667,87	2.870.094,21	11.328.689,76
B. NON MAKANAN/Non-Food	1.508.914,57	1.528.864,86	1.546.991,55	1.561.581,44	6.146.352,43	1.562.642,73	1.582.877,13	1.617.680,71	1.646.960,74	6.410.161,32
2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure	72.203,23	72.411,30	72.635,13	72.715,42	289.965,08	73.476,91	74.826,58	75.784,11	76.890,56	300.978,17
3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure	901.421,84	910.495,95	919.245,38	926.923,72	3.658.086,90	939.382,10	951.897,74	962.814,79	974.946,25	3.829.040,88
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation	1.384.076,77	1.392.855,96	1.406.976,36	1.420.736,78	5.604.645,87	1.436.345,57	1.449.422,42	1.460.199,50	1.478.305,97	5.824.273,46
5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock	-87.665,45	-48.673,53	-38.547,23	-62.460,66	-237.346,87	-112.093,47	-119.692,34	-73.569,56	-116.630,57	-421.985,94
6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services	1.713.330,50	1.717.726,20	1.807.304,24	1.887.222,28	7.125.583,22	1.961.887,92	2.028.984,48	2.112.747,22	2.210.651,03	8.314.270,66
7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services	618.464,17	625.098,27	637.674,53	647.662,17	2.528.899,13	653.221,74	672.687,75	676.385,52	684.928,36	2.687.223,36
Jumlah/ Total	7.563.627,66	7.663.597,07	7.815.255,45	7.907.464,92	30.949.945,10	7.982.245,17	8.123.730,79	8.335.939,14	8.456.289,84	32.898.204,95

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

***) Angka Sangat sementara

Lampiran 5
Indeks Harga Konsumen Kota Padang (Tahun Dasar 2002)

Akhir Periode	BAHAN MAKANAN	MAKANAN JADI	PERUMAHAN	SANDANG	KESEHATAN	PENDIDIKAN	TRANSPORT	U M U M	
								IHK	Perub.(%)
2005									
Jul	124,40	125,13	121,98	119,66	108,10	116,63	125,49	122,75	1,12%
Agst	124,83	126,50	122,19	120,76	107,93	116,83	125,55	123,25	0,41%
Sep	127,39	128,28	122,50	122,79	109,45	116,91	126,22	124,73	1,20%
Okt	142,24	133,67	131,95	126,26	110,22	118,81	164,86	138,12	10,74%
Nov	148,26	135,72	132,35	126,80	111,89	126,55	164,90	141,04	2,11%
Des	140,68	135,62	132,57	127,99	111,97	126,55	164,86	138,76	-1,62%
2006									
Jan	136,36	135,76	132,49	129,59	112,60	126,56	164,57	137,50	-0,91%
Feb	136,50	139,49	135,58	129,26	113,68	126,56	165,29	138,90	1,02%
Mar	138,79	142,98	135,60	128,70	118,15	126,69	165,65	140,39	1,07%
Apr	135,44	143,00	138,68	130,90	118,15	126,88	165,66	140,13	-0,19%
Mei	135,08	143,00	139,01	135,39	117,68	127,23	166,00	140,47	0,24%
Jun	135,53	143,05	142,13	135,50	117,94	128,68	166,17	141,38	0,65%
Jul	136,51	147,40	142,89	137,02	118,19	128,76	166,22	142,70	0,93%
Agst	130,75	147,42	143,09	138,15	118,12	135,70	166,31	141,45	-0,88%
Sep	134,67	147,31	143,76	136,58	118,32	135,71	166,33	142,70	0,88%
Okt	140,13	150,29	144,14	138,20	121,06	135,79	166,33	145,23	1,77%
Nov	140,39	151,38	144,29	139,49	120,60	136,17	166,30	145,62	0,27%
Des	151,63	153,41	146,26	139,39	120,17	136,17	166,61	149,93	2,96%
2007									
Jan	155,42	156,19	147,05	138,93	120,43	136,79	167,12	151,84	1,27%
Feb	159,53	157,21	147,63	140,75	120,55	136,79	167,17	153,57	1,14%
Mar	165,09	157,44	147,71	141,01	120,65	136,79	167,44	155,45	1,22%
Apr	160,00	157,97	147,70	142,03	121,52	136,44	168,08	154,10	-0,87%
Mei	152,36	159,00	148,03	141,86	123,76	136,44	168,56	152,06	-1,33%
Jun	151,94	160,44	149,00	141,32	125,05	136,44	168,79	152,40	0,22%
Jul	153,73	161,13	150,11	142,48	125,79	137,38	168,79	153,48	0,71%
Agst	153,77	161,64	151,48	143,61	126,22	138,78	168,77	154,03	0,36%
Sep	156,95	163,95	151,58	144,86	127,01	138,75	168,65	155,54	0,98%
Okt	159,27	164,44	151,69	146,09	128,78	138,75	168,44	156,51	0,62%
Nov	161,20	165,79	153,64	147,40	129,02	138,66	168,67	157,87	0,87%
Des	164,98	170,98	154,22	147,80	130,34	140,04	169,19	160,28	1,53%

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat

LAMPIRAN 6
Inflasi Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa
(Tahun Dasar 2002)

Kelompok / Subkelompok	IHK			Perubahan q-t-q	Perubahan y-o-y
	Des 2006	Sept 2007	Des 2007		
UMUM	149,93	155,54	160,28	3,05%	6,90%
BAHAN MAKANAN	151,63	156,95	164,98	5,12%	8,80%
Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya	169,12	167,29	180,96	8,17%	7,00%
Daging dan Hasil-hasilnya	115,85	126,05	123,78	-1,80%	6,85%
Ikan Segar	121,72	157,99	149,88	-5,13%	23,14%
Ikan Diawetkan	121,66	134,93	141,99	5,23%	16,71%
Telur, Susu & Hasil-hasilnya	124,76	142,56	144,97	1,69%	16,20%
Sayur-sayuran	157,54	163,90	171,52	4,65%	8,87%
Kacang-kacangan	162,03	177,20	187,57	5,85%	15,76%
Buah-buahan	159,62	147,46	143,14	-2,93%	-10,32%
Bumbu-bumbuan	225,08	159,26	198,05	24,36%	-12,01%
Lemak & Minyak	131,96	192,60	203,51	5,66%	54,22%
Bahan makanan lainnya	122,48	134,89	140,41	4,09%	14,64%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	153,41	163,95	170,98	4,29%	11,45%
Makanan Jadi	163,69	170,44	177,19	3,96%	8,25%
Minuman yang Tidak Beralkohol	144,43	148,13	153,47	3,60%	6,26%
Tembakau & Minuman Beralkohol	139,8	160,62	169,03	5,24%	20,91%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	146,26	151,58	154,22	1,74%	5,44%
Biaya Tempat Tinggal	137,57	141,95	146,12	2,94%	6,22%
Bahan Bakar, Penerangan & Air	184,46	184,43	184,86	0,23%	0,22%
Perlengkapan Rumah Tangga	119,57	144,97	146,69	1,19%	22,68%
Penyelenggaraan Rumah Tangga	114,42	116,57	118,4	1,57%	3,48%
SANDANG	139,39	144,86	147,8	2,03%	6,03%
Sandang Laki-laki	119,64	123,73	125,52	1,45%	4,91%
Sandang Wanita	126,8	129,13	129,49	0,28%	2,12%
Sandang Anak-anak	127,85	128,24	129,06	0,64%	0,95%
Barang Pribadi, Sandang lainnya	179,81	193,15	201,47	4,31%	12,05%
KESEHATAN	120,17	127,01	130,34	2,62%	8,46%
Jasa Kesehatan	135,93	149,31	150,15	0,56%	10,46%
Obat-obatan	113,7	123,14	131,46	6,76%	15,62%
Jasa Perawatan & Jasmani	147,89	149,82	149,82	0,00%	1,31%
Perawatan Jasmani & Kosmetik	112,9	117,25	121,01	3,21%	7,18%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA	136,17	138,75	140,04	0,93%	2,84%
Jasa Pendidikan	153,98	157,50	157,50	0,00%	2,29%
Kursus Pelatihan	102,93	123,86	123,86	0,00%	20,33%
Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	119,69	121,49	128,31	5,61%	7,20%
Rekreasi	107,18	104,49	106,12	1,56%	-0,99%
Olahraga	113,05	113,05	115,87	2,49%	2,49%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	166,61	168,65	169,19	0,32%	1,55%
Transportasi	181,23	183,93	184,63	0,38%	1,88%
Komunikasi & Pengiriman	122,44	122,44	122,44	0,00%	0,00%
Sarana & Penunjang Transportasi	153,64	155,56	156,41	0,55%	1,80%
Jasa Keuangan	139,54	139,54	139,54	0,00%	0,00%

Sumber : BPS